ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN DAYA SAING DAERAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

INTAN NASTITI PERMATASARI

105030600111016

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MALANG

2014

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always hope for a successful future.

Sesungguhnya, Tuhan akan menaikkan kelas hidupku jika aku menguatkan diri menghadapi masalahku. -Mario Teguh-

Bermimpilah seolah-olah anda hidup selamanya. Hiduplah seakan-akan inilah hari terakhir anda –James Dean-

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Sektor Unggulan dan Daya Saing Daerah Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung
Disusun Oleh	: Intan Nastiti Permatasari
NIM	: 105030600111016
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Administrasi Publik
Minat	: Perencanaan Pembangunan

Malang, Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Irwan Noor, MA	**Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, MAP**
NIP. 19611024 198601 1 002	**NIP. 19790523 200604 1 002**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 10 Juli 2014
Jam	: 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi atas nama	: Intan Nastiti Permatasari
Judul	: Analisis Sektor Unggulan dan Daya Saing Daerah Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung

dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua,	Anggota
Dr. Irwan Noor, MA	**Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, MAP**
NIP. 19611024 198601 1 002	**NIP. 19790523 200604 1 002**
Ketua,	Anggota
Drs. Heru Ribawanto, MS	**Drs. Abdul Wachid, MAP**
NIP. 19520911 197903 1 002	**NIP. 19561209 198703 1 008**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya aatau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 26 Juni 2014

Intan Nastiti Permatasari
NIM. 105030600111016

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dengan Rasa Syukur Kepada Allah SWT, Karya ini ku Persembahkan Untuk...

" Kedua Orang tua ku tercinta Bapak dan Ibu "

" Kakak – kakakku "

Terimakasih atas segala doa,
Semangat,
dan nasihatnya,
sehingga terselesaikannya hasil karya ini.

" Juniar Johansyah Susilo "

Terimakasih atas segala doa, semangat, dan partner diskusi & penelitianku ☺

-Intan Nastiti Permatasari-

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Intan Nastiti Permatasari. 2014. **Analisis Sektor Unggulan dan Daya Saing Daerah Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung.** Dr. Irwan Noor, MA. Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP. 201 hal + xvi.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilimpahkan pada pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat dan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi yang dimiliki. Pentingnya peran pemerintah daerah dalam menentukan sektor unggulan dan daya saing daerah dengan melihat pula arahan pembangunan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pembangunan yang didukung dengan pengembangan sektor unggulan maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan daya saing daerah serta dapat mengembangkan wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa saja yang menjadi sektor unggulan dan daya saing serta bagaimana pengembangannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode perencanaan yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini yaitu *Location Quotient* (LQ), *Shift Share* (SS) dan *Tipologi Klassen*. Ketiga alat analisis tersebut digunakan untuk dapat menentukan sektor mana yang menjadi sektor unggulan dan daya saing daerah guna mengembangkan wilayah Kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat sektor yang dapat diunggulkan di Kabupaten Tulungagung yaitu sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang memiliki nilai positif pada komponen *competitive position* hanya pada sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa yang berarti sektor tersebut lebih kompetitif dan dapat bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain. Selain itu, dukungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD sektor yang diunggulkan dengan mendapatkan prioritas dalam pengembangannya adalah sektor pertanian; sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor jasa-jasa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pemerintah dalam menentukan sektor unggulan sudah hampir sesuai dengan rencana untuk kedepannya.

Melalui penelitian ini disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dapat memberikan prioritas pengembangan pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, melakukan kerjasama ekonomi antar daerah, meningkatkan penyediaan infrastruktur, mengembangkan sektor unggulan dengan memperhatikan aspek lingkungan, serta mengembangkan UMKM yang berbasis teknologi yang ramah lingkungan.

Kata Kunci : Pembangunan Ekonomi Daerah, Sektor Unggulan, Daya Saing Daerah, Pengembangan Wilayah

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Intan Nastiti Permatasari. 2014. **Analysis of Superior Sectors and Competitiveness Area as Efforts Development Tulungagung Regency.** Dr. Irwan Noor, MA. Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP. 201 hal + xiv.

The implementation of development activities assigned on local government to create a society and able to increase competitiveness with attention to potentials. The importance of the role of local government in determining superior sectors and competitiveness area by looking at all the direction of development in accordance with documents RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) and RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Development supported by the development of superior sectors and indirectly can also increase the competitiveness of the region and can expand its territory. This research as a purpose to describe and analyze what it be superior sectors and competitiveness and how its development.

This research uses descriptive research with the quantitative approach. The planning method used to analyze in research is Location Quotient (LQ), Shift Share (SS) and Typology Klassen. The third of the analysis tools used to be able to determine which sector are becoming that superior sector and competitiveness the region to develop the region of Tulungagung.

The results of this research indicates that there are four sectors that can be considered in Tulungagung district is agricultural sector; trade, hotel and restaurant sector; financial, leasing and services company sector; and services sector.While the sectors that have a positive values on the components *competitive positions* only in the manufacturing industry sector and the services sector that means the sector more competitive and be able to compete with same sector in other region. As support that done by the local government Tulungagung District that is contained in RPJPD and RPJMD The sectors that were superior with have priority in its development was the agriculture sector, industry sector; trade, hotel and restaurant sector; and services sector. So it can be concluded that efforts of the government to determine superior sector has been almost in accordance with the plan for the future.

Through this research suggested that local government Tulungagung can give priority development in the financial, leasing and services company sector, do economic cooperation among of areas, increase of infrastructure facilities, develop sectors with regard to environmental aspects, and to develop UMKM based technology environmentally friendly.

Keyword : Regional Economic Development, Superior Sectors, Competitiveness Area, Regional Development.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Sektor Unggulan dan Daya Saing Daerah Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung."**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi.
2. Bapak Drs. Choirul Saleh M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Hermawan, SIP, M.Si selaku Koordinator Minat Perencanaan Pembangunan.
4. Bapak Dr. Irwan Noor, MA dan Bapak Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, MAP selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta dukungan dan juga banyak memberikan ilmunya mulai dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS dan Bapak Drs. Abdul Wachid, MAP selaku dosen penguji yang telah memberikan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak dan Ibu pegawai BAPPEDA Kabupaten Tulungagung yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Teman-teman Perencanaan Pembangunan 2010 dan Administrasi Publik 2010 yang telah memberikan banyak motivasi dan masukan pada penulis.

Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi fihak yang membutuhkan.

Malang, 29 Juni 2014

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii
TANDA PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
RINGKASAN vi
SUMMARY vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kontribusi Penelitian 11
E. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan 15
B. Perencanaan Pembangunan Daerah 17
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah 17
2. Ciri dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah 18
3. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 20
C. Pembangunan Ekonomi Daerah 21
1. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah 24
D. Potensi Ekonomi Daerah 29
1. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah 29
2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 30
3. Sektor Unggulan 37
4. Teori Basis Ekonomi 39
5. Metode Analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, dan *Tipologi Klassen* 40
E. Daya Saing Daerah 44
F. Pengembangan Wilayah 47
G. Kerangka Pemikiran 51

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 52
B. Lokasi Penelitian....52
C. Teknik Pengumpulan Data 53
D. Teknik Analisis Data 54
1. Analisis *Location Quotient (LQ)* 55
2. Analisis *Shift Share*....57
3. Analisis *Tipologi Klassen* 63
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian....65

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung....67
1. Kondisi Geografis Kabupaten Tulungagung 67
2. Kondisi Demografis Kabupaten Tulungagung 69
B. Penyajian Data 72
1. Sektor-sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 72
2. Pengembangan Sektor Ekonomi PDRB Kabupaten Tulungagung....91
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)....91
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 96
c. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung....102
C. Analisis Data....108
1. Sektor Unggulan dan Daya Saing di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012....108
a. Sektor Unggulan dan Daya Saing Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2009 109
1) Analisis *Location Quotient* (LQ) Tahun 2008-2009 110
2) Analisis *Shift Share* Tahun 2008-2009....112
3) Analisis *Tipologi Klassen* Tahun 2008-2009 120
b. Sektor Unggulan dan Daya Saing Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2010 123
1) Analisis *Location Quotient* (LQ) Tahun 2009-2010 124
2) Analisis *Shift Share* Tahun 2009-2010....125
3) Analisis *Tipologi Klassen* Tahun 2009-2010 134
c. Sektor Unggulan dan Daya Saing Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2011 136
1) Analisis *Location Quotient* (LQ) Tahun 2010-2011 137
2) Analisis *Shift Share* Tahun 2010-2011....139
3) Analisis *Tipologi Klassen* Tahun 2010-2011 146
d. Sektor Unggulan dan Daya Saing Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2012 149
1) Analisis *Location Quotient* (LQ) Tahun 2011-2012 150
2) Analisis *Shift Share* Tahun 2011-2012....152
3) Analisis *Tipologi Klassen* Tahun 2011-2012 160
e. Sektor Unggulan dan Daya Saing Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012....162
1) Rata-rata Analisis *Location Quotient* (LQ) Tahun 2008-2012 ...162

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2) Rata-rata Analisis *Shift Share* Tahun 2008-2012 167
3) Rata-rata Analisis *Tipologi Klassen* Tahun 2008-2012 176
2. Pengembangan Sektor Unggulan dan Daya Saing Daerah Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung 182
a. Berbasis Pada Keuntungan Kompetitif Daerah 186
b. Pengembangan Komoditi Unggulan 187
c. Peningkatan Kemampuan Teknologi Daerah 189
d. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 190
e. Pengembangan Kewirausahaan Daerah 192
f. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu 193
g. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Antar daerah 195

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 197
B. Saran 200

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012	9
2	Klasifikasi Sektor PDRB menurut *Tipologi Klassen*	64
3	Pertumbuhan Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung	70
4	Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2012	70
5	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	74
6	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	74
7	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	76
8	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	76
9	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	77
10	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	78
11	Kontribusi Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	80
12	Kontribusi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	80
13	Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	81
14	Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	81
15	Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	83
16	Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	83
17	Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	85
18	Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	85
19	Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	87
20	Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	87
21	Kontribusi Sektor Jasa-jasa dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	89
22	Kontribusi Sektor Jasa-jasa dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	89

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

23 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun 2008-2012.....91
24 PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2009.....110
25 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2009.....111
26 Hasil Analisis *Shift Share* Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2009.....113
27 Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2009.....121
28 Klasifikasi Sektor PDRB menurut *Tipologi Klassen* Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2009.....122
29 PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2010.....123
30 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2009.....124
31 Hasil Analisis *Shift Share* Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2010.....126
32 Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2010.....134
33 Klasifikasi Sektor PDRB menurut *Tipologi Klassen* Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2010.....135
34 PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2011.....137
35 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2011.....137
36 Hasil Analisis *Shift Share* Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2011.....139
37 Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2011.....147
38 Klasifikasi Sektor PDRB menurut *Tipologi Klassen* Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2011.....148
39 PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2012.....150
40 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2012.....150
41 Hasil Analisis *Shift Share* Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2012.....152
42 Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2012.....160
43 Klasifikasi Sektor PDRB menurut *Tipologi Klassen* Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2012.....161
44 Rata-rata Hasil Perhitungan Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012.....163
45 Rata-rata Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share* Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012.....168
46 Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012.....176
47 Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen Tahun 2008-2012.....177

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012	8
2	Skema Perencanaan yang Ideal	20
3	Skema Kerangka Pemikiran	51
4	Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS	62
5	Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung	68
6	Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS Tahun 2008-2009	118
7	Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS Tahun 2009-2010	132
8	Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS Tahun 2010-2011	145
9	Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS Tahun 2011-2012	158
10	Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS Tahun 2008-2012	173

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	PDRB Kabupaten Tulungagung ADHK 2000 Tahun 2008-2012	206
2	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012	207
3	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tulungagung ADHK 2000 Tahun 2008-2012	208
4	PDRB Provinsi Jawa Timur ADHK Tahun 2008-2012	209
5	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012	210
6	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Jawa Timur ADHK 2000 Tahun 2008-2012	211
7	Hasil Perhitungan Analisis *Location Quotient* (LQ) Tahun 2008-2012	212
8	Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share* Tahun 2008-2012	212
9	Hasil Perhitungan Analisis Location Quotient (LQ) Sektor dan Subsektor Tahun 2008-2012	218
10	Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektor dan Subsektor Tahun 2008-2012	219

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

"Administrasi pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan" (Siagian, 2012:5). Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan juga mengarah pada masa depan. Selain itu, administrasi pembangunan juga berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yaitu dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang meliputi dari semua aspek, baik ekonomi, sosial, politik dan lainnya, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyatakan bahwa pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Adapun salah satu tujuan dari perencanaan pembangunan nasional adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, keadilan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara maksimal tentunya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Salah satu upaya untuk mencapai hasil pembangunan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka diperlukannya suatu perencanaan dan perkiraan di setiap sektor maupun pada salah satu sektor tertentu. Dimana perencanaan sebagai suatu alat atau sarana dalam proses pengarahan untuk pemanfaatan sumber-sumber daya yang terbatas dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Suatu perencanaan yang baik itu tidak hanya merencanakan pembangunan pada bidang fisik saja, tetapi juga harus diarahkan pada berbagai kegiatan dari semua bidang, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan.

Pada dasarnya perencanaan pembangunan sering diaplikasikan kedalam perencanaan pembangunan ekonomi. Menurut Arsyad (2010:158) mengungkapkan bahwa "perencanaan dianggap sebagai alat untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi dan mempersiapkan suatu landasan ekonomi yang kuat bagi perkembangan pembangunan ekonomi selanjutnya." Pembangunan ekonomi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, memeratakan pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional (BPS Kab. Tulungagung, 2013:6).

Pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut juga dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang telah tertuang dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mampu

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi serta potensi dan keanekaragaman daerah. Tujuan pemberian kewenangan pada pemerintah daerah tersebut agar terwujudnya percepatan pembangunan dan pemberian pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara adil dan merata. Lebih lanjut menurut Daryanto dan Hafizrianda (2010:19) mengungkapkan bahwa "melalui otonomi daerah keberhasilan dalam pengembangan wilayah sangatlah tergantung pada kebijakan pemerintah daerah terutama dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi".

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan mengarahkan masa depan wilayahnya. Pentingnya kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan atau kelemahan di wilayahnya. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang (Tarigan, 2012:79). Oleh karena itu, untuk mengenal dan memahami dengan baik tentang wilayah perencanaannya sudah menjadi tanggungjawab bagi pemerintah daerah dalam mengenali potensi dan masalah, mengetahui profil wilayah, memahami berbagai kebijakan pembangunan yang ada, sehingga membantu pemerintah daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan yang baik dan relevan dalam pembangunan wilayahnya.

Pembangunan wilayah harus dilaksanakan secara terpadu dengan menyusun perencanaan dari sudut pandang pengembangan wilayah. Secara

teoritis, pembangunan wilayah harus dapat menyeimbangkan kepentingan lokal. Keterpaduan kepentingan tersebut melibatkan keterpaduan antar sektor baik sektor ekonomi maupun sektor non ekonomi pada suatu daerah (Harry, 2009). Menurut Mangiri (2000) dalam Daryanto dan Hafizrianda (2010:17-18) mengungkapkan bahwa konsep pengembangan wilayah terbagi atas empat, yaitu :

1) pengembangan wilayah berbasis sumber daya yang merupakan semua potensi yang dimiliki oleh alam dan manusia,
2) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan,
3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi, dan
4) pengembangan wilayah menurut pelaku pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa tidak ada satu pun daerah yang memiliki karakteristik yang sama, sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Setiap daerah tentunya dapat mengembangkan potensi-potensi yang menjadi ciri khas daerah tersebut yang sesuai dengan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan letak geografisnya untuk dijadikan sebagai sektor unggulan dan mampu bersaing dengan daerah lain. Pentingnya untuk mengetahui sektor unggulan di daerah terkait otonomi daerah dan hubungannya dengan penyerapan basis ekonomi lokal dapat memacu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan dalam mengembangkan potensi ekonomi daerahnya untuk dapat menghasilkan pembangunan bagi masyarakatnya secara optimal.

Keberadaan potensi ekonomi daerah merupakan motor penggerak perekonomian daerah yang harus dikembangkan secara optimal dimasa depan, sehingga potensi ekonomi yang ada mampu menjadi sektor unggulan dan mampu

bersaing dengan daerah lain. Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional (Abdullah, 2002:13). Dengan demikian, maka sasaran dalam peningkatan daya saing daerah adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 secara tersirat memberikan makna bahwa peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui suatu proses perencanaan yang matang. Proses perencanaan tersebut harus melalui suatu analisis yang dapat menguraikan potensi-potensi daerah menjadi penunjang daya saing daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Ada beberapa metode analisis yang dapat digunakan sebagai penentu sektor unggulan dan yang mampu bersaing dengan daerah lain yaitu metode *Location Quotient* (LQ), *Shift Share Analysis,* dan *Tipologi Klassen.* Metode LQ ini digunakan untuk mengetahui sektor mana yang menjadi unggulan dan sektor mana yang tidak menjadi unggulan pada suatu daerah dengan membandingkan suatu daerah dengan daerah tingkat atasnya pada kurun waktu tertentu. Sedangkan *shift share analysis* digunakan untuk mengetahui dan menganalisis potensi pertumbuhan produksi sektoral dari suatu daerah. Dalam analisis *shift share* ini ditentukan oleh tiga komponen, diantaranya *National Share, Proportional Shift,* dan *Competitive Position.* Pada *competitive position* dapat diketahui sektor yang memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing daerah. Dari metode analisis tersebut dapat diketahui sektor unggulan yang mampu bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain. Kemudian, analisis

Tipologi Klassen digunakan untuk mengidentifikasi sektor perekonomian kabupaten dengan memperhatikan sektor perekonomian daerah ditingkat atasnya (provinsi) sebagai daerah referensi.

Pentingnya keberadaan sektor unggulan yang mampu bersaing dengan daerah lain sebagai modal dasar dalam melakukan percepatan pembangunan serta pengembangan wilayah guna tercapainya tujuan pembangunan yaitu mensejahterakan masyarakat. Perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukannya langkah strategis untuk dapat menentukan sektor unggulan dalam mengambil sebuah kebijakan yang mengarah pada konsep pengembangan wilayah. Keberadaan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, dengan letak strategis yang sesuai dengan wilayah pengembanganya. Letak Kabupaten Tulungagung yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar, Trenggalek dan Kediri membuat Kabupaten Tulungagung dapat berkembang dan bersaing dengan daerah lain melalui sektor unggulan yang dimilikinya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerahnya guna melakukan percepatan pembangunan dan mengembangkan wilayahnya. Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018 Kabupaten Tulungagung yang menyatakan "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan Sumberdaya

Manusia Yang Profesional Berdasarkan Iman dan Taqwa". Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan.
2. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirusahaan.
6. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

Berdasarkan pada visi dan misi tersebut pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui rencana pembangunan daerahnya. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangatlah identik dengan pembangunan ekonomi. Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Berikut ini laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008-2012 Kabupaten Tulungagung :

Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012

Keterangan : *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2013

Berdasarkan pada gambar 1, menunjukan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 5 tahun (2008-2012) terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tahun 2008 yang mencapai 5,86% hingga tahun 2012 mencapai 6,99%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung disumbang berdasarkan pada lapangan usaha dari 9 sektor yang ada, yaitu : 1) pertanian, 2) pertambangan dan penggalian, 3) industri pengolahan, 4) listrik, gas dan air bersih, 5) konstruksi, 6) perdagangan, hotel dan restoran, 7) pengangkutan dan komunikasi, 8) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, 9) jasa-jasa.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut sektor selama kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Persen)

	Sektor	2008	2009	2010	2011*	2012**
1	Pertanian	3,49	3,35	2,34	2,56	3,43
2	Pertambangan dan Penggalian	4,26	4,98	4,83	4,74	3,62
3	Industri Pengolahan	5,37	5,93	6,46	6,86	6,93
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	10,23	4,69	5,62	6,02	6,14
5	Konstruksi	4,23	4,36	5,04	6,92	6,65
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,42	7,75	9,19	9,43	9,66
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,55	10,79	11,67	10,87	8,22
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,11	5,40	5,79	6,00	6,83
9	Jasa-jasa	5,29	5,32	5,20	5,02	5,23
	PDRB	**5,86**	**6,01**	**6,48**	**6,73**	**6,99**

Keterangan : *) = Angka Perbaikan
**) = Angka Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2013

Berdasarkan pada tabel 1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung sebesar 5,86% dan sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2008 yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 11,55%. Sedangkan pada tahun 2009 pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan yaitu sebesar 6,01% dan sektor yang memberikan kontribusi terbesar masih tetap sektor pengangkutan dan komunikasi. Pada tahun 2010 dan 2011 masih tetap sama, sektor yang memberikan kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yakni sebesar 11,67% dan 10,87%. Namun pada tahun 2012 sektor yang memberikan kontribusi terbesar bukanlah sektor pengangkutan dan komunikasi, melainkan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,66%. Kemudian, jika dilihat selama kurun waktu 5 tahun (2008-2012) sektor yang mengalami kenaikan setiap tahunnya adalah sektor industri

pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Adapun sektor ekonomi yang kurang maksimal memberikan kontribusi pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung seperti sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; dan konstruksi. Jika melihat kembali misi pemerintah Kabupaten Tulungagung pada poin ke lima maka akan sulit untuk merealisasikan misi tersebut karena sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan PDRB yang cukup lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Sedangkan, berdasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung potensi pengembangan wilayah lebih mengarah pada sektor industri dan sektor jasa-jasa. Hal ini menandakan bahwa belum adanya sinkronisasi sektor mana yang menjadi sektor unggulan dan yang dapat disaingkan di Kabupaten Tulungagung.

Oleh sebab itu, perlu untuk mengetahui dan menganalisis sektor-sektor mana saja yang berpotensi untuk dijadikan sektor unggulan dan yang mampu disaingkan dengan daerah lain sebagai upaya pengembangan wilayah. Sehingga, diupayakan dapat mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan dengan mengetahui prospek dari masing-masing sektor yang dapat dijadikan sektor unggulan dan daya saing di tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Sektor Unggulan dan Daya Saing Daerah Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat permasalahan penting yang perlu dilakukannya tindakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Maka rumusan masalah yang akan diambil sebagai bahan penelitian adalah :

1. Apa sajakah sektor unggulan dan daya saing di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimanakah pengembangan sektor unggulan dan daya saing sebagai upaya pengembangan wilayah di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sektor unggulan dan daya saing di Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan sektor unggulan dan daya saing sebagai pengembangan wilayah di Kabupaten Tulungagung.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan pada hasil penelitian ini nantinya akan terdapat kontribusi yang dapat diterima dari semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi dari penelitian ini baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. **Kontribusi Akademis**
   a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan studi ilmu administrasi publik khususnya perencanaan pembangunan dalam mengidentifikasi potensi unggulan daerah dan sektor yang berdaya saing khususnya di daerah Kabupaten Tulungagung.
   b. Sebagai wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang pembangunan ekonomi daerah.
2. **Kontribusi Praktis**
   a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam proses pengambilan kebijakan penentuan sektor unggulan dan sekor yang berdaya saing sebagai upaya pengembangan wilayahnya di tahun-tahun mendatang.
   b. Sebagai bahan pemikiran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu administrasi publik khususnya perencanaan pembangunan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai susunan secara keseluruhan dari suatu karya ilmiah agar dapat mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui isi dari skripsi ini. Demikian hal nya penulisan dalam penelitian ini disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang perlunya penulis menggadakan penelitian, yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Kemudian pada bab ini juga berisi rumusan masalah yang merupakan kajian atau pokok pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian yang merupakan hal yang diharapkan dalam penelitian. Selain itu, pada bab ini juga berisi kontribusi penelitian baik kontribusi secara akademik maupun secara praktis yang dapat diterima bagi semua pihak. Serta pada bab ini terdapat sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab dalam skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : Administrasi Pembangunan, Perencanaan Pembanguan Daerah, Pembangunan Ekonomi Daerah, Potensi Ekonomi Daerah (Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, PDRB, Sektor Unggulan, Teori Basis Ekonomi, serta Metode Analisis *Location Quotient, Shift Share*, dan *Tipologi Klassen*), Daya Saing Daerah, dan Pengembangan Wilayah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional variabel penelitian. Adapun analisis

data yang diguankan dalam penelitian ini adalah analisis *Location Quotient (LQ)*, analisis *Shift-Share* dan analisis *Tipologi Klassen.*

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini menguraikan hasil dari penelitian dan menyajikan data umum yang digunakan dalam penelitian. Bab ini mendeskripsikan mengenai objek penelitian yang dibuat sesuai dengan keperluan penelitian. Deskripsi tersebut meliputi kondisi geografi, kondisi penduduk, kondisi potensi ekonomi yang terdapat di Kabupaten Tulungagung. Serta hasil analisis yang dilakukan baik secara perhitungan maupun dengan teori yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan hasil dari kesimpulan yang didapatkan dari hasil pembahasan dan hasil selama penelitian. Serta, dalam bab ini juga menguraikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

"Pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national-building)"* (Siagian, 1983 dalam Suryono, 2010:46). Dengan kata lain pengertian pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan, yang dilakukan dengan suatu perencanaan yang matang, berorientasi pada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern dalam arti luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, yang tentunya memiliki tujuan utama yaitu untuk membina bangsa.

Menurut Hakim (2011:38-39) dalam bukunya *Pengantar Administrasi Pembangunan*, mengemukakan pengertian administrasi pembangunan menurut Paul Meadows bahwa "administrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik." Selanjutnya, menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Hakim (2011:40) mengatakan bahwa "administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemeritah untuk merealisasi pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa." Sedangkan menurut Siagian (2012:5) mengemukakan bahwa "administrasi pembangunan

merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya." Dalam hal ini, administrasi pembangunan lebih mengarah pada upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang meliputi dari bidang ekonomi, sosial, politik, dan lainnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan, baik pembangunan makro, sektoral dan regional. Hal tersebut diperkuat dalam buku *Pengantar Administrasi Pembangunan* yang ditulis oleh EM. Lukman Hakim yang menyatakan bahwa :

> Pembangunan suatu bangsa yang jumlah penduduknya besar dan wilayahnya luas pada dasarnya dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan makro, sektoral, dan regional. Pembangunan makro mencakup sasaran-sasaran dan upaya-upaya pada lingkup nasional, yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional. Ketiga pendekatan tersebut mempunyai implikasi administratif yang berbeda, sesuai dengan lingkup dan kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan. Dari sisi inilah dimensi ruang dan daerah menjadi penting artinya dalam administrasi pembangunan dan administrasi pembangunan daerah menjadi penting dalam rangka pembangunan nasional (Hakim, 2011:66).

Berdasarkan pada beberapa pengertian administrasi pembangunan yang telah disebutkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu cara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem atau proses yang digunakan dan menetapkan suatu kebijakan bagi negara bangsa untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembangunan yang dilakukan melalui proses perencanaan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kegiatan pada bidang

ekonomi, sosial, politik, dan budaya dan telah disesuaikan dengan keadaan di negara tersebut.

B. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu sistem yang terbentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan dan daerah. Perencanaan sendiri memiliki definisi yang cukup beragam yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli. Sebagaimana menurut Louis A. Allen dalam Riyadi dan Supriyadi (2003:1-3) mengemukakan "perencanaan adalah penetapan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan". Lebih lanjut, menurut Diana Conyers dan Peter Hills menyatakan "perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang."

Selanjutnya mengenai pengertian pembangunan, para ahli juga mengemukakan beberapa definisi yang bermacam-macam sebagai berikut : menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) dalam Riyadi dan Supriyadi (2003:4) menyatakan "pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana." Sedangkan pengertian pembangunan yang dikemukakan oleh Siagian (1983) dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* yaitu :

> Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik

secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. (Riyadi dan Supriyadi, 2003:6)

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/ acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan).

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan yang terbentuk suatu konsep perencanaan pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya yang ada, dan berorientasi pada sesuatu yang dianggap berprioritas (Riyadi dan Supriady, 2003:7).

2. Ciri dan Fungsi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Adapun ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan menurut Wibowo (2008:16-17) adalah:

a) Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap *(steady social economic growth)*. Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
b) Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
c) Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.

d) Usaha perluasan kesempatan kerja
e) Usaha pemerataan pembangunan
f) Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
g) Usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi (Wibowo, 2008:16-17).

Sedangkan fungsi perencanaan menurut Arsyad (2010:160) adalah sebagai berikut :

a) Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
b) Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
c) Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
d) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
e) Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi.

Dari fungsi-fungsi perencanaan tersebut, dapat dilihat bahwa pentingnya suatu perencanaan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanan merupakan suatu proses untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dimasa depan dengan mempertimbangkan kejadian di masa lampau dan melihat kejadian saat ini. Dalam suatu proses perencanaan mempelajari dan mempertimbangkan

kejadian masa lampau merupakan hal yang penting, sehingga dapat memperkiraan kejadian-kejadiaan yang terjadi di masa mendatang.

3. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah tentunya melalui suatu proses tahapan yang rinci. Seperti yang diungkapkan menurut Bendavid-Val dalam Kuncoro (2004:50) menjelaskan bahwa tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah seperti gambar berikut :

Gambar 2 Skema Perencanaan yang Ideal

Sumber : Bendavid – Val (1991) dalam Kuncoro (2004:50)

Berdasarkan pada gambar 2 tersebut dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah, Bendavid-Val (1991) dalam Kuncoro (2004:49) mengemukakan 3 hal yang menarik, yaitu :

a) pengumpulan dan analisis data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi secara terus-menerus berfungsi mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan.
b) Semua tahap dalam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus, kemudian tujuan-tujuan secara periodik ditinjau kembali, sasaran-sasaran dirumuskan kembali, dan seterusnya.
c) Suatu rencana yang sudah dialokasikan bukanlah merupakan akhir dari suatu proses, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari waktu ke waktu untuk kepentingan-kepentingan praktis.

Oleh karena itu, tahapan perencanaan pembangunan yang ideal yang dikemukakan oleh Bendavid-Val tersebut dapat digunakan dan diterapkan pada daerah Kabupaten Tulungagung. Dimana dalam kegiatannya saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, sehingga dapat menciptakan suatu perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan suatu daerah.

C. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pentingnya faktor ekonomi dalam proses pembangunan sebagai faktor yang mempunyai determinan tinggi. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan yang banyak terjadi di negara-negara berkembang, dimana pada umumnya memberikan prioritas yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi. "Keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidang lainnya, sehingga lebih mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan." (Riyadi dan Supriady, 2003:19)

Menurut Todaro dan Smith (2003) dalam Arsyad (2010:11) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu :

a) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya *(sustenance)*
b) Meningkatnya rasa harga diri *(self-esteem)* masyarakat sebagai manusia

c) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih *(freedom from servitude)* yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

"Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya." (Arsyad, 2010:11). Dengan demikian, pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut :

a) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus
b) Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita
c) Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang
d) Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya) (Arsyad, 2010:11-12).

Selanjutnya, dalam konteks pembangunan ekonomi daerah maka pengertian daerah sendiri berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi menurut Arsyad (2010:373-374) mengatakan bahwa daerah mempunyai tiga pengertian yaitu :

a) Daerah *homogen*, suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan didalamnya terdapat sifat-sifat yang sama, yang dilihat dari segi pendapatan per kapita, sosial budaya, geografis dan sebagainya.
b) Daerah *nodal,* suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.
c) Daerah administrasi, suatu daerah yang merupakan suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan sebagainya. Jadi pengertian daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara.

Dengan demikian, pengertian pembangunan ekonomi daerah sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada di daerahnya dan menjalin kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010:374). pembangunan ekonomi daerah menurut Sukirno (2005) dalam Nilga (2012:1) mengungkapkan bahwa :

> Pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat didaerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh pelosok tanah air. Sedangkan pembangunan sektor ekonomi merupakan proses untuk mengubah suatu keadaan supaya lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerjasama untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada di daerahnya secara optimal. Pentingnya kebijakan pembangunan yang mengupayakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Apabila prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka pemafaatan sumber daya yang ada kurang maksimal. Dengan demikian, menurut Tarigan (2012:5) hal-hal yang perlu diperhatikan dan diatur oleh pemerintah daerah agar menjadi lebih baik sebagai berikut :

a) Terjaganya kelestarian lingkungan
b) Pemerataan pembangunan dalam wilayah

c) Penetapan sektor unggulan wilayah
d) Membuat keterkaitan antar sektor yang lebih baik dalam suatu wilayah, sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan
e) Pemenuhan kebutuhan pangan wilayah

1. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Dalam era otonomi, pembangunan ekonomi daerah sangatlah penting. Perlunya untuk melakukan perubahan dan strategi dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah baik provinsi, kabupaten atau kota. Dengan demikian beberapa strategi pembangunan ekonomi daerah yang dikemukakan oleh Sjafrizal (2008 : 234-248) sebagai berikut :

a) Strategi berbasis keuntungan kompetitif daerah

Dalam era otonomi, masing-masing daerah diberikan kebebasan untuk menentukan arah dan strategi pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Strategi pembangunan ekonomi daerah seharusnya didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif *(competitive advantage)*. Konsep ini lebih didasarkan pada unsur kreatifitas, teknologi dan kualitas manusia yang dikombinasikan menjadi suatu kegiatan usaha yang mempunyai daya saing yang tinggi. Dengan demikian, dapat saja terjadi di suatu daerah yang tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai, namun dapat berkembang pesat karena memiliki kelebihan dari segi kreatifitas, teknologi dan kualitas sumberdaya manusia. Dengan menggunakan konsep keuntungan kompetitif tersebut, berarti prioritas pembangunan ekonomi daerah haruslah diletakkan pada sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif yang tinggi. Sehingga produk-

produk yang dihasilkan oleh suatu daerah akan mempunyai daya saing yang tinggi karena didukung oleh potensi spesifik yang dimiliki daerah yang bersangkutan.

Jika pembangunan ekonomi daerah telah didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif, maka masing-masing daerah cenderung pada spesialisasi produksi sektor-sektor tertentu sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimiliki daerah tersebut. Dalam hal ini, melakukan ekspor baik ke daerah lain atau ke luar negeri merupakan hal penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, tidak semua daerah itu harus menjadi daerah industri, melainkan dapat mengembangkan di sektor lain seperti pertanian, pertambangan, ataupun pariwisata.

b) Pengembangan Komoditi Unggulan

Salah satu bentuk kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah yang didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif adalah pengembangan komoditi unggulan. Pemerintah mendorong masing-masing daerah untuk mengembangkan satu atau dua komoditi utama yang mempunyai potensi besar dan mempunyai daya saing tinggi sesuai dengan keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian melalui penetapan komoditi unggulan daerah akan menjamin hasil yang diperoleh sebagian besar akan jatuh dan

dinikmati oleh masyarakat setempat, dan bukan pada konglomerat dari daerah perkotaan yang mempunyai jaringan bisnis di daerah tersebut. Sehingga kesalahan masa lalu dimana hasil pembangunan yang kurang dapat dinikmati oleh masyarakat, akan dapat diperbaiki.

c) Peningkatan Kemampuan Teknologi Daerah

Peningkatan kemampuan teknologi merupakan unsur penting untuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan konsep keuntungan kompetitif. Karena kemampuan teknologi merupakan unsur penting untuk dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi yang telah ada serta merangsang munculnya penemuan produk baru. Kedua hal tersebut merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing komoditi daerah.

d) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Daerah

Pengembangan kemampuan teknologi daerah hanya akan dimungkinkan jika kualitas sumberdaya manusia daerah sudah cukup tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia daerah merupakan hal yang penting dalam era otonomi daerah. Dalam hal ini, pengembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan dua program strategis yang sangat menentukan dan perlu terus dilanjutkan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan pendidikan perlu ditekankan pada 3 hal pokok, yaitu : (1) peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik, (2) pengembangan prasarana dan

sarana pendidikan dan (3) perubahan manajemen pendidikan. Pada pokok pertama dan kedua selama ini sudah banyak diterapkan namun masih perlu untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Sedangkan pada pokok ketiga, manajemen pendidikan lebih diterapkan di tingkat sekolah sehingga pengembangan pendidikan menjadi lebih terarah sesuai kebutuhan dan dalam pengelolaannya menjadi lebih efisien.

e) Pengembangan Kewirausahaan Daerah

Jika suatu daerah memiliki potensi pengembangan ekonomi yang cukup besar dan juga didukung dengan kualitas sumberdaya manusia serta teknologi produksi yang cukup baik, akan tetapi bila para pengusaha dan masyarakatnya tidak mempunyai kemampuan kewirausahaan yang cukup tinggi maka pengembangan kewirausahaan akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, perlunya upaya-upaya yang tegas dan serius dari pemerintah daerah untuk dapat mengembangakan kewirausahaan yang ada.

f) Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu

Pada era otonomi daerah, pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral berubah menjadi pendekatan wilayah. Hal tersebut menandakan bahwa penentuan strategi dan kebijakan pembangunan tidak hanya memperhatikan potensi dan keterkaitan masing-masing sektor, melainkan juga memperhatikan manfaat keuntungan lokasi, karakteristik daerah, serta keterpaduan antar wilayah. Adapun salah satu bentuk dari pendekatan wilayah adalah melalui pembentukan Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada wilayah yang memiliki potensi yang cukup besar.

Biasanya KAPET mempunyai skala produksi dan kawasan yang cukup besar, namun jika hal tersebut belum memungkinkan pada wilayah tertentu yang mempunyai potensi yang memadai, maka dapat memulainya dengan membangun Kawasan Sentra Produksi (KSP). Konsep KSP ini sama seperti KAPET, akan tetapi KSP memiliki lingkup yang lebih kecil dan biasanya didasarkan pada kegiatan pertanian.

g) Peningkatan Kerjasama Ekonomi Antar Daerah

Dalam era otonomi daerah, kerjasama ekonomi antar daerah menjadi sangat penting. Melalui kerjasama ini, kelebihan suatu daerah akan dapat dimanfaatkan oleh daerah lain, sedangkan kekurangannya dapat dibantu oleh daerah lainnya. Dengan demikian, pemanfaatan sumberdaya yang tersedia akan menjadi lebih baik dan efisien sehingga pembangunan masing-masing daerah dapat ditingkatkan.

Untuk kerjasama antar daerah dalam negeri, kerjasama diarahkan pada bidang perencanaan, dan pelaksanaan proyek yang lokasinya melintasi beberapa daerah. Selain itu, kerjasama juga dapat dilakukan melalui pengembangan dalam bidang sosial ekonomi untuk mendorong pertumbuhan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan sebagai fasilitator, memberikan arahan dan melakukan pengawasan agar masing-masing daerah dapat mematuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama.

D. Potensi Ekonomi Daerah

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002:99).

Dalam menyusun sebuah strategi pengembangan potensi ekonomi daerah, perlu diketahui dahulu kekuatan dan kelemahan daerah dalam pengembangan perekonomiannya. Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki suatu daerah maka akan lebih tepat dalam menyusun strategi guna mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

> Tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan *riel per kapita* serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, maka strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan usaha didaerah yang bersangkutan (Suparmoko, 2002:99).

Oleh karena itu, dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada di daerah, menurut Suparmoko (2002:99) dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut :

a) Mengidentifikiasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor

b) Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan
c) Selanjutnya mengidentifikasi sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumberdaya manusianya dan yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan
d) Dengan menggunakan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan subsektor, maka akan ditemukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
e) Akhirnya menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang akan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya *(self propelling)* secara berkelanjutan *(sustainable development)*.

2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Salah satu cara untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah dapat dilihat dengan menyajikan data angka-angka pendapatan regional di wilayah tersebut. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dilakukan serta bahan dalam perencanaan pembangunan. Adapun salah satu data yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

"Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun." (Dokumen PDRB Kabupaten Tulungagung, 2013:6) Beberapa konsep dan definisi yang perlu diketahui untuk memudahkan pemahaman tentang PDRB menurut dokumen PDRB Kabupaten Tulungagung (2013:9-10) antara lain:

a) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku *(Gross Regional Domestic Product at Current Market Price)* adalah jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
b) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan suatu tahun tertentu *(Gross Regional Domestic Product at Constant Market Price)* adalah jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu tersebut.
c) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar *(Gross Regional Domestic Product at Market Prices)* merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari lapangan usaha, termasuk didalamnya balas jasa faktor produksi (upah dan gaji, surplus usaha) dan pajak tak langsung netto.

PDRB (Produk domestik Regional Bruto) adalah salah satu bentuk penyajian data yang bisa menggambarkan struktur perekonomian daerah pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen PDRB Kabupaten Tulungagung (2013:39-51), beberapa indikator pokok ekonomi makro tersebut dapat diuraikan secara singkat dari hasil perhitungan PDRB yaitu :

a) Nilai Nominal PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Dari dua sumber daya tersebut bila dikelola dengan baik dan tepat akan menghasilkan nilai tambah.

b) Peranan / Kontribusi Sektor Ekonomi

Peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi menunjukan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah.

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukan besarnya masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya. Struktur ekonomi adalah peranan sektor-sektor ekonomi terhadap jumlah total dari seluruh sektor. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku. Dari struktur ekonomi akan terlihat beberapa persen sumbangan masing-masing sektor sehingga bisa menggambarkan ciri khas ekonomi, andalan, potensi, hasil pembangunan ataupun perubahan akibat kebijakan publik dari pemerintah daerah.

c) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil bisa menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunannya, namun perlu dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum

tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya tentang pembangunan suatu daerah.

d) PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Perkapita / PDRN (Produk Domestik Regional Netto) Perkapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Sedangkan PDRN (Produk Domestik Regional Netto) perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaan dalam proses produksi. Kedua indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pengukuran kemakmuran penduduk suatu daerah. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa wilayah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan dokumen PDRB Kabupaten Tulungagung (2013:27-37) meliputi :

a) Sektor pertanian

Salah satu sektor dimana didalamnya terdapat penggunaan sumberdaya hayati untuk memproduksi suatu bahan pangan, bahan baku industri dan sumber energi. Sektor pertanian mencakup beberapa

subsektor yang terdiri dari tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan.

b) Sektor Pertambangan dan Penggalian

Pertambangan merupakan subsektor yang mencakup komoditi minyak, gas bumi, dan batu bara. Sedangkan penggalian merupakan sub sektor yang mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu kapur, pasir, dan lain-lain.

c) Sektor Industri Pengolahan

Sektor ini terdiri dari sub sektor industri besar / sedang dan subsektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Sektor industri pengolahan dirinci menurut KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia), rincian subsektor-subsektor dalam industri pengolahan terdiri dari : industri makanan, minuman dan tembakau; industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki; industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya; industri kertas dan barang cetakan; industri pupuk, barang kimia, dan barang dari karet; industri semen dan barang galian bukan logam; industri logam dasar, besi dan baja; industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya; industri pengolahan lainnya.

d) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Sub sektor Listrik, mencakup kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik yang diselenggarakan baik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN) ataupun non PLN. **Sub sektor Air Bersih**, mencakup air bersih yang diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM). Data produksi dan harga diperoleh dari PDAM yaitu dari hasil survei perusahaan air minum yang dilaksanakan setiap tahun oleh BPS.

e) Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan, jembatan, irigasi, jaringan listrik, air bersih, telepon, dan sebagainya. Nilai tambah bruto dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi.

f) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Subsektor perdagangan, perhitungan nilai tambah subsektor perdagangan dilakukan dengan pendekatan arus barang *(commodity flow),* yaitu dengan menghitung besarnya nilai komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta komoditi impor yang diperdagangkan. **Subsektor Hotel,** subsektor ini mencakup kegiatan ekonomi pada hotel-hotel berbintang, tidak berbintang serta jenis penginapan lainnya. **Subsektor Restoran,** data jumlah restoran, depot, rumah makan, warung dan sebagainya diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tulungagung.

g) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Subsektor Pengangkutan, kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan angkutan kereta api, angkutan jalan raya baik bermotor maupun tidak bermotor seperti bis, truk, ojek, dokar, becak, dan sebagainya. Serta jasa penunjang angkutan yang meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang

dan berkaitan dengan pengangkutan seperti terminal, parkir, keagenan barang dan penumapang, ekspedisi, pergudangan, dan jasa penunjang angkutan lainnya. **Sebsektor Komunikasi,** kegiatannya meliputi pos dan giro, telekomunikasi, dan jasa penunjang komunikasi.

h) Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor ini meliputi bank, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan dan jasa perusahaan.

i) Sektor Jasa-jasa

Subsektor Jasa Pemerintahan Umum, nilai tambah bruto subsektor jasa pemerintahan umum terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah. Upah dan gaji yang dihitung mencakup upah dan gaji dari belanja rutin dan sebagian dari belanja pembangunan. **Subsektor jasa swasta,** yang terdiri dari jasa sosial dan kemasyarakatan (meliputi jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial dan kemasyarakatan lainnya), jasa hiburan dan kebudayaan (mencakup bioskop, radio swasta, taman hiburan, karaoke, kesenian, jaranan, dan sebagainya), dan jasa perorangan dan rumahtangga (mencakup jasa perbengkelan, reparasi, jasa perorangan lainnya, pembantu rumahtangga dan sebagainya).

Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui *output* pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan *(leading sector)* di suatu daerah/wilayah.

3. Sektor Unggulan

Keberadaan sektor unggulan yang merupakan sektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan pada suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan di daerah. Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Pengertian sektor unggulan pada dasarnya merupakan "suatu sektor pada wilayah tertentu yang mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik" (Fachrurrazy, 2009:21).

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah. Adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan yaitu akumulasi modal, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Selain itu, penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki daerah tersebut (Fachrurrazy, 2009:22).

Dalam hal ini, penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kewenangan

untuk mengurus daerahnya sendiri dan membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah guna mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rachbini (2001) dalam Fachrurrazy (2009:21) mengatakan ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor unggulan, yaitu :

a) Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut
b) Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yag lebih luas
c) Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah
d) Sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif *(comparative advantages)* dan keunggulan kompetitif *(competitive advantage)* dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar. Menurut Tarigan (2012:79-82) pengertian keunggulan komparatif suatu sektor bagi suatu daerah adalah sektor itu lebih unggul secara relatif dengan sektor lainnya. Pengetahuan akan keunggulan komparatif pada suatu daerah dapat digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur perekonomian daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif. Sedangkan keunggulan kompetitif menganalisis kemampuan suatu dearah untuk memasarkan produknya di luar daerah. Istilah keunggulan kompetitif lebih udah dipahami karena hanya melihat apakah

produk yang dihasilkan bisa dijual di pasar global secara menguntungkan. Oleh karena itu, keunggulan komparatif dapat dijadikan sebagai awal bahwa sektor tersebut memiliki prospek yang juga memiliki keunggulan kompetitif. Setidaknya sektor tersebut layak untuk dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan daerahnya maupun untuk di ekspor ke daerah lain.

4. Teori Basis Ekonomi

Menurut Tarigan (2012:28) teori basis ekonomi *(economic base theory)* dinyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Terdapat 2 kegiatan ekonomi yaitu kegiatan basis dan non basis. Namun, hanya kegiatan basis yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Sedangkan menurut Arsyad (2010:376) "teori basis ekonomi merupakan faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah."

> Teori ini beranggapan bahwa permintaan terhadap *input* hanya dapat meningkat melalui perluasan permintaan terhadap*output* yang diproduksi oleh sektor basis (ekspor) dan sektor non-basis (lokal atau *service).* Permintaan terhadap produksi sektor lokal hanya dapat meningkat bila pendapatan lokal meningkat.Tetapi peningkatan pendapatan ini hanya terjadi bila sektor basis (ekspor) meningkat. Oleh karena itu, menurut teori basis ekonomi, ekspor rendah merupakan faktor penentu dalam pembangunan ekonomi (Rustiadi dan Saefulhakim,dkk:2011,180).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kegiatan sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sektor

basis dan non basis. Pada sektor basis dimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah. Dengan kata lain bahwa sektor basis ini akan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar daerah. Sedangkan, sektor non basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerahnya sendiri, dan kapasitas ekspor belum berkembang.

Kemudian Sjafrizal (2008:89) berpendapat bahwa sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena memiliki keuntungan kompetitif yang cukup tinggi. Sedangkan, sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau *service industries.* Adapun teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui sektor basis dan sektor non basis, diantaranya dengan analisis *Location Quotient* (LQ) dan *shift share analysis.*

5. Metode Analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share,* dan *Tipologi Klassen*

Dalam era otonomi daerah, masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sektor yang diprioritaskan dalam pengembangannya. Keberadaan pemerintah daerah untuk menetapkan sektor yang memiliki keunggulan atau kelemahan menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan dapat dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lainnya untuk berkembang.

Beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan potensi ekonomi daerah, diantaranya analisis *location quotient* (LQ), *shift share analysis*, dan *tipologi klassen.*

Analisis *Location Quotient* (LQ) adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor disuatu daerah (kabupaten/kota) terhadap besarnya peranan sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Ada banyak variabel yang bisa digunakan untuk perbandingan, tetapi yang paling umum adalah nilai tambah (PDRB) dan tenaga kerja (Tarigan,2012:82). Diketahui bahwa suatu sektor yang memiliki angka **LQ > 1** maka sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi kekuatan daerah untuk mengekspor produknya ke luar daerah. Sebaliknya, jika **LQ < 1,** maka sektor tersebut menjadi pengimpor. Sedangkan, jika **LQ = 1** maka ada kecenderungan sektor tersebut bersifat tertutup karena tidak melakukan transaksi ke dan dari luar wilayah (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:21).

Metode *Location Quotient* (LQ) tidak dapat menjelaskan faktor penyebab terjadi perubahan struktur ekonomi, sedangkan analisis *shift share* dapat diketahui perubahan struktur ekonomi wilayah dan memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah variabel nilai tambah (PDRB) atau tenaga kerja. Jika menggunakan nilai tambah maka sebaiknya menggunakan data harga konstan dengan tahun dasar yang sama.

Analisis *shift share* adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi (Guntara, 2013). Dalam analisis *shift share* diketahui adanya perbedaan dan kesamaan antarwilayah. Analisis ini mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen yang berhubungan satu sama lain, yaitu :

a) *National Share* (N_{ij}) adalah banyaknya pertambahan nilai tambah regional (PDRB) seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertambahan nasional selama periode studi. Hal ini dapat dipakai sebagai kriteria lanjutan bagi daerah tersebut untuk mengukur apakah daerah tersebut tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata (Tarigan,2012:86). Dengan kata lain, *national share* untuk menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah.

b) *Proportional Shift Component* (PS / M_{ij}), yang dikenal juga sebagai efek bauran industri atau *industrial mix*. Komponen ini mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif di daerah-daerah

yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang menurun (Tarigan,2012:86). Dapat dikatakan bahwa pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan referensi.

c) *Differential Shift Component* (DS / C_{ij}), komponen ini mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat didaerah yang bersangkutan daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor *lokasional intern.* Suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah/efisien, akan mempunyai *differential shift component* yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif (Tarigan, 2012:86-87). Kemudian Guntara (2013) mengungkapkan bahwa *differential shift*, memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran *differensial* dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran *differensial*

disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif *(competitive advantage).*

Sedangkan, untuk melihat pola dan struktur pertumbuhan ekonomi sektoral dapat dilakukan melalui pendekatan analisis *Tipologi Klassen*. Menurut Apriliyanto (2003) dalam Riadi (2008 : 22-23) mengungkapkan bahwa dalam analisis *Tipologi Klassen* dengan membedakan suatu sektor ekonomi menjadi empat klasifikasi, yaitu :

a) Sektor potensial dan tumbuh cepat apabila suatu sektor memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama pada tingkat provinsi.
b) Sektor maju tapi tertekan apabila laju pertumbuhan suatu sektor lebih kecil dari laju pertumbuhan sektor yang sama pada tingkat provinsi akan tetapi kontribusinya di wilayah tersebut lebih besar dari kontribusi sektor yang sama pada tingkat provinsi
c) Sektor berkembang cepat yaitu sektor yang berkembang dengan cepat apabila laju pertumbuhan sektor kabupaten/kota lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor pada tingkat provinsi akan tetapi strukturnya pada tingkat kabupaten lebih rendah dari struktur sektor yang sama pada tingkat provinsi
d) Sektor relatif tertinggal, apabila kabupaten memiliki sektor yang tingkat pertumbuhan dan kontribusinya lebih rendah dari tingkat pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama pada tingkat provinsi.

E. Daya Saing Daerah

Menurut Porter (1990) dalam Daryanto dan Hafizrianda (2010:11) menyatakan bahwa konsep daya saing yang dapat diterapkan pada level nasional tidak lain adalah produktivitas yang didefinisikan sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Kemudian menurut *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Daya saing dapat diartikan sebagai suatu potensi yang bersifat tunggal, sehingga dengan demikian tidak ada upaya pemahaman bagaimana kompleksitas faktor-faktor yang membentuk daya saing (Abdullah dkk, 2002:1). Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Selain itu, *Centre for Urban and Regional Studies* (CURDS) di Inggris mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:12). Berdasarkan konsep definisi daya saing tersebut, baik daya saing nasional maupun daerah pada prinsipnya memiliki makna yang sama, hanya berbeda pada cakupan wilayahnya saja.

Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

a) Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Sehingga daya saing lebih memungkinkan didefinisikan sebagai suatu kemampuan perekonomian.
b) Pelaku ekonomi, bukan hanya sektor bisnis, akan tetapi juga rumah tangga (masyarakat), pemerintah, dll yang terpadu dalam sistem ekonomi yang sinergis.
c) Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk di dalam perekonomiannya
d) Kata kunci dari konsep “daya saing” adalah kompetisi. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan (Abdullah dkk, 2002 : 14-15).

Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tidak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan merupakan konsep yang luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.

Adapun faktor penentu keunggulan daya saing wilayah yang dikemukakan oleh Porter (1990) dalam Daryanto dan Hafizrianda (2010:11) adalah :

> "keunggulan daya saing wilayah ditentukan oleh empat faktor pokok dan dua faktor penunjang. Empat faktor produksi yang dimaksud adalah kondisi faktor produksi *(factor condition),* kondisi permintaan pasar *(demand condition),* industri-industri terkait dan industri pendukung *(related and supporting industries)* serta strategi perusahaan, struktur dan persaingan *(firm strategy, structure and rivalry).* Sedangkan, faktor penunjangnya adalah peluang *(chance)* dan peranan pemerintah *(role of government)."*

Selanjutnya dalam buku yang ditulis oleh (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:18) mengungkapkan bahwa daya saing suatu wilayah tercipta jika wilayah tersebut memiliki kompetisi inti *(core competence)* yang dapat dibedakan dari wilayahnya. Kompetisi inti dapat diraih melalui *creation of factor,* yaitu upaya menciptakan berbagai faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan pesaingnya. Kompetensi inti dalam konteks pengembangan wilayah merupakan suatu upaya dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor-sektor yang berkembang di wilayah tersebut. Semakin baik pengkoordinasian dan pengintegrasiannya maka akan semakin tinggi upaya penciptaan kompetensi inti, sehingga sulitnya wilayah lain untuk bersaing dengan wilayah tersebut.

F. Pengembangan Wilayah

Perencanaan pengembangan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yang relevan, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2012:3).

> Pengembangan wilayah sendiri merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah tersebut (Susantono, 2009:1).

Dalam konteks pembangunan daerah antara pengembangan wilayah dengan pembangunan sektoral harus saling melengkapi. Pengembangan wilayah tidak mungkin akan terwujud jika tidak ada dukungan alokasi pembangunan sektoral. Sedangkan, pembangunan sektoral yang tidak berorientasi pada pengembangan wilayah maka akan mengalami tumpang tindih antarsektor dan tidak optimal dalam pembangunan sektor itu sendiri (Susantono, 2009:1).

Perencanaan pengembangan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral adalah dimana seluruh kegiatan ekonomi dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu per satu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut (Tarigan,2012:36). Lebih lanjut menurut Tarigan (2012 : 38) menjelaskan bahwa

dalam pendekatan sektoral, untuk setiap sektor/komoditi semestinya dibuat analisis sehingga dapat memberi jawaban tentang :

a) Sektor/komoditi apa yang memiliki *competitive advantage* di wilayah tersebut, artinya sektor tersebut dapat bersaing di pasar global
b) Sektor/komoditi apa yang basis dan nonbasis
c) Sektor/komoditi apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi
d) Sektor/komoditi apa yang memilii *forward lingkage* dan *backward linkage* yang tinggi
e) Sektor/komoditi apa yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tersebut
f) Sektor/komoditi apa yang banyak menyerap tenaga kerja per satu-satuan modal dan per satu hektar lahan.

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat ditetapkan skala prioritas tentang sektor/komoditi apa yang perlu dikembangkan di wilayah tersebut berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Penetapan prioritas sangat dibutuhkan dalam perencanaan pengembangan wilayah, mengingat adanya keterbatasan dana terutama dari anggaran pemerintah.

> Pendekatan regional sangatlah berbeda dengan pendekatan sektoral, walaupun tujuan akhirnya sama. Pendekatan regional dalam arti sempit adalah memperhatikan ruang dengan segala kondisinya. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, selain memperhatikan penggunaan ruang untuk kegiatan produksi/jasa juga memprediksi arah konsentrasi serta merencanakan jaringan-jaringan penghubung sehingga berbagai konsentrasi kegiatan dapat dihubungkan secara efisien (Tarigan,2012:39).

Pada pendekatan regional semestinya dapat menjawab berbagai pertanyaan yang belum terjawab apabila hanya menggunakan pendektan sektoral seperti berikut ini:

a) Lokasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang
b) Penyebaran penduduk dimasa yang akan datang dan kemungkinan munculnya pusat-pusat permukiman baru
c) Adanya perubahan pada struktur wilayah dan prasarana yang perlu dibangun untuk mendukung perubahan struktur ruang tersebut.
d) Perlunya penyediaan berbagai fasilitas sosial (sekolah, rumah sakit, jaringan, listrik, jaringan telepon, dan penyediaan air bersih) yang

seimbang pada pusat-pusat pemukiman dan pusat berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang

e) Perencanaan jaringan penghubung (prasarana dan mode transportasi) yang akan menghubungkan berbagai pusat kegiatan atau pemukiman secara efisien (Tarigan, 2012:42-43).

Menurut Mangiri (2000) dalam Daryanto dan Hafizrianda (2010:17) menyatakan konsep pengembangan wilayah secara garis besar terbagi atas 4,yaitu:

a) Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya, yang merupakan semua potensi yang dimiliki baik oleh alam maupun manusia.
b) Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan. Pembangunan wilayah pada komoditas yang dinilai dapat menjadi unggulan baik ditingkat domestik dan internasional.
c) Pengembangan wilayah berbasis efisiensi. Pengembangan wilayah yang berdasar pada pembangunan bidang ekonomi yang mempunyai porsi lebih besar dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya.
d) Pengembangan wilayah menurut pelaku pembangunan. Konsep ini mengutamakan peranan setiap pelaku pembangunan ekonomi (rumah tangga, lembaga sosial, pemerintah maupun koperasi).

Selain itu, adapun kriteria-kriteria dalam mengembangkan suatu wilayah dengan basis sektor unggulan sebagai berikut :

a) Harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Dengan kata lain, sektor unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan penduduk, pendapatan, dan pengeluaran.
b) Mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang *(forward and backward linkages)* yang kuat, baik sesama sektor unggulan maupun sektor lainnya.
c) Mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain *(competitiveness)* di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi dan kualitas pelayanan.

d) Memiliki keterkaitan dengan wilayah lain *(regional linkages),* baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku.
e) Memiliki status teknologi *(state of the art)* yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
f) Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
g) Dapat bertahan dalam jangka panjang tertentu, mulai dari fase kelahiran *(increasing),* pertumbuhan *(growth)* hingga fase kejenuhan *(maturity)* atau penurunan *(decreasing)*. Jika sektor unggulan yang satu memasuki tahap kejenuhan atau penurunan maka sektor unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
h) Pengembangannya harus mendapatkan berbagai bentik dukungan, misalnya keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, dan lain-lain.
i) Pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:31-32).

Setiap wilayah dituntut untuk memiliki faktor keunggulan khusus yang bukan didasarkan pada biaya produksi yang murah saja, melainkan setiap wilayah juga harus memiliki kemampuan untuk terus melakukan inovasi guna menghadapi persaingan yang ada. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa keunggulan daya saing suatu wilayah akan tercipta jika suatu wilayah memiliki kompetensi inti *(core competence)* yang dapat dibedakan dari wilayah lainnya. Dalam konteks pengembangan wilayah, kompetensi inti lebih terkait dengan upaya untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor-sektor unggulan dalam suatu wilayah. Semakin baik suatu wilayah mengkoordinasi dan mengintegrasikan sektor-sektor unggulan yang dikembangkan dalam suatu wilayah, maka akan tinggi pula tingkat daya saing wilayah tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Gambar 3 Skema Kerangka Pemikiran

Sumber : Hasil Olahan Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan model perencanaan pembangunan. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Nazir,2003:54). Selanjutnya, Nazir (2003:56) menambahkan penelitian pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pendekatan analisis kuantitatif didasarkan pada analisis variabel-variabel yang dijelaskan secara kuantitas dengan rumus-rumus atau alat analisis pasti. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ), *shift share* dan *tipologi klassen* yang merupakan alat analisis dalam perencanaan pembangunan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan pada lokasi penelitian, peneliti berharap mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan judul, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah Kabupaten Tulungagung, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa

Timur. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan sektor-sektor unggulan perekonomian dari hasil penelitian ini dapat diprioritaskan dan dapat disaingkan dengan sektor yang sama pada daerah lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk menjawab permasalahan dalam mencapai tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2005:156) menjelaskan bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau berupa dokumen.

Selanjutnya, dalam penelitian ini sumber dan teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder, antara lain :

a) Data PDRB di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun (2008-2012). Data ini digunakan untuk menganalisis klasifikasi pertumbuhan sektor, menganalisis sektor apa saja yang dijadikan sektor unggulan dan yang dapat disaingkan dengan sektor yang sama pada daerah lain, serta menganalisis pergeseran sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Data ini diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.
b) Data dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung, serta dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Data ini diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan, data primer digunakan oleh peneliti sebagai data pelengkap atau data pendukung yang dapat membantu memberikan keterangan sebagai bahan pembanding. Pada penelitian ini dilakukannya teknik pengumpulan data melalui *interview* atau wawancara pada narasumber. Adapun narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Bapak Eko Hadi, Kasubid Perdagangan dan Dunia Usaha, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung.
b) Ibu Maya, Kasubid Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung.

D. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kuantitatif, kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk mengajukan hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan (Sugiyono,2005:169). Dalam penelitian ini, teknik analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat hubungan-

hubungan yang ada (Bungin, 2008 :171). Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka peneliti menggunakan beberapa metode analisis data, yaitu metode LQ *(location Quotient)*, *Shift Share Analysis,* dan *Tipologi Klassen* yang merupakan metode yang sering digunakan sebagai penentu sektor unggulan dan sektor yang berdaya saing.

1. Analisis *Location Quotient (LQ)*

Location Quotient (kuosien lokasi) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional (Tarigan,2012:82). Adapun fungsi dari analisis LQ adalah alat untuk mengetahui sektor mana yang menjadi unggulan dan sektor mana yang tidak menjadi unggulan pada suatu daerah (kabupaten/kota) dengan membandingkan suatu daerah (kabupaten/kota) dengan daerah ditingkat atasnya (provinsi) pada kurun waktu tertentu. Tentunya analisis ini penting untuk dapat digunakan bagi pemerintah daerah, untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya agar pemerintah mengetahui sektor mana yang dapat diunggulkan didaerahnya dan harus mendapatkan anggaran lebih dibandingkan sektor lainnya, serta untuk mengetahui sektor mana yang belum terlalu *urgent* untuk menjadi sektor yang perlu diprioritaskan. Berikut persamaan dari rumus *Location Quotient* (LQ) :

$$LQ = \frac{\frac{V_i}{V_t}}{\frac{Y_i}{Y_t}}$$

Keterangan : V_i = nilai PDRB Sektor *i* di Kabupaten Tulungagung

V_t = total PDRB Kabupaten Tulungagung

Y_i = nilai PDRB sektor *i* di Provinsi Jawa Timur

Y_t = total PDRB Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, maka ada tiga kemungkinan nilai LQ yang dapat diperoleh, yaitu :

a) Apabila LQ > 1 berarti sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor unggulan (basis) yang mampu mengekspor hasil industrinya ke daerah lain (Arsyad,2010:392). Dapat dikatakan juga sektor tersebut dapat melebihi kebutuhan yang diperlukan Kabupaten Tulungagung. Daerah itu hanya mungkin mengekspor produk ke daerah lain atau luar negeri karena mampu menghasilkan produk tersebut secara lebih murah atau lebih efisien. Atas dasar itu LQ > 1 secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor *i* tersebut (Tarigan, 2012 : 82).

b) Apabila LQ < 1 berarti sektor yang ada di daerah tersebut bukan merupakan sektor basis dan cenderung untuk mengimpor dari daerah lain (Arsyad,2010:392). Dapat dikatakan bahwa sektor tersebut belum mampu untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan di Kabupaten Tulungagung, sehingga dimungkinkannya untuk melakukan impor dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya.

c) Apabila LQ = 1 berarti produk domestik yang dimiliki daerah tersebut habis dikonsumsi oleh daerah tersebut (Arsyad,2010:392). Bisa juga

dikatakan bahwa sektor tersebut hanya cukup untuk memnuhi kebutuhan yang diperlukan Kabupaten Tulungagung.

Dapat disimpulkan bahwa, apabila nilai LQ > 1, berarti sektor tersebut merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Tulungagung. Sebaliknya, apabila nilai LQ < 1, maka sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Tulungagung. Analisis LQ akan lebih menarik apabila dilakukan dalam bentuk *time-series/trend,* artinya dianalisis untuk beberapa kurun waktu tertentu. Seperti halnya dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam analisis *Location Quotient* (LQ) ini adalah data PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012. Perkembangan LQ bisa dilihat untuk suatu sektor tertentu pada kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan.

2. Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja dan produktivitas sektor ekonomi suatu wilayah (kabupaten/kota) dengan membandingkan pada wilayah yang lebih besar (provinsi). Maka, dengan menggunakan analisis *shift share* dapat diketahui perubahan dan pergeseran struktur ekonomi pada suatu daerah (kabupaten/kota), yang dibandingkan dengan daerah tingkat diatasnya (provinsi) selama periode pengamatan tertentu (Arsyad, 2010:389).

> Analisis *shift-share* juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan sedangkan metode

shift-share memperjelas penyebab perubahan atas beberapa variabel (Tarigan, 2012:85-86).

Dengan teknik analisis *shift share* ini, selain dapat mengamati penyimpangan dari berbagai perbandingan kinerja perekonomian antar wilayah, maka keunggulan kompetitif *(competitive advantage)* suatu wilayah juga dapat diketahui.

Menurut Soepono dalam Riadi (2008 : 35) menyatakan metode analisis *shift share* diawali dengan mengukur perubahan nilai tambah bruto atau PDRB suatu sektor *i* di suatu region *j* (D_{ij}) dengan formulasi sebagai berikut :

$$\mathbf{D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}}$$

Keterangan :

D_{ij} = Perubahan PDRB sektor *i* di Kabupaten Tulungagung

N_{ij} = Perubahan PDRB sektor *i* di Kabupaten Tulungagung yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

M_{ij} = Perubahan PDRB sektor *i* di Kabupaten Tulungagung yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor *i* Provinsi Jawa Timur

C_{ij} = Perubahan PDRB sektor di Kabupaten Tulungagung yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor tersebut di Kabupaten Tulungagung

Dimana :

$$\mathbf{N_{ij} = E_{ij}*(r_n-1)}$$

$$\mathbf{M_{ij} = E_{ij}*(r_{in} - r_n)}$$

$$\mathbf{C_{ij} = E_{ij}*(r_{ij} - r_{in})}$$

Diketahui bahwa dari persamaan tersebut, $\mathbf{r_{ij}}$ mewakili pertumbuhan sektor *i* di Kabupaten Tulungagung, sedangkan $\mathbf{r_n}$ dan $\mathbf{r_{in}}$ masing-masing laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur dan sektor *i* Provinsi Jawa Timur, yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

$$\mathbf{r_{ij} = E_{ij,t} / E_{ij}}$$

$$\mathbf{r_{in} = E_{in,t} / E_{in}}$$

$$\mathbf{r_n = E_{n,t} / E_n}$$

Keterangan :

r_{ij} = Laju pertumbuhan sektor *i* di Kabupaten Tulungagung

r_n = Jumlah laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur

r_{in} = Laju pertumbuhan sektor i Provinsi Jawa Timur

E_{ij} = PDRB sektor *i* di Kabupaten Tulungagung pada tahun awal analisis

E_{in} = PDRB sektor *i* di Provinsi Jawa Timur pada tahun awal analisis

E_n = total PDRB di Provinsi Jawa Timur pada tahun awal analisis

$E_{ij,t}$ = PDRB sektor *i* di Kabupaten Tulungagung pada tahun akhir analisis

$E_{in,t}$ = PDRB sektor *i* di Provinsi Jawa Timur pada tahun akhir analisis

$E_{n,t}$ = total PDRB di Provinsi Jawa Timur pada tahun akhir analisis

Dalam analisis *shift-share,* pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen :

a) *National Share* (N_{ij}), adalah banyaknya pertambahan PDRB suatu daerah (kabupaten) seandainya pertambahannya sama dengan pertambahan PDRB provinsi selama periode waktu tertentu. Hal ini dapat digunakan sebagai kriteria lanjutan bagi daerah Kabupaten Tulungagung untuk mengukur

apakah daerah Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata (Tarigan, 2012:86). Hasil perhitungan *National Share* dapat menggambarkan peranan wilayah provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu daerah (kabupaten). Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi maka peranannya terhadap provinsi tetap.

b) *Proportional Shift* (PS / M_{ij}), adalah pergeseran yang diamati tergantung pada perbedaan antara laju pertumbuhan (total sektor) dengan laju pertumbuhan dari masing-masing sektor *i* di tingkat provinsi (Rustiadi dan Saefulhakim, dkk , 2011:182). Kemudian menurut Tarigan (2012:86) mengemukakan bahwa komponen yang menunjukan tingkat pertumbuhan sektor di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil perhitungan *Proportional Shift* akan diketahui jika :

1) *Proportional Shift* (PS / M_{ij}) bernilai positif (+), maka sektor *i* tumbuh lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di tingkat Provinsi Jawa Timur.
2) *Proportional Shift* (PS / M_{ij}) bernilai negatif (-), maka sektor *i* tumbuh lebih cepat di tingkat Provinsi Jawa Timur dibandingkan di Kabupaten Tulungagung. Atau dapat dikatakan sektor *i* tumbuh lebih lambat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan di Provinsi Jawa Timur.

c) *Competitive Position* atau *Differential Shift* (DS / C_{ij}), adalah pergeseran yang diamati tergantung pada perbedaan antara laju pertumbuhan sektor di wilayah yang bersangkutan dengan laju pertumbuhan sektor *i* di tingkat nasional (Rustiadi dan Saefulhakim, dkk,2011:182). Menurut Arsyad (2010:390) bahwa *"Differential Shift* untuk menentukan seberapa jauh daya saing sektor ekonomi daerah (kabupaten) dengan perekonomian yang dijadikan sebagai daerah referensi (provinsi)." Komponen ini dapat menunjukan tingkat kompetisi satu sektor di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dari hasil perhitungan *Differential Shift* akan diketahui jika :

1) *Differential Shift* (DS / C_{ij}) bernilai positif (+), maka sektor *i* lebih kompetitif di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur.
2) *Differential Shift* (DS / C_{ij}) bernilai negatif (-), maka sektor *i* lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan di Kabupaten Tulungagung.

Dalam suatu wilayah, *national share*, *proportional shift* (PS) dan *differential shift* (DS) dapat ditentukan bagi suatu sektor *i* atau dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah. Adapun persamaan *shift share* untuk sektor *i* di wilayah *j* adalah :

$$\mathbf{Dij = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}}$$

atau

$$\mathbf{D_{ij} = E_{ij} \cdot r_n + E_{ij}\,(r_{in} - r_n) + E_{ij}\,(r_{ij} - r_{in})}$$

Komponen PS dan DS memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. PS merupakan akibat pengaruh unsur-unsur eksternal yang bekerja secara nasional (provinsi), sedangkan DS adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan (Glasson,1977 dalam Fachrurrazy,2002:52). Sektor-sektor di Kabupaten Tulungagung yang memiliki DS positif, memiliki keunggulan terhadap sektor yang sama pada kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, sektor-sektor yang memiliki nilai DS positif berarti sektor tersebut terkonsentrasi di Kabupaten Tulungagung dan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Apabila DS negatif, maka tingkat pertumbuhan sektor tersebut relatif lamban.

Dari kedua komponen tersebut (PS dan DS) dapat dinyatakan dalam suatu kuadran yang akan diperoleh empat kategori posisi relatif dari seluruh sektor ekonomi tersebut. Keempat kategori dapat digambarkan pada kuadran berikut ini :

Gambar 4. Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS
Sumber :Freddy (2001) dalam Riadi (2008:38)

Keterangan :

a) Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah sektor dengan pertumbuhan sangat cepat dan dijadikan sebagai sektor unggulan yang mampu bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain.

b) Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang terhambat atau sektor yang bukan unggulan namun produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan daerah lain atau dengan kata lain dapat dikembangkan.

c) Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan cepat tetapi tidak kompetitif. Dengan kata lain, sektor unggulan tetapi produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan daerah lain

d) Kategori IV (PS negatif dan DS negatif) adalah sektor dengan pertumbuhan yang lambat dan juga memiliki daya saing lemah atau tidak kompetitif sehingga sektor tersebut relatif tertinggal, karena merupakan sektor yang bukan unggulan dan tidak mampu bersaing dengan daerah lain.

3. Analisis *Tipologi Klassen*

Analisis *Tipologi Klassen* dapat mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan berdasarkan sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Analisis *Tipologi Klassen* juga dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah Kabupaten Tulungagung. Tujuan dari analisis *Tipologi Klassen* ini adalah mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kabupaten Tulungagung dengan memperhatikan sektor perekonomian Provinsi

Jawa Timur sebagai daerah referensi (Fachrurrazy, 2009:45). Dapat dikatakan bahwa analisis *Tipologi Klassen* ini dilakukan dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung dengan dibandingkan terhadap pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi yang sama pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2. Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen

Kuadran I Sektor maju dan tumbuh dengan pesat *(developed sector)* Si > S dan Ski > Sk	**Kuadran II** Sektor maju tapi tertekan *(stagnant sector)* Si < S dan Ski > Sk
Kuadran III sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat *(developing sector)* Si > S dan Ski < Sk	**Kuadran IV** sektor relatif tertinggal *(underdeveloped sector)* Si < S dan Ski < Sk

Sumber : Sjafrizal dalam Fachrurrazy (2009:45-47)

Menurut Sjafrizal dalam Fachrurrazy (2009:45-47) analisis *Tipologi Klassen* menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut :

a) Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat *(developed sektor)* (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan PDRB sektoral Kabupaten Tulungagung (s_i) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan PDRB sektoral Provinsi Jawa Timur (s) dan memiliki nilai kontribusi PDRB sektoral Kabupaten Tulungagung (sk_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi PDRB sektoral Provinsi Jawa Timur (sk).
b) Sektor maju tapi tertekan *(stagnant sector)* (Kuadran II). Kuadran ini merupakan laju pertumbuhan PDRB sektoral Kabupaten Tulungagung (s_i) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan PDRB sektoral Provinsi Jawa Timur (s), tetapi memiliki kontribusi PDRB sektoral Kabupaten Tulungagung (sk_i) yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PDRB sektoral Provinsi Jawa Timur (sk).
c) Sektor potensial atau masih dapat berkembang *(developing sector)* (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan PDRB sektoral Kabupaten Tulungagung (s_i) yang lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB sektoral Provinsi Jawa Timur (s), tetapi memiiki nilai kontribusi PDRB sektoral Kabupaten

Tulungagung (sk_i) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi PDRB sektoral Provinsi Jawa Timur (sk).

d) Sektor relatif tertinggal *(underdeveloped sector)* (Kuadran IV). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan PDRB sektoral Kabupaten Tulungagung (s_i) yang lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB sektoral Provinsi Jawa Timur (s) dan sekaligus memiliki nilai kontribusi PDRB sektoral Kabupaten Tulungagung (sk_i) yang lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi PDRB sektoral Provinsi Jawa Timur (sk).

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Adapun beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini, memiliki konsep dan definisi sebagai berikut :

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian (unit-unit produksi) di suatu daerah selama kurung waktu tertentu (biasanya satu tahun).

b) Sektor ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang terdapat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang meliputi 9 sektor utama. Sektor ekonomi yaitu sektor-sektor pembentuk angka PDRB yang berperan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Adapun sektor-sektor tersebut, antara lain : 1) pertanian, 2) pertambangan dan penggalian, 3) industri pengolahan, 4) listrik, gas, dan air bersih, 5) konstruksi, 6) perdagangan, hotel, dan restoran, 7) pengangkutan dan komunikasi, 8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 9) jasa-jasa.

c) Sektor unggulan merupakan sektor yang memiliki peranan relatif besar dibanding sektor lainnya terhadap PDRB.

d) Pergeseran sektor ekonomi yang merupakan perubahan kinerja sektor ekonomi yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi provinsi, pertumbuhan sektor tertentu, atau disebabkan oleh daya saing lokal.

e) Pola dan struktur pertumbuhan berdasarkan sektor ekonomi menunjukan posisi sektor perekonomian daerah dengan memperhatikan sektor perekonomian provinsi. Biasanya untuk melihat pola dan struktur pertumbuhan ekonomi sektoral digunakan klasifikasi dari *tipologi klassen.*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

1. Kondisi Geografis Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat (111º43'- 112º07') Bujur Timur dan (7º51' - 8º18') Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan adalah 1.055,65 Km^2. Secara administratif Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 (sembilan belas) kecamatan, 257 (dua ratus lima puluh tujuh) desa, serta 14 (empat belas) kelurahan. Kabupaten Tulungagung juga termasuk dalam lingkup Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dan sekitarnya berdasarkan RTRW Propinsi Jawa Timur dengan sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan sebagai kegiatan andalan dan faktor pendorong bagi pembangunan Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dan sekitarnya (RTRW Kab. Tulungagung, 2012: I-15 – I-16). Sementara, batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Tulungagung adalah :

a) Utara : Kabupaten Kediri
b) Timur : Kabupaten Blitar
c) Selatan : Samudera Indonesia
d) Barat : Kabupaten Trenggalek

Jarak antara Ibukota Kabupaten Tulungagung (Kecamatan Tulungagung) dengan Ibukota Propinsi Jawa Timur (Kota Surabaya) kurang lebih 154 Km ke

arah Barat Daya. Sementara jarak antara Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Tulungagung berkisar antara 0–36 km, dimana Kecamatan Pucanglaban merupakan daerah yang memiliki jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten (RTRW Kab. Tulungagung, 2012: I-16). Berikut adalah peta batas administrasi Kabupaten Tulungagung :

Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung
Sumber :RPJMD Kabupaten Tulungagung (2014:II-3)

Secara garis besar wilayah Kabupaten Tulungagung ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yakni :

a) Bagian Utara (Barat Daya) merupakan daerah pegunungan yang relatif subur, yang merupakan bagian tenggara dari pegunungan Wilis; mencakup areal seluas ± 25 %;

b) Bagian Selatan merupakan daerah pegunungan yang relatif tandus, namun kaya akan potensi hutan dan bahan tambang, yang merupakan bagian dari pegunungan kapur selatan Jawa Timur; mencakup areal seluas ± 40 %;

c) Bagian Tengah merupakan dataran rendah yang subur, yang dilalui oleh Sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung) beserta cabang-cabangnya; meliputi areal seluas ± 35 % (RPJMD Kab. Tulungagung, 2014: II-4-II-5)

2. Kondisi Demografis Kabupaten Tulungagung

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 1,07% dibanding akhir tahun 2011, yaitu 1.043.385 jiwa menjadi 1.048.472 jiwa di tahun 2012. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Penduduk Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012 meningkat sebesar 2,29% dari tahun 2008 (RPJMD Kab. Tulungagung, 2014: II-13). Dapat dilihat dalam tabel 4 dibawah ini:

Tabel 3 Pertumbuhan Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
2012	1.048.472	993
2011	1.043.385	988
2010	1.037.369	983
2009	1.030.926	977
2008	1.025.034	971

Sumber : RPJMD Kab. Tulungagung, 2014: II-13

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung 1.055,65 Km^2 dan kepadatan penduduk pada tahun 2012 sebesar 993 jiwa per kilometer persegi, hal ini berarti bahwa setiap satu kilometer persegi dihuni sekitar 993 orang. Kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Tulungagung, yaitu 5.069 orang per kilometer persegi, sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Tanggunggunung sebesar 217 orang per kilometer persegi. Kepadatan tahun 2012 meningkat sebesar 0,51% dari tahun 2011. Berikut ini rincian luas wilayah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012 :

Tabel 4. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/km^2)
1	Besuki	82,16	18.445	18.318	36.763	447
2	Bandung	41,96	24.826	23.596	48.422	1.154
3	Pakel	36,06	26.146	26.191	52.337	1.451
4	Campurdarat	39,56	28.054	27.416	55.470	1.402
5	Tanggunggunung	117,73	12.628	12.878	25.506	217
6	Kalidawir	97,81	34.798	34.873	69.671	712
7	Pucanglaban	82,94	12.967	13.647	26.614	321
8	Rejotangan	66,49	37.772	37.706	75.478	1.135
9	Ngunut	37,70	38.981	39.793	78.774	2.089
10	Sumbergempol	39,28	32.899	32.864	65.763	1.674
11	Boyolangu	38,44	38.121	37.405	75.526	1.965
12	Tulungagung	13,67	34.176	35.119	69.295	5.069
13	Kedungwaru	29,74	43.896	42.763	86.659	2.914

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/km^2)
14	Ngantru	37,03	27.912	27.313	55.225	1.491
15	Karangrejo	35,54	19.788	20.377	40.165	1.130
16	Kauman	30,84	25.654	26.458	52.112	1.690
17	Gondang	44,02	28.046	28.279	56.325	1.280
18	Pagerwojo	88,22	15.251	15.496	30.747	349
19	Sendang	96,46	23.428	2419. 2	47.620	494
Jumlah		**1.055,65**	**523.788**	**524.684**	**1.048.472**	**993**

Sumber : RPJMD Kab. Tulungagung, 2014

Jumlah penduduk pada tahun 2012 tersebut terbagi atas jumlah penduduk laki-laki sejumlah 523.788 jiwa atau sebesar 49,96% dan penduduk perempuan sejumlah 524.684 jiwa atau sebesar 50,04% dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 993 jiwa/km^2. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungwaru dengan jumlah 86.659 jiwa atau sebesar 8,26%, sedangkan Kecamatan Tanggunggunung merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebesar 25.506 jiwa atau 2,43% dari total jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung.

Jika dilihat berdasarkan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Tulungagung, maka dapat diketahui sebagai berikut :

a) Tenaga Kerja

Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 sebesar 11.895 jiwa, yang didominasi lulusan SMA sebesar 68,12%. Pencari kerja yang telah disalurkan menurut lapangan pekerjaan terbesar di sektor kegiatan lainnya yaitu sebesar 77,34%.

b) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012 ini sebesar 14.723 jiwa yang berarti menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 15.014 jiwa. Dari jumlah ini terbanyak ada di golongan IV sebesar 36,22%, kemudian golongan III sebesar 35,49%, golongan II sebesar 24,61% dan golongan I sebesar 3,68%.

c) Transmigrasi

Selama tahun 2012 penduduk Kabupaten Tulungagung yang diberangkatkan untuk transmigrasi umum sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) atau sebesar 120 jiwa, yang diberangkatkan pada bulan Desember.

B. Penyajian Data

1. Sektor-sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah atau regional. Data PDRB juga menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Data PDRB terbentuk dari beberapa sektor dan sub sektor yang terdiri sebagai berikut :

a) Sektor Pertanian

Sektor pertanian yang terdiri dari beberapa subsektor yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Berikut penjelasan secara singkat mengenai masing-masing subsektor tersebut, yaitu :

1) Tanaman Bahan Makanan

Subsektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman pangan lainnya dan hasil-hasil produk lainnya.

2) Tanaman Perkebunan

Subsektor ini terdiri dari tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar. Pada tanaman perkebunan rakyat mencakup komoditi dari hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti kelapa, kopi, kapuk, tebu, tembakau dan cengkeh. Sedangkan, tanaman perkebunan besar mencakup kegiatan yang memproduksi komoditi perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar seperti karet, teh, kopi, tebu, dan tanaman lainnya.

3) Peternakan

Subsektor ini meliputi produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak seperti susu, telur, kulit, dan hasil ternak lainnya.

4) Kehutanan

Subsektor kehutanan meliputi penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lainnya dan perburuan. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu gelondongan, kayu bakar, arang dan bambu. Sedangkan hasil kegiatan pengambilan hasil hutan lainnya berupa rotan, damar, nipah, dan sebagainya.

5) Perikanan

Komoditi yang dicakup adalah semua hasil dari kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, serta pengolahan sederhana (pengeringan dan penggaraman ikan). Dari masing-masing subsektor tersebut memberikan kontribusi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur yang disajikan dari tahun 2008-2012 sebagai berikut :

Tabel 5. Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Tanaman Bahan Makanan	847.393,29	868.205,27	882.704,30	897.622,00	925.818,10	884.348,59
Tanaman Perkebunan	149.309,51	151.862,70	152.743,51	153.675,24	154.551,19	152.428,43
Peternakan	253.727,21	272.680,63	287.787,14	305.428,49	323.693,11	288.663,32
Kehutanan	7.681,08	7.739,46	7.892,70	7.980,31	8.061,71	7.871,05
Perikanan	129.976,79	134.058,07	136.980,53	141.048,85	145.336,74	137.480,20
Total	**1.388.087,88**	**1.434.546,13**	**1.468.108,18**	**1.505.754,89**	**1.557.460,85**	**1.470.791,59**

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013

Tabel 6. Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Tanaman Bahan Makanan	26.778.734,92	27.776.011,76	28.231.662,67	28.774.273,14	29.602.961,48	28.232.728,79
Tanaman Perkebunan	6.860.314,18	7.171.086,42	7.237.133,25	7.456.131,01	7.632.728,73	7.271.478,72
Peternakan	8.038.041,84	8.365.702,81	8.647.808,86	9.009.563,08	9.341.723,33	8.680.567,98
Kehutanan	647.780,70	639.151,59	728.382,30	772.918,65	975.927,50	752.832,15
Perikanan	5.990.240,04	6.256.944,13	6.484.561,75	6.615.547,26	6.910.601,73	6.451.578,98
Total	**48.315.111,68**	**50.208.896,71**	**51.329.548,83**	**52.628.433,14**	**54.463.942,77**	**51.389.186,63**

Sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2013

Berdasarkan pada tabel 5 dan 6 dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 5 tahun (2008-2012) memberikan kontribusi yang baik dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 di Kabupaten Tulungagung

memberikan kontribusi sebesar Rp1.388.087,88 hingga tahun 2012 sebesar Rp1.557.460,85. Selanjutnya di Provinsi Jawa Timur juga mengalami hal yang sama dimana pada tahun 2008 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar Rp48.315.111,68 hingga mengalami kenaikan dan pada tahun 2012 sebesar Rp54.463.942,77. Begitu juga pada subsektor yang ada pada sektor pertanian baik di Kabupaten Tulungagung maupun di Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat bahwa subsektor tanaman bahan makanan yang paling tinggi memberikan kontribusi dibandingkan dengan subsekor lainnya. Sedangkan subsektor yang paling rendah memberikan kontribusi yaitu subsektor kehutanan.

b) Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor ini terdiri dari subsektor pertambangan dan subsektor penggalian. Pada subsektor pertambangan mencakup komoditi minyak, gas bumi, dan batu bara. Namun pada subsektor pertambangan ini di Kabupaten Tulungagung tidak tersedia sehingga pada subsektor pertambangan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung tidak muncul nilainya. Sedangkan, pada subsektor penggalian yang mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu kapur, pasir, dan lain-lain. Komoditi dan kegiatan tersebut yang memberikan kontribusi pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Tulungagung maupun Provinsi Jawa Timur. Maka berikut disajikan jumlah PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur, yaitu :

Tabel 7. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Pertambangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pertambangan Non Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggalian	132.688,30	139.291,46	146.019,23	152.940,54	158.476,99	145.883,30
Total	**132.688,30**	**139.291,46**	**146.019,23**	**152.940,54**	**158.476,99**	**145.883,30**

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013

Tabel 8. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Pertambangan Migas	1.067.860,48	1.329.806,66	1.667.050,50	1.831.926,85	1.777.596,11	1.534.848,12
Pertambangan Non Migas	574.036,18	608.409,32	673.233,66	724.182,21	757.320,78	667.436,43
Penggalian	5.003.193,04	5.166.600,83	5.417.035,66	5.672.523,42	5.866.345,97	5.425.139,78
Total	**6.645.089,70**	**7.104.816,81**	**7.757.319,82**	**8.228.632,48**	**8.401.262,86**	**7.627.424,33**

Sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2013

Tabel 7 dan 8 menggambarkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur. Pada tabel 7 terlihat bahwa pada subsektor pertambangan di Kabupaten Tulungagung tidak tersedia, sehingga nilainya tidak muncul. Sedangkan pada subsektor penggalian di Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp132.688,30 kemudian pada tahun 2012 sebesar Rp158.476,99 dengan rata-rata dari tahun 2008-2012 sebesar Rp145.883,30. Sedangkan, pada tabel 8 dapat dilihat bahwa untuk Provinsi Jawa Timur subsektor pertambangan baik migas maupun non migas memberikan kontribusi yang baik, dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan. Walaupun pada subsektor pertambangan migas mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp1.777.596,11 yang sebelumnya pada tahun 2011 sebesar Rp1.831.926,85. Sementara untuk subsektor penggalian juga mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan rata-rata sebesar Rp5.425.139,78.

Secara keseluruhan sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi yang baik dimana dapat dilihat bahwa setiap tahunnya dari tahun 2008-2012 mengalami kenaikan, pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar Rp6.645.089,70 dan tahun 2012 sebesar Rp8.401.262,86 dengan rata-rata secara keseluruhan dari tahun 2008-2012 sebesar Rp 7.627.424,33.

c) Sektor Industri Pengolahan

Sektor ini terdiri dari sub sektor industri besar / sedang dan subsektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Sektor industri pengolahan dirinci menurut KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia), rincian subsektor dalam industri pengolahan yang terdiri dari 9 (sembilan) subsektor memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) baik di Kabupaten Tulungagung maupun Provinsi Jawa Timur. Maka berikut ini jumlah kontribusi PDRB ADHK sektor industri pengolahan di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur, yaitu :

Tabel 9. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Makanan, Minuman dan Tembakau	441.460,01	481.632,87	522.667,99	569.028,64	619.729,09	526.903,72
Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	416.593,64	427.550,06	447.131,85	469.877,33	495.626,61	451.355,90
Barang Kayu & Hasil Hutan lainnya	114.554,68	121.130,12	127.574,24	134.476,01	141.105,67	127.768,14
Kertas dan Barang Cetakan	103.670,21	111.352,17	120.137,86	129.977,15	139.777,42	120.982,96
Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	18.914,56	20.109,96	21.310,52	22.433,59	23.761,65	21.306,06
Semen dan Barang Galian Non Logam	117.636,59	122.789,08	128.842,58	135.838,73	143.663,04	129.754,00
Logam Dasar, Besi dan Baja	3.595,11	3.801,47	4.003,71	4.220,31	4.461,71	4.016,46
Alat Angkutan, Mesin & Peralatan	10.666,01	11.488,36	12.215,52	12.961,89	13.239,27	12.114,21
Barang Lainnya	760,80	815,20	870,79	925,83	935,92	861,71
Total	**1.227.851,61**	**1.300.669,29**	**1.384.755,06**	**1.479.739,48**	**1.582.300,38**	**1.395.063,16**

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013

Tabel 10. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Makanan, Minuman dan Tembakau	43.935.696,99	45.170.406,97	47.175.579,65	50.128.722,79	53.809.756,53	48.044.032,59
Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	2.669.569,64	2.564.655,55	2.685.264,58	2.776.688,62	2.823.991,38	2.704.033,95
Barang Kayu & Hasil Hutan lainnya	1.911.590,06	1.845.640,20	1.799.319,90	1.965.794,68	2.015.165,51	1.907.502,07
Kertas dan Barang Cetakan	13.901.417,86	14.666.540,74	15.420.432,38	16.083.768,72	16.749.735,74	15.364.379,09
Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	7.852.082,55	8.110.967,24	8.344.844,63	9.020.876,59	9.918.950,24	8.649.544,25
Semen dan Barang Galian Non Logam	2.713.685,41	2.721.494,91	2.741.959,47	3.137.569,11	3.208.264,78	2.904.594,74
Logam Dasar, Besi dan Baja	3.201.603,53	3.227.875,82	3.441.989,12	3.636.459,99	3.962.094,37	3.494.004,57
Alat Angkutan, Mesin & Peralatan	2.830.690,35	2.912.599,55	3.025.131,23	3.106.283,51	3.190.012,34	3.012.943,40
Barang Lainnya	2.017.544,19	2.079.712,41	2.266.258,17	2.315.027,45	2.339.085,58	2.203.525,56
Total	**81.033.880,58**	**83.299.893,42**	**86.900.779,13**	**92.171.191,46**	**98.017.056,47**	**88.284.560,21**

Sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2013

Pada Tabel 9 dan 10 menggambarkan kontribusi sektor industri pengolahan yang terdiri pada 9 (sembilan) subsektor di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel 9 disebutkan rincian 9 (sembilan) subsektor yang membentuk sektor industri pengolahan dan memberikan nilai kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Kabupaten Tulungagung yang cukup baik. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2008 sebesar Rp1.227.851,61 hingga pada tahun 2012 sebesar Rp 1.582.300,38 dengan rata-rata sebesar 1.395.063,16. Adapun subsektor yang memberikan kontribusi paling tinggi adalah subsektor makanan, minuman dan tembakau dengan rata-rata selama 5 tahun dari tahun 2008-2012 sebesar Rp526.903,72. Sedangkan, subsektor yang paling rendah memberikan kontribusi adalah subsektor barang lainnya dengan rata-rata sebesar Rp861,71.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Timur sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHK dari tahun 2008 sampai 2012 yang

cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 10 bahwa nilai kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2008 sebesar Rp 81.033.880,58 hingga pada tahun 2012 mencapai Rp 98.017.056,47 dengan rata-rata sebesar Rp 88.284.560,21. Adapun subsektor yang memberikan kontribusi paling tinggi adalah subsektor makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan subsektor yang memberikan kontribusi paling rendah adalah subsektor barang kayu dan hasil hutan lainnya.

d) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Subsektor listrik, mencakup kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik yang diselenggarakan baik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN) ataupun non PLN. Data produksi dan rata-rata tarif listrik PLN diperoleh dari PT. PLN cabang Tulungagung, sedangkan data output, biaya antara dan nilai tambah bruto listrik non PLN diperoleh dari hasil data sekunder dari masing-masing kecamatan di Tulungagung. Sementara **subsektor air bersih**, mencakup air bersih yang diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Data produksi dan harga diperoleh dari PDAM yaitu dari hasil survei perusahaan air minum yang dilaksanakan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sektor listrik, gas, dan air bersih ini memberikan kontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di wilayah Kabupaten Tulungagung maupun Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, berikut ini kontribusi sektor listrik, gas, dan air bersih di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2008-2012 :

Tabel 11. Kontribusi Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Listrik	91.101,03	95.364,56	100.733,58	106.807,82	113.376,50	101.476,70
Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Air Bersih	2.132,66	2.237,37	2.356,18	2.488,83	2.631,69	2.369,35
Total	**93.233,69**	**97.601,93**	**103.089,76**	**109.296,65**	**116.008,19**	**103.846,04**

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013

Tabel 12. Kontribusi Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Listrik	2.978.969,33	3.016.504,77	3.239.899,26	3.569.246,08	3.869.377,14	3.334.799,32
Gas	1.012.125,23	1.079.881,98	1.119.912,20	1.048.365,99	1.037.149,12	1.059.486,90
Air Bersih	255.052,06	265.129,05	282.270,36	314.472,29	331.905,43	289.765,84
Total	**4.246.146,62**	**4.361.515,80**	**4.642.081,82**	**4.932.084,36**	**5.238.431,69**	**4.684.052,06**

Sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2013

Pada tabel 11 dan 12 menunjukan nilai kontribusi sektor listrik, gas, dan air bersih di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa timur selama 5 tahun (2008-2012) yang dilihat dari masing-masing subsektor. Pada tabel 11 terlihat bahwa subsektor listrik baik yang diselenggarakan oleh PT. PLN ataupun non PLN yang paling besar memberikan kontribusi dengan jumlah rata-rata Rp 101.476,70 kemudian diikuti dengan subsektor air bersih yaitu sebesar Rp 2.369,35. Namun untuk subsektor gas di Kabupaten tulungagung tidak memberikan kontribusi sehingga nilai kontribusi terhadap PDRB tidak muncul. Kemudian di Provinsi Jawa Timur berdasarkan pada tabel 12 subsektor yang memiliki kontribusi paling besar di sektor listrik, gas, dan air bersih adalah subsektor listrik dengan jumlah rata-rata Rp 3.334.799,32 lebih besar jika dibandingkan dengan subsektor gas yang memberikan kontribusi dengan jumlah rata-rata Rp1.059.486,90. Selain itu, subsektor yang memiliki kontribusi paling sedikit adalah subsektor air bersih dengan jumlah rata-rata Rp 289.765,84. Jika

dilihat secara keseluruhan selama 5 tahun (2008-2012) sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan jumlah rata-rata di Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 103.846,04 dan di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 4.684.052,06.

e) Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan, jembatan, irigasi, jaringan listrik, air bersih, telepon, dan sebagainya. Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang juga termasuk dalam sektor ekonomi pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung maupun Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, kontribusi sektor konstruksi dalam PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2008-2012 sebesar berikut ini :

Tabel 13. Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Konstruksi	121.592,24	126.893,66	133.289,10	142.512,71	151.989,80	135.255,50
Total	**121.592,24**	**126.893,66**	**133.289,10**	**142.512,71**	**151.989,80**	**135.255,50**

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013

Tabel 14. Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Konstruksi	9.887.403,83	10.307.883,76	10.992.599,76	11.994.825,72	12.840.565,41	11.204.655,70
Total	**9.887.403,83**	**10.307.883,76**	**10.992.599,76**	**11.994.825,72**	**12.840.565,41**	**11.204.655,70**

Sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2013

Berdasarkan pada tabel 13 dan 14 menunjukan kontribusi sektor kontruksi selama 5 tahun (2008-2012). Dapat dilihat bahwa selama 5 tahun tersebut sektor konstruksi memiliki nilai kontribusi yang terus mengalami kenaikan setiap

tahunnya dan dapat dikatakan mengalami kenaikan yang cukup stabil. Kontribusi sektor konstruksi dalam PDRB di Kabupaten Tulungagung memiliki jumlah rata-rata sebesar Rp 135.255,50 dan di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 11.204.655,70.

f) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Pembangunan sektor perdagangan sangatlah penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan sumbangan yang cukup terarah dalam penciptaan lapangan usaha serta peningkatan pendapatan. Berdasarkan bentuk usaha, sektor perdagangan di Kabupaten Tulungagung adalah perorangan, CV, dan PT. Sedangkan berdasarkan golongan usaha dibedakan menjadi perdagangan besar, menengah, dan kecil.

Adapun pada **subsektor perdagangan**, perhitungan nilai tambah subsektor perdagangan dilakukan dengan pendekatan arus barang *(commodity flow),* yaitu dengan menghitung besarnya nilai komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta komoditi impor yang diperdagangkan. **Subsektor Hotel,** subsektor ini mencakup kegiatan ekonomi pada hotel-hotel berbintang, tidak berbintang serta jenis penginapan lainnya. **Subsektor Restoran,** yaitu data jumlah restoran, depot, rumah makan, warung dan sebagainya diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung. Oleh sebab itu, berikut ini data sektor perdagangan, hotel, dan restoran di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2012 :

Tabel 15. Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Perdagangan	1.922.028,01	2.066.399,65	2.256.095,13	2.469.070,51	2.708.817,26	2.284.482,11
Hotel	8.233,71	8.578,70	9.120,88	9.796,73	10.535,41	9.253,09
Restoran	185.502,42	204.794,67	224.069,95	245.244,56	268.003,25	225.522,97
Total	**2.115.764,14**	**2.279.773,02**	**2.489.285,96**	**2.724.111,80**	**2.987.355,92**	**2.519.258,17**

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013

Tabel 16. Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Perdagangan	74.426.340,67	78.452.805,70	86.937.627,10	95.198.460,50	105.151.262,62	88.033.299,32
Hotel	2.548.246,54	2.712.067,25	3.066.903,32	3.345.093,50	3.589.853,75	3.052.432,87
Restoran	13.936.795,02	14.818.994,15	16.224.582,56	18.101.660,35	19.634.382,24	16.543.282,86
Total	**90.911.382,23**	**95.983.867,10**	**106.229.112,98**	**116.645.214,35**	**128.375.498,61**	**107.629.015,05**

Sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2013

Tabel 15 dan 16 menggambarkan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur. Di Kabupaten Tulungagung berdasarkan tabel 15 menunjukkan bahwa kontribusi terbesar ada pada subsektor perdagangan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup stabil dan memiliki nilai kontribusi dalam PDRB ADHK jumlah rata-rata Rp 2.284.482,11. Kemudian disusul dengan subsektor restoran yang memiliki kontribusi rata-rata sebesar Rp 225.522,97 dan yang paling sedikit memberikan kontribusi untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah subsektor hotel yaitu dengan jumlah rata-rata Rp 9.253,09.

Pada Provinsi Jawa Timur juga mengalami hal yang sama, dimana subsektor yang paling banyak memberikan kontribusi dalam PDRB ADHK dengan jumlah rata-rata selama 5 tahun (2008-2012) adalah pertama, subsektor perdagangan (Rp 88.033.299,32); kedua, subsektor restoran (Rp 16.543.282,86); dan ketiga, subsektor hotel (Rp 3.052.432,87). Masing-masing subsektor tersebut

juga mengalami kenaikan yang cukup stabil disetiap tahunnya. Secara keseluruhan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran baik di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi yang baik dan stabil dalam PDRB ADHK dengan jumlah rata-rata adalah Rp 2.519.258,17 dan di Provinsi Jawa Timur Rp 107.629.015,05.

g) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi terdiri dari subsektor pengangkutan dan subsektor komunikasi. Pada **subsektor pengangkutan** yang termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan angkutan kereta api, angkutan jalan raya baik bermotor maupun tidak bermotor seperti bis, truk, ojek, dokar, becak, dan sebagainya. Adapun kegiatan pengangkutan lainnya yang berupa angkutan laut seperti kapal laut, angkutan penyebrangan yang melewati sungai dan danau, dan angkutan udara seperti pesawat. Serta jasa penunjang angkutan yang meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan pengangkutan seperti terminal, parkir, keagenan barang dan penumapang, ekspedisi, pergudangan, dan jasa penunjang angkutan lainnya.

Pada subsektor komunikasi yang meliputi kegiatan pos dan giro dengan cara pemberian jasa pos dan giro seperti pengiriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan dan sebagainya. Selain itu, kegiatan lainnya yaitu telekomunikasi dimana kegiatan tersebut mencakup pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan telepon dan telegrap. Serta kegiatan berupa jasa penunjang komunikasi yang mencakup pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang

kegiatan komunikasi seperti wartel, telepon seluler, warnet. Berikut ini data sektor pengangkutan dan komunikasi di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2012 :

Tabel 17. Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
a. Pengangkutan	**207.036,30**	**219.159,63**	**235.060,26**	**252.582,00**	**269.685,62**	**236.704,76**
1. Angkutan Rel	2.954,71	3.306,61	3.705,39	4.030,72	4.340,28	3.667,54
2. Angkutan Jalan Raya	140.220,61	146.474,45	154.398,72	163.122,25	172.876,96	155.418,60
3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Angkutan Sungai, Danau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Jasa Penunjang Angkutan	63.860,98	69.378,57	76.956,16	85.429,03	92.468,38	77.618,62
b. Komunikasi	**117.178,82**	**140.028,69**	**166.032,02**	**192.115,65**	**211.557,75**	**165.382,59**
Total	**324.215,12**	**359.188,32**	**401.092,28**	**444.697,65**	**481.243,37**	**402.087,35**

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013

Tabel 18. Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
a. Pengangkutan	**11.123.271,22**	**11.911.782,55**	**12.788.434,52**	**13.856.861,63**	**14.959.763,82**	**12.928.022,75**
1. Angkutan Rel	137.567,55	145.838,88	166.740,15	183.182,51	175.240,83	161.713,98
2. Angkutan Jalan Raya	3.821.159,02	3.935.179,01	4.098.356,76	4.281.086,08	4.595.499,74	4.146.256,12
3. Angkutan Laut	850.227,89	882.984,19	890.729,74	965.379,13	1.033.556,67	924.575,52
4. Angkutan Sungai, Danau	139.361,41	87.233,68	54.926,11	57.265,57	55.844,61	78.926,28
5. Angkutan Udara	1.970.149,81	2.394.426,54	2.707.994,91	3.102.366,08	3.459.203,39	2.726.828,15
6. Jasa Penunjang Angkutan	4.204.805,53	4.466.120,24	4.869.686,86	5.267.582,26	5.640.418,57	4.889.722,69
b. Komunikasi	**9.040.792,74**	**10.869.745,12**	**12.287.990,40**	**14.088.394,50**	**15.681.149,51**	**12.393.614,45**
Total	**20.164.063,96**	**22.781.527,67**	**25.076.424,92**	**27.945.256,13**	**30.640.913,33**	**25.321.637,20**

Sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2013

Berdasarkan pada tabel 17 dan 18 yang menggambarkan kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur dilihat dari masing-masing subsektor. Di Kabupaten Tulungagung berdasarkan tabel 17 dapat dilihat subsektor yang memiliki kontribusi paling tinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi adalah subsektor pengangkutan yakni memberi kontribusi rata-rata Rp 236.704,76 sedangkan subsektor komunikasi hanya memberi kontribusi rata-rata sebesar Rp 165.382,59. Namun pada subsektor pengangkutan ini meliputi kegiatan berupa angkutan rel, angkutan

jalan raya, dan jasa penunjang angkutan. Sedangkan untuk kegiatan lainnya seperti angkutan laut, angkutan penyebrangan, dan angkutan udara tidak ada di Kabupaten Tulungagung sehingga tidak menghasilkan nilai kontribusi dalam PDRB ADHK. Pada Provinsi Jawa Timur berdasarkan pada tabel 18, subsektor yang memberikan kontribusi paling tinggi yaitu subsektor pengangkutan dengan jumlah rata-rata Rp 12.928.022,75. Namun untuk subsektor komunikasi juga tidak jauh berbeda memberikan kontribusinya yaitu dengan rata-rata sebesar Rp12.393.614,45. Secara keseluruhan tren perkembangan sektor pengangkutan dan komunikasi di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan cukup stabil setiap tahunnya.

h) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor ini meliputi subsektor bank, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan dan jasa perusahaan. Pada subsektor lembaga keuangan bukan bank yang mencakup kegiatan asuransi, koperasi, yayasan dan pegadaian. Sedangkan, subsektor sewa bangunan mencakup semua kegiatan jasa atas penggunaan rumah bangunan sebagai tempat tinggal rumahtangga dan bukan sebagai tempat tinggal, tanpa memperhatikan apakah bangunan tersebut milik sendiri atau disewa. Serta, pada subsektor jasa perusahaan yang meliputi jasa pengacara, jasa akuntan, biro arsitektur, jasa pengolahan data, jasa periklanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, berikut ini data kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur :

Tabel 19. Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Bank	40.312,01	43.936,05	47.688,19	51.796,05	56.426,62	48.031,78
Lembaga Keuangan Bukan Bank	96.653,01	107.178,52	117.392,63	128.908,85	141.657,93	118.358,19
Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sewa Bangunan	478.941,07	495.560,33	518.019,62	544.179,61	579.279,19	523.195,96
Jasa Perusahaan	137.950,92	147.924,77	157.525,09	166.157,46	174.531,80	156.818,01
Total	**753.857,01**	**794.599,67**	**840.625,53**	**891.041,97**	**951.895,54**	**846.403,94**

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013

Tabel 20. Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
Bank	4.095.009,15	4.348.490,22	4.699.990,97	5.153.252,96	5.689.640,29	4.797.276,72
Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.984.496,18	2.124.998,52	2.405.942,47	2.751.977,74	3.049.074,05	2.463.297,79
Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sewa Bangunan	6.176.965,75	6.500.638,75	6.930.927,88	7.523.531,42	8.173.806,71	7.061.174,10
Jasa Perusahaan	4.262.675,33	4.421.266,05	4.622.628,84	4.757.347,08	4.889.947,40	4.590.772,94
Total	**16.519.146,41**	**17.395.393,54**	**18.659.490,16**	**20.186.109,20**	**21.802.468,45**	**18.912.521,55**

Sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2013

Di Kabupaten Tulungagung berdasarkan pada tabel 19 diketahui bahwa subsektor yang memberikan kontribusi paling besar di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan adalah subsektor sewa bangunan, yakni memberi kontribusi rata-rata sebesar Rp 523.195,96 dan subsektor yang paling sedikit memberi kontribusi adalah subsektor bank, yakni memberi kontribusi rata-rata sebesar Rp 48.031,78. Pada tabel 20 menunjukkan di Provinsi Jawa Timur, subsektor yang memberikan kontribusi tertinggi adalah subsektor sewa bangunan yakni sebesar Rp 7.061.174,10 dan yang paling sedikit memberikan kontribusi adalah subsektor lembaga keuangan bukan bank yakni sebesar Rp 2.463.297,79. Diantara Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur untuk subsektor jasa penunjang keuangan tidak memberikan nilai kontribusi dalam PDRB ADHK. Secara keseluruhan, rata-rata perkembangan sektor keuangan, persewaan, dan jasa

perusahaan di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur masing-masing cukup stabil dimana tetap mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan.

i) Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa yang meliputi subsektor jasa pemerintahan umum dan subsektor jasa swasta.

1) **Subsektor Jasa Pemerintahan Umum,**

Nilai tambah bruto subsektor jasa pemerintahan umum terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah. Upah dan gaji yang dihitung mencakup upah dan gaji dari belanja rutin dan sebagian dari belanja pembangunan.

2) **Subsektor Jasa Swasta, yang terdiri dari :**

a. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan, subsektor ini meliputi jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial dan kemasyarakatan lainnya. Kegiatan-kegiatan jasa sosial dan kemasyarakatan hanya terbatas yang dikelola oleh swasta saja sedangkan kegiatan sejenis yang dikelola oleh pemerintah termasuk dalam sektor pemerintahan.

b. Jasa Hiburan dan Kebudayaan, subsektor ini mencakup bioskop, radio swasta, taman hiburan, karaoke, kesenian, jaranan, dan sebagainya

c. Jasa Perorangan dan Rumahtangga, subsektor ini mencakup jasa perbengkelan, reparasi, jasa perorangan lainnya, pembantu rumahtangga dan sebagainya.

Berikut ini data kontribusi sektor Jasa-jasa di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2012, yaitu :

Tabel 21. Kontribusi Sektor Jasa-jasa dalam PDRB ADHK di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
a. Pemerintahan Umum	**341.360,90**	**355.049,48**	**368.718,88**	**383.209,53**	**398.959,45**	**369.459,65**
b. Swasta	**438.090,92**	**465.889,96**	**494.905,56**	**523.809,48**	**555.518,97**	**495.642,98**
1. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan	103.268,06	110.001,14	116.733,21	123.585,44	130.914,06	116.900,38
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	44.319,18	48.826,44	53.269,65	56.119,57	59.991,83	52.505,33
3. Jasa Perorangan dan Rumahtangga	290.503,67	307.062,38	324.902,71	344.104,46	364.613,08	326.237,26
Total	**779.451,82**	**820.939,44**	**863.624,44**	**907.019,01**	**954.478,42**	**865.102,63**

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2013

Tabel 22. Kontribusi Sektor Jasa-jasa dalam PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	
a. Pemerintahan Umum	**8.912.859,88**	**9.492.398,21**	**9.680.399,48**	**10.041.907,15**	**10.474.699,67**	**9.720.452,88**
b. Swasta	**18.903.601,72**	**19.924.975,90**	**21.013.008,00**	**22.209.623,47**	**23.411.598,13**	**21.092.561,44**
1. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan	2.337.191,76	2.503.599,79	2.668.442,05	2.781.581,99	2.958.201,21	2.649.803,36
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	906.718,22	969.303,96	1.093.919,02	1.284.814,80	1.379.648,59	1.126.880,92
3. Jasa Perorangan dan Rumahtangga	15.659.691,75	16.452.072,15	17.250.646,92	18.143.226,68	19.073.748,33	17.315.877,17
Total	**27.816.461,60**	**29.417.374,11**	**30.693.407,48**	**32.251.530,62**	**33.886.297,80**	**30.813.014,32**

Sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2013

Berdasarkan tabel 21 dan 22 menggambarkan kontribusi sektor jasa-jasa di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2012. Pada tabel 21 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tulungaung subsektor yang paling tinggi memberikan kontribusi adalah subsektor jasa swasta, yakni dengan jumlah rata-rata sebesar Rp 495.642,98. Subsektor jasa swasta tersebut juga meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan, serta jasa perorangan dan rumahtangga. Sedangkan subsektor jasa pemerintahan umum lebih sedikit memberikan kontribusi dalam PDRB ADHK yakni dengan rata-rata sebesar Rp369.459,65. Pada tabel 22 dapat dilihat di Provinsi Jawa Timur juga mengalami hal yang sama pada Kabupaten Tulungagung, dimana subsektor yang memberikan kontribusi paling tinggi adalah subsektor jasa swasta dengan rata-rata Rp 21.092.561,44 dan subsektor jasa pemerintahan umum memberikan kontribusi

rata-rata Rp 9.720.452,88. Namun, jika dilihat secara keseluruhan selama 5 tahun (2008-2012) sektor jasa-jasa mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik di Kabupaten Tulungagung maupun di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah rata-rata selama 5 tahun sebesar Rp 865.102,63 dan Rp 30.813.014,32.

j) Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, perubahan sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut sektor selama kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012) disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 23 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun 2008-2012 (Persen)

Sektor		2008	2009	2010	2011*	2012**
1	Pertanian	3,49	3,35	2,34	2,56	3,43
2	Pertambangan dan Penggalian	4,26	4,98	4,83	4,74	3,62
3	Industri Pengolahan	5,37	5,93	6,46	6,86	6,93
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	10,23	4,69	5,62	6,02	6,14
5	Bangunan	4,23	4,36	5,04	6,92	6,65
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,42	7,75	9,19	9,43	9,66
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,55	10,79	11,67	10,87	8,22
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,11	5,40	5,79	6,00	6,83
9	Jasa-jasa	5,29	5,32	5,20	5,02	5,23
Kabupaten Tulungagung		**5,86**	**6,01**	**6,48**	**6,73**	**6,99**

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Keterangan : *) = Angka Perbaikan
**) = Angka Sementara

Selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, ada tiga sektor yang pertumbuhan ekonominya selalu menunjukkan tren naik, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tulungagung semakin bergeser atau bertumpu pada sektor-sektor tersier.

2. Pengembangan Sektor Ekonomi PDRB Kabupaten Tulungagung

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan akan dapat terwujud melalui visi, misi dan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025. Dengan memperhatikan kondisi daerah, tantangan yang akan dihadapi dan mempertimbangkan potensi

yang dimiliki, maka ditetapkan visi pembangunana Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 yaitu **"Mewujudkan Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing".** Dalam mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui upaya merealisasikan misi pembangunan jangka panjang 2005-2025 yang salah satunya adalah dengan **"Mewujudkan Kemandirian Kabupaten Tulungagung Dalam Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Daya Saing".** Upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah adalah merupakan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai keberhasilan pembangunan bidang ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan jangka panjang daerah diarahkan pada:

1) Pengembangan perekonomian daerah dengan basis keunggulan kompetitif daya saing daerah.
2) Perluasan kesempatan berusaha dan bekerja
3) Pengembangan kelembagaan ekonomi lokal yang dilandasi dengan penerapan azas-azas tata pemerintahan yang baik
4) Pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang pembangunan daerah
5) Perkuatan struktur ekonomi lokal berbasis pertanian
6) Pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian SDA dan lingkungan hidup yang menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah
7) Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah

8) Perkuatan struktur industri dan skala usaha untuk industri kecil dan menengah
9) Penciptaan lingkungan usaha mikro dan pengembangan UKM dan koperasi dalam rangka memperkuat daya saing global
10) Peningkatan efektivitas perdagangan di daerah dalam kerangka perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri (RPJPD Kab. Tulungagung, 2005 : IV-43)

Berdasarkan pada visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah yang mengarah pada berbasis keunggulan kompetitif daerah Kabupaten Tulungagung sejauh ini masih belum diterapkan. Pernyataan tersebut dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Kepada Bapak Eko Hadi, Kasubid Perdagangan dan Dunia Usaha yang menyatakan:

> "Selama ini dalam menerapkan strategi yang berbasis keuntungan kompetitif daerah di Kabupaten Tulungagung masih belum diterapkan. Permasalahannya pada kualitas dan keterbukaan masyarakat. Soalnya dalam menerapkan strategi tersebut kan juga harus melibatkan peran aktif masyarakat, tetapi masyarakat di Kabupaten Tulungagung sendiri masih kurang terbuka sehingga sulit untuk dilakukan." (Ruang Kerja, 10/04/ 2014; Pukul 13:30)

Pembangunan ekonomi daerah yang didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif salah satunya dengan mengembangkan komoditi unggulan. Seperti yang diungkapkan Bapak Eko Hadi, Kasubid Perdagangan dan Dunia Usaha menambahkan bahwa :

> "Dalam pengembangan komoditi yang mempunyai daya saing tinggi yang mengarah pada keuntungan kompetitif secara menyeluruh wilayah tulungagung masih dalam tahap rencana. Sudah ada rencana kebijakan tentang pengembangan komoditi unggulan, ya misalnya pengembangan

> untuk kawasan agropolitan dan minapolitan yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk dikembangkan. Tetapi untuk sebagian wilayah setiap kecamatan sudah memiliki komoditi unggulan masing-masing. Misalnya pengembangan agropolitan di Kecamatan Sendang, komoditi yang dikembangkan adalah pemeliharaan sapi perah, sapi potong dan jenis hewan ternak lainnya. Selain itu juga ada komoditi unggulan dari berbagai macam sayuran, buah-buahan dan tanaman bunga. Klo minapolitannya komoditi unggulan seperti patin, lele, gurame, dan ikan hias. Cukup banyak komoditi unggulan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, namun sampai sejauh ini belum mampu menggerakkan masyarakat terutama petani dan nelayan untuk masuk kedalam agroindustri. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala seperti kurang terbukanya masyarakat dan keterbatasan infrastruktur." (Ruang Kerja, 10/04/2014; Pukul 13:35)

Dalam pengembangan komoditi unggulan di Kabupaten Tulungagung, hal yang sangat disayangkan mengenai sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung ini adalah pola fikir dan sikap tertutup masyarakat yang masih enggan untuk merubah daerahnya menjadi lebih baik. Hal tersebut terjadi ketika sebagian masyarakat lebih memilih untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri ketimbang bekerja pada sektor primer ataupun sektor sekunder. Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa terdapat kendala yang selama ini dirasakan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko Hadi, Kasubid Perdagangan dan Dunia Usaha yaitu:

> "Sebenarnya untuk kemampuan yang dimiliki masyarakat tulungagung sudah baik, tetapi permasalahannya kembali lagi yaitu sikap keterbukaan mereka masih sulit. Untuk merubah pola pikir masyarakat disini masih susah, karena ada sebagian yang beranggapan bahwa mereka bisa mandiri dengan usaha mereka sendiri. Trus disisi lain, lebih memilih untuk bekerja sebagai TKI. Nah itu yang susah diubah untuk meningkatkan kualitas mereka karena sikap yang kurang terbuka." (Ruang Kerja, 10/04/2014; Pukul 13:40)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Tulungagung sangat diperlukan untuk melakukan perubahan, mengingat SDM merupakan aktor pembangunan yang memiliki peran yang sangat penting. Selain kualitas sumber daya manusia, dalam pembangunan ekonomi daerah hal yang juga penting adalah kemampuan teknologi yang dimiliki daerah tersebut. Seperti arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan bahwa pengembangan teknologi diupayakan untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Tulungagung. Kemajuan teknologi merupakan faktor penting bagi pengembangan ekonomi daerah. Dalam menghasilkan suatu produk, tentunya memerlukan suatu teknologi daerah yang dapat meningkatkan daya saing dari produk yang dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut, di Kabupaten Tulungagung sendiri juga sudah memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya. Pernyataan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko Hadi, Kasubid Perdagangan dan Dunia Usaha bahwa:

> "peningkatan kemampuan teknologi untuk memasarkan produk dan merangsang penemuan produk baru yang dihasilkan selama ini sudah dilakukan namun masih belum maksimal. Dikarenakan kurang meratanya budaya teknologi dikalangan masyarakat antara masyarakat kota dan desa. Kebanyakan klo di desa masyarakat mengganggap teknologi itu sulit dan perlu biaya yang mahal, mereka mengganggap dengan alat seadanya mereka bisa tetap berproduksi, jadi untuk peningkatan teknologi masih tidak terlalu mendesak. Ya contohnya mereka masih tetap bisa menghasilkan produk-produk seperti dari hasil industri makanan dan minuman". (Ruang Kerja, 10/04/2014; Pukul 13:35)

Upaya mewujudkan kemandirian suatu daerah yang mengarah pada pembangunan jangka panjang tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing daerah. Faktor-faktor yang selama ini menjadi penyebab lemahnya daya saing daerah dibandingkan dengan daerah lainnya antara lain : rendahnya kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya penguasaan

dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam proses produksi dan pengolahan hasil produksi, serta rendahnya penguasaan manajemen pemasaran hasil produksi. Oleh sebab itu Kabupaten Tulungagung secara bertahap harus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal pengembangan ekonomi daerah, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya daerah, potensi daerah dan keunggulan kompetitif daerah secara optimal dan lestari.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati Tahun 2013. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung. Adapun visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2018 yaitu : **"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui**

Peningkatan Sumberdaya Manusia Yang Profesional Berdasarkan Iman dan Taqwa".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu disusun misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan keinginan kondisi tentang masa depan. Salah satu misi yang terkait dengan pembangunan ekonomi daerah adalah "**Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirusahaan".** Seperti halnya RPJPD, dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung juga tertuang arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 5 tahun kedepan sebagai berikut :

1. Melakukan pembenahan tata kelola dan infrastruktur pasar tradisional dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas per-dagangan skala mikro, kecil dan menengah guna mewujudkan daya saing diantara modernisasi sarana prasarana perdagangan
2. Meningkatkan nilai tambah produksi industri mikro, kecil, dan menengah
3. Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer
4. Pengamanan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan ketersediaan pangan
5. Menciptakan peningkatan nilai tambah produk melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), aspek teknologi dan faktor pendukung daya saing produk lainnya
6. Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan

daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, atau masyarakat miskin

7. Pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan orientasi peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap sumber daya produktif dan ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu dengan memperhatikan aspek konservasi
8. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberian stimulan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (BAPPEDA, 2014 : VI-7)

Sesuai dengan misi RPJMD dan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa selama ini Kabupaten Tulungagung memiliki tiga sektor unggulan dan daya saing sektor ekonomi yang berdasarkan pada sektor ekonomi Produk Domestik regional Bruto (PDRB), yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Eko Hadi, Kasubid Perdagangan dan Dunia Usaha yang menyatakan :

> "Selama ini di Kabupaten Tulungagung sendiri memiliki 3 sektor yang diunggulkan, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Di sektor pertanian subsektor yang diunggulkan ya pertanian dan peternakan. Dari ketiga sektor tersebut kan memang memiliki hubungan yang saling berkaitan. Tetapi klo kita lihat di dokumen RPJMD yang terbaru ini sektor yang diunggulkan yang mengarah pada pengembangan UMKM, sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan. Pengembangan sektor itu kan juga disesuaikan dengan visi-misi Bupati terpilih tahun lalu" (Ruang Kerja, 10/04/2014; Pukul 13:20)

Sesuai dengan salah satu arah kebijakan pembangunan yang berhubungan dengan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mengarah pada pengembangan UMKM guna meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Tulungagung. Mengingat pentingnya suatu kegiatan yang berbasis kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyakat guna memanfaatkan komoditi atau sektor unggulan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung dari hasil wawancara dengan Bapak Eko Hadi, Kasubid Perdagangan dan Dunia Usaha bahwa pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

> "Semua sektor ekonomi sudah menerapkan konsep kewirausahaan daerah. Seperti yang dikenal oleh masyarakat banyak Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai daerah UMKM. Pengembangan ini juga sesuai dengan misi pemerintah Kabupaten Tulungagung yang melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM melalui kegiatan wirausaha. Sayangnya banyak masyarakat asli tulungagung yang lebih memilih untuk menjadi TKI, ketimbang berwirausaha. Makanya pemerintah daerah terus berupaya untuk membangun gedung *entrepreneur center* di UPT Pelatihan Kerja agar masyarakat dapat mengembangkan wirausaha didaerah ini." (Ruang Kerja, 10/04/2014; Pukul 13:45)

Selanjutnya, sektor pertanian yang termasuk didalamnya urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, urusan kehutanan merupakan sektor yang diunggulkan dan mendapatkan program prioritas yang didasari dengan pernyataan dari Ibu Maya, Kasubid Ekonomi bahwa :

> "Klo di sektor pertanian sendiri juga mendapatkan prioritas pengembangan, seperti pada subsektor perternakan, subsektor perkebunan dan subsektor bahan makanan. Semua subsektor tersebut menjadi unggulan di Kabupaten Tulungagung, dalam kontribusi terhadap PDRB nya juga paling besar." (Ruang Kerja, 25/03/ 2014; Pukul 10:25)

Kemudian Ibu Maya, Kasubid Ekonomi menambahkan pernyataan bahwa :

> "Selain sektor pertanian ada juga sektor industri yang diunggulkan dan sektor tersebut juga mampu bersaing dengan daerah lain. Hasil dari sektor industri di Kabupaten Tulungagung yang terkenal ya seperti kerajinan marmer yang ada di Kecamatan Campurdarat dan Besuki, trus ada juga industri tekstil contohnya ya batik khas Tulungagung. Kemudian industri agro yang dihasilkan dari sektor pertanian seperti industri tahu, tempe, makanan geti, kripik jagung dan masih banyak lagi hasil produksinya." (Ruang Kerja, 25/03/ 2014; Pukul 10:25)

Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang paling besar memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal tersebut juga sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Maya, Kasubid Ekonomi yaitu :

> "Klo sektor perdagangan, hotel dan restoran itu yang paling besar memberikan kontribusi di PDRB selama tahun 2008-2012. Tetapi untuk hotel dan restoran memang disini biasa saja tidak terlalu banyak. Tapi untuk perdagangannya memang di Kabupaten Tulungagung ini sudah maju terutama perdagangan pada industri kecil dan menengah." (Ruang Kerja, 25/03/ 2014; Pukul 10:30)

Keterkaitan antar sektor ekonomi PDRB dapat menciptakan suatu kawasan ekonomi terpadu dengan melalui pengembangan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Rencana arah pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen RPJMD tersebut diharapkan Kabupaten Tulungagung dapat menerapkan kawasan ekonomi terpadu secara maksimal. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Eko Hadi, Kasubid Perdagangan dan Dunia Usaha yang menyatakan bahwa:

> "pengembangan kawasan ekonomi terpadu sejauh ini sudah dilakukan. Tetapi ya masih belum maksimal. Pengembangan kawasannya ya berdasarkan pada sektor ekonomi yang diunggulkan disini dan yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan. Makanya sekarang dibuat rencana pengembangan pada potensi pengembangan wilayah yang

> berhubungan dengan kawasan peruntukan yang akan dikembangkan seperti kawasan industri. Kemudian dalam RPJMD ini yang mengacu pada RTRW juga telah menetapkan kawasan pengembangan kegiatan ekonomi yang dibagi menurut per kecamatan." (Ruang Kerja, 10/04/2014; Pukul 13:45)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung salah satu arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk 5 tahun kedepan adalah dengan menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer. Jika hal ini dapat diterapkan maka Kabupaten Tulungagung dapat mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki dan dapat bersaing dengan daerah sekitar yang termasuk dalam sub wilayah pembangunan.

Pengembangan kawasan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan ini akan lebih baik jika didukung dengan adanya peningkatan kerjasama antar daerah. Dapat dimulai dengan kerjasama antar daerah sesuai dengan daerah sekitarnya seperti Kabupaten Kediri, Blitar, Trenggalek. Kerjasama antar daerah yang terjadi selama ini di Kabupaten Tulungagung dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko Hadi, Kasubid Perdagangan dan Dunia Usaha bahwa :

> "Untuk kerjasama antar daerah selama ini dengan daerah kabupaten lainnya yang berdekatan dengan tulungagung belum ada perjanjian MoU nya. Semua dikoordinasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur." (Ruang Kerja, 10/04/ 2014; Pukul 13:50)

Peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah ini akan saling menguntungkan antar daerah satu dengan lainnya, karena dapat memanfaatkan secara maksimal

potensi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan produk yang beragam.

c. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung

Perkembangan wilayah yang semakin meningkat pada dasarnya diimbangi oleh adanya perkembangan ekonomi di semua sektor oleh semua *stakeholders* pembangunan. Dalam perkembangan wilayah sebagaimana telah tertuang pada RPJMD Kabupaten Tulungagung 2014-2018 yang tentunya mengacu pada dokumen RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032 telah memuat sistem perkotaan yang meliputi :

a) Penetapan Pusat Perkotaan

1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Tulungagung. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pelayanan adalah Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Kauman, Kecamatan Boyolangu, dan Kecamatan Gondang. Fungsi pelayanan utama sebagai pemerintahan, pendidikan, Kesehatan, Olah raga, Perdagangan dan jasa.

2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:

   a. PKLp Perkotaan Karangrejo. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pelayanan adalah kecamatan Karangrejo, Kecamatan Sendang, Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Ngantru. Fungsi pelayanan sebagai pengembangan agropolitan, penyangga perkotaan, industri dan konservasi.

b. PKLp Perkotaan Ngunut. Wilayah Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pelayanan adalah Kecamatan Ngunut, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Rejotangan dan Kecamatan Sumbergempol. Fungsi pelayanan utama wilayah sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian, peternakan, perikanan dan industri, perdagangan dan jasa.

c. PKLp Perkotaan Campurdarat. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pelayanan adalah Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Pakel dan Kecamatan Tanggunggunung. Fungsi pelayanan sebagai penyangga perkotaan, industri, perikanan, dan pariwisata.

3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Perkotaan Ngantru, Perkotaan Sendang, Perkotaan Pagerwojo, Perkotaan Gondang, Perkotaan Kauman, Perkotaan Kedungwaru, Perkotaan Bandung, Perkotaan Besuki, Perkotaan Boyolangu, Perkotaan Sumbergempol, Perkotaan Rejotangan, Perkotaan Pakel, Perkotaan Kalidawir, Perkotaan Tanggunggunung, dan Perkotaan Pucang Laban.

b) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu industri mikro dan kecil, industri menengah, dan industri besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa batasan industri kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kekayaan bersih

Rp.50.000.000,00 – Rp.500.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Sedangkan industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif dengan kekayaan bersih sebesar Rp.500.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Selebihnya diatas ketentuan tersebut dikategorikan industri besar. Sedangkan dibawah ketentuan industri kecil adalah usaha mikro.

Selain itu juga terdapat kelompok non sentra industri yang juga tersebar di seluruh kecamatan yang didominasi (83%) oleh industri rumah tangga. Lebih jelasnya persebaran industri di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1) Kawasan peruntukan industri besar meliputi: Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Besuki, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Ngunut, dan Kecamatan Ngantru.
2) Kawasan peruntukan industri menengah terdiri atas:

   Kecamatan Besuki, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Karangrejo dan Kecamatan Kauman.
3) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro terdiri atas:
   a. Kawasan sentra industri kecil marmer dan onix meliputi : Kecamatan Campurdarat dan Kecamatan Besuki.

b. Kawasan sentra industri makanan dan minuman meliputi : Kecamatan Tulungangung, Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan Kedungwaru.

c. Kawasan sentra tembakau meliputi : Kecamatan Gondang, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Pakel, dan Kecamatan Campurdarat.

d. Kawasan sentra industri batik meliputi : Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Kauman.

e. Kawasan sentra industri konveksi meliputi : Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Boyolangu.

f. Kawasan sentra industri kelapa meliputi : Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Tanggunggunung dan Kecamatan Bandung.

c) Kawasan Industri

Arahan pengembangan kawasan industri yang direncanakan di Kecamatan Ngantru dan Sumbergempol adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran.

2) Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan

3) Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri

4) Pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan
5) Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
6) Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

d) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulkan Jawa Timur maupun Nasional, karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya. Penetapan pusat pengembangan didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut :

1) Kemudahan Aksesibilitas
2) Jarak antara obyek wisata
3) Banyaknya pergerakan atau pola pergerakan wisatawan
4) Arahan oleh rencana tata ruang

Sementara untuk kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tulungagung terdiri atas:

1) Kawasan wisata alam terdiri atas :
   a. daya tarik wisata goa
   b. daya tarik wisata air
   c. daya tarik wisata pantai

d. agrowisata berada di Desa Sendang Kecamatan Sendang

2) Kawasan wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata peninggalan sejarah dan purbakala

3) Kawasan wisata buatan seperti pesanggrahan Argowilis yang berada di Kecamatan Sendang.

Berdasarkan potensi pengembangan wilayahnya, Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah yang memiliki kawasan strategi untuk dikembangkan sektor pariwisatanya. Pada sektor pariwisata yang termasuk berkontribusi pada sektor jasa-jasa, bahwa pariwisata di Kabupaten Tulungagung memang berpotensi namun yang terjadi selama ini bahwa untuk pengembangannya masih sangat kurang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Maya, Kasubid Ekonomi yang mengungkapkan:

> "Untuk pariwisata di Kabupaten Tulungagung ini sebenarnya memiliki potensi yang tinggi, namun dalam pengelolaan dan pengembangannya masih sangat kurang. Tulungagung banyak memiliki obyek wisata yang dapat diunggulkan seperti salah satunya pantai popoh. Cuma ya gtu untuk pengembangannya masih kurang karena masyarakat disini kurang terbuka untuk diajak bekerjasama. Selain itu beberapa tempat wisata infrastruktur kurang memadai, akses untuk ketempatnya masih sulit untuk dijangkau. Makanya pariwisata Tulungagung ini sangat membutuhkan perhatian khusus." (Ruang Kerja, 25/03/2014; Pukul 10:20)

Jika sektor pariwisata dapat diterapkan sesuai dengan pengembangan potensi wilayah yang telah tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2018 maka sektor tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah. Mengingat sektor pariwisata juga termasuk sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung.

C. Analisis Data

Pada analisis data ini merupakan bagian dalam menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis data yang digunakan untuk menentukan sektor unggulan dan sektor yang dapat disaingkan adalah dengan menggunakan analisis *Location Quotient (LQ) , Shift Share* dan *Tipologi Klassen.*

1. Sektor Unggulan dan Daya Saing di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012

Keberadaan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui sektor unggulan dan sektor yang dapat disaingkan dengan daerah lain merupakan hal yang penting. Dimana pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dapat menentukan kebijakan untuk daerahnya sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sektor yang memiliki keunggulan dapat dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lainnya untuk berkembang. Dengan demikian, salah satu cara untuk menilai keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat data-data mengenai pendapatan regional di Kabupaten Tulungagung. Adapun data yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Dokumen PDRB Kabupaten Tulungagung (2013:6) "PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun." Nilai PDRB ini disumbang dari 9 sektor yang ada dan subsektor dari masing-masing sektor tersebut. Dengan bantuan data PDRB tersebut maka dapat ditentukannya sektor unggulan dan daya saing di Kabupaten Tulungagung.

Adapun metode untuk menentukannya dengan melakukan analisis data menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, dan *Tipologi Klassen*. Selanjutnya untuk menentukan sektor unggulan dan daya saing maka dibutuhkan minimal dalam kurun waktu 5 tahun analisis dengan mengetahui juga hasil rata-rata dari data yang dianalisis setiap tahunnya. Oleh sebab itu, peneliti menyajikan data PDRB sebagai data dasar untuk menganalisis serta menyajikan analisis data sektor unggulan dan daya saing baik dari hasil analisis data tiap tahun maupun hasil analisis rata-rata dari tahun 2008-2012.

a. Sektor Unggulan dan Daya Saing di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2009

Untuk menganalisis sektor unggulan dan daya saing maka diperlukannya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 5 tahun. Perlunya data PDRB Provinsi Jawa Timur karena dibutuhkan data pada daerah tingkat atasnya Kabupaten Tulungagung untuk menganalisis menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share.* Dalam hal ini peneliti menganalisis pertahun mulai dari tahun 2008-2012 dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan hasil analisis dari tahun ke tahun. Sehingga hasil yang didapat akan lebih akurat untuk mengetahui hasil akhirnya. Oleh karena itu, berikut ini data PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2009:

Tabel 24 PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2009

No	Sektor	Kabupaten Tulungagung (Tahun)		Provinsi Jawa Timur (Tahun)	
		2008	2009	2008	2009
1	Pertanian	1.388.087,87	1.434.546,12	48.315.111,68	50.208.896,71
2	Pertambangan dan Penggalian	132.688,30	139.291,46	6.645.089,71	7.104.816,81
3	Industri Pengolahan	1.227.851,61	1.300.669,27	81.033.880,59	83.299.893,42
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	93.233,69	97.601,93	4.246.146,61	4.361.515,81
5	Konstruksi	121.592,24	126.893,66	9.887.403,83	10.307.883,76
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2.115.764,14	2.279.773,02	90.911.382,23	95.983.867,09
7	Pengangkutan dan Komunikasi	324.215,12	359.188,32	20.164.063,96	22.781.527,67
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	753.857,00	794.599,66	16.519.146,41	17.395.393,53
9	Jasa-jasa	779.451,82	820.939,00	27.816.461,60	29.417.374,11
Total PDRB		**6.936.741,79**	**7.353.502,89**	**305.538.686,62**	**320.861.168,91**

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur, 2013

1) Analisis *Location Quotient* (LQ) Tahun 2008-2009

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan alat untuk mengetahui sektor mana yang menjadi sektor unggulan dan sektor mana yang tidak menjadi sektor unggulan pada daerah Kabupaten Tulungagung, dengan membandingkan nilai PDRB Kabupaten Tulungagung dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2009. Dari hasil perhitungan tersebut maka akan menghasilkan nilai LQ bahwa jika memiliki nilai **LQ>1** berarti sektor tersebut termasuk sektor unggulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah Kabupaten Tulunggagung dan menjadi kekuatan daerah untuk mengekspor produknya ke luar daerah. Sedangkan jika **LQ<1** maka sektor tersebut bukan sektor unggulan sehingga sektor tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan daerah Kabupaten Tulungagung dan menjadi pengimpor. Sedangkan jika **LQ=1** maka sektor tersebut cenderung tertutup karena tidak melakukan transaksi baik keluar maupun kedalam wilayah. Oleh karena itu, berdasarkan data PDRB Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tulungagung pada tabel 24, maka peneliti akan menganalisis mengenai sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 25 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2009

No.	Sektor	Hasil LQ	
		2008	2009
1	Pertanian	1,27	1,25
2	Pertambangan dan Penggalian	0,88	0,86
3	Industri Pengolahan	0,67	0,68
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,97	0,98
5	Konstruksi	0,54	0,54
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,03	1,04
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,71	0,69
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,01	1,99
9	Jasa-jasa	1,23	1,22

Sumber: Hasil Perhitungan

Dari hasil perhitungan menggunakan analisis *Location Quotient (*LQ) dapat dilihat pada tabel 25 bahwa ada 4 (empat) sektor yang termasuk sektor unggulan pada tahun 2008 dan 2009 di Kabupaten Tulungagung. Dimana sektor tersebut yang memiliki nilai LQ lebih dari 1, sedangkan jika kurang dari 1 maka sektor tersebut bukan termasuk sebagai sektor unggulan. Pada tahun 2008 adapun sektor-sektor yang termasuk sektor unggulan yaitu pertama sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai LQ sebesar 2,01 , kedua sektor pertanian dengan nilai LQ sebesar 1,27. Kemudian ketiga sektor jasa-jasa dengan nilai LQ 1,23 dan sektor unggulan yang terakhir sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai LQ sebesar 1,03.

Sementara pada tahun 2009, dari hasil perhitungan dan analisis menggunakan metode analisis LQ bahwa sektor unggulan di Kabupaten Tulunggaung sama seperti pada tahun 2008 yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dari masing-masing sektor tersebut memiliki hasil nilai LQ yang secara berurutan sama dengan hasil LQ pada tahun 2008. Dimana sektor unggulan

yang pertama yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan hasil LQ sebesar 1,99 , kedua sektor pertanian sebesar 1,25 , yang ketiga sektor jasa-jasa sebesar 1,22 dan terakhir sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,04.

Dari tabel 25 dapat dilihat bahwa sektor unggulan dari hasil analisis LQ adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pertanian, sektor jasa-jasa , dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2009 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami penurunan dari hasil LQ pada tahun 2008 yaitu dari 2,01 menjadi 1,99. Begitu juga dengan sektor pertanian dan sektor jasa-jasa, dimana sektor pertanian juga mengalami penurunan dari hasil LQ yaitu 1,27 menjadi 1,25 dan sektor jasa-jasa dari 1,23 menjadi 1,22. Sebaliknya pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami kenaikan pada tahun 2009 yaitu dari 1,03 menjadi 1,04.

2) Analisis *Shift Share* Tahun 2008-2009

Analisis *Shift Share* merupakan alat analisis untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi wilayah Kabupaten Tulungagung dengan membandingkan struktur ekonomi wilayah yang lebih tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur. Analisis *shift share* ini memberikan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktur ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung ditentukan oleh tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain yaitu *national share, proportional shift component (industrial mix)*, dan *differential shift component (competitive position)*. Oleh sebab itu, hasil perhitungan *shift share* dan posisi pergeseran dari masing-masing sektor di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008-2009 sebagai berikut:

Tabel 26 Hasil Analisis *Shift Shar*e Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2009

No	Sektor	National Share	Industrial Mix	Competitive Position		Pergeseran Struktur Ekonomi (SS)
				Nilai	Urutan	
1	Pertanian	69.611,32	-15.203,09	-7.949,99	9	46.458,25
2	Pertambangan dan Penggalian	6.654,20	2.525,58	-2.576,61	6	6.603,16
3	Industri Pengolahan	61.575,62	-27.240,26	38.482,30	2	72.817,66
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.675,58	-2.142,39	1.835,05	3	4.368,24
5	Konstruksi	6.097,74	-926,81	130,49	5	5.301,42
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	106.103,61	11.947,41	45.957,86	1	164.008,88
7	Pengangkutan dan Komunikasi	16.259,09	25.826,74	-7.112,63	8	34.973,20
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	37.805,23	2.182,61	754,82	4	40.742,66
9	Jasa-jasa	39.088,79	5.770,77	-3.372,38	7	41.487,18
	Total	**347.871,18**	**2.740,56**			**416.760,65**

Sumber : Hasil Perhitungan

Pada Tabel 26 menunjukan perkembangan pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung, dengan berdasarkan analisis dari masing-masing komponen berikut ini :

a) *National Share (N)*

Komponen *National Share* digunakan untuk mengukur apakah pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata Provinsi Jawa Timur (Tarigan,2012:86). Hasil dari perhitungan *National Share* ini terlihat bahwa peranan wilayah Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tulungagung. Dapat dilihat pada tabel 26 bahwa pertumbuhan ekonomi absolut Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008-2009 memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung memiliki nilai sebesar 416.760,65 Juta Rupiah, sedangkan efek pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur sebesar 347.871,18 Juta Rupiah. Hal tersebut menunjukan bahwa pengaruh

pertumbuhan Provinsi Jawa Timur berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya efek pergeseran pertumbuhan Provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh positif terhadap beberapa sektor. Pengaruh tersebut berkaitan dengan pertumbuhan absolut lebih besar di Kabupaten Tulungagung, yang menandakan peranan Kabupaten Tulungagung cukup besar dan peranan Provinsi Jawa Timur cukup kecil. Seperti yang terlihat pada tabel 26 bahwa di tahun 2008-2009 sektor yang memiliki peranan yang besar di Kabupaten Tulungagung adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 72.817,66 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 61.575,62 juta rupiah. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 164.008,88 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 106.103,61 juta rupiah. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 34.973,20 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 16.259,09 juta rupiah. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi sebesar 40.742,66 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 37.805,23 juta rupiah. Serta sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 41.487,18 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 39.088,79 juta rupiah. Dari kelima sektor tersebut menunjukan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur.

Namun untuk empat sektor lainnya yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas, dan air bersih; serta sektor

kontruksi memiliki nilai pertumbuhan absolut di Kabupaten Tulungagung yang lebih kecil dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sektor pertanian yang berkontribusi sebesar 46.458,25 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 69.611,32 juta rupiah. Sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 6.603,16 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 6.654,20 juta rupiah. Sektor listrik, gas, dan air bersih berkontribusi sebesar 4.368,24 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 4.675,58 juta rupiah. Serta sektor kontruksi berkontribusi sebesar 5.301,42 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 6.097,74 juta rupiah. Dari keempat sektor tersebut dapat dikatakan bahwa peranan Provinsi Jawa Timur lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Tulungagung.

b) *Proportional Shift (Industrial Mix)*

Komponen *Proportional Shift* atau yang biasa disebut dengan efek bauran industri *(industrial mix)* merupakan komponen yang mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di wilayah Kabupaten Tulungagung. (Tarigan, 2012:86). Dapat dikatakan bahwa pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian di Kabupaten Tulungagung terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding dengan perekonomian sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Pada komponen *proportional shift* ini jika bernilai positif (+) maka sektor i yang tumbuh lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya jika bernilai negatif (-) maka sektor *i* tumbuh lebih lambat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan di Provinsi Jawa Timur. Namun,

jika dilihat secara keseluruhan pada tabel 26 bahwa efek bauran industri *(industrial mix)* Kabupaten Tulungagung terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur memiliki nilai yang positif yaitu 2.740,56 juta rupiah yang artinya bahwa distribusi sektoral menyebabkan kenaikan terhadap nilai PDRB Kabupaten Tulungagung.

Jika dilihat menurut sektor pada tahun 2008-2009 di Kabupaten Tulungagung bahwa sektor yang memiliki nilai positif (+) adalah sektor pertambangan dan penggalian (2.525,58), sektor perdagangan, hotel dan restoran (11.947,41), sektor pengangkutan dan komunikasi (25.826,74), sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (2.182,61), sektor jasa-jasa (5.770,77). Dari kelima sektor tersebut memiliki nilai *proportional shift* positif (+) yang artinya bahwa laju pertumbuhan sektor tersebut lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan keempat sektor lainnya memiliki nilai negatif (-), sektor-sektor tersebut diantaranya sektor pertanian (-15.203,09), sektor industri pengolahan (-27.240,26), sektor listrik, gas dan air bersih (-2.142,39) serta sektor kontruksi (-926,81). Keempat sektor tersebut pertumbuhannya lebih lambat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur.

c) *Differential Shift (Competitive Position)*

Komponen *Differential Shift* atau yang biasa disebut dengan *competitive position* merupakan komponen untuk mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat didaerah Kabupaten Tulungagung daripada tingkat nasional yaitu

Provinsi Jawa Timur yang disebabkan oleh faktor-faktor *lokasional intern* (Tarigan,2012:86-87). *Differential Shift* juga digunakan untuk menentukan seberapa jauh daya saing sektor ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung dengan perekonomian yang dijadikan sebagai daerah referensi yaitu Provinsi Jawa Timur (Arsyad,2010:390). Pada komponen ini jika *differential shift* bernilai positif (+) maka sektor *i* lebih kompetitif di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jika bernilai negatif (-), maka sektor *i* lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan tabel 26, pada tahun 2008-2009 terdapat 5 sektor yang memiliki nilai *differential shift* positif (+) yaitu sektor industri pengolahan (38.482,30), sektor listrik, gas dan air bersih (1.835,05), sektor konstruksi (130,49), sektor perdagangan, hotel dan restoran (45.957,86) serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (754,82). Kelima sektor tersebut memiliki nilai *differential shift* positif yang artinya sektor tersebut lebih kompetitif di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sektor-sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sektor lainnya memiliki nilai *differential shift* negatif (-) antara lain sektor pertanian (-7.949,99), sektor pertambangan dan penggalian(-2.576,61), sektor pengangkutan dan komunikasi (-7.112,63), serta sektor jasa-jasa (-3.372,38). Sektor-sektor tersebut memiliki nilai negatif yang berarti bahwa

sektor tersebut pertumbuhannya lambat sehingga lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan di Kabupaten Tulungagung.

Kemudian komponen *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. PS merupakan akibat pengaruh unsur-unsur eksternal yang bekerja secara nasional yaitu Provinsi Jawa Timur, sedangkan DS adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah Kabupaten Tulungagung (Glasson, 1977 dalam Fachrurrazy, 2002:52). Dari kedua komponen tersebut (PS dan DS) dapat dinyatakan dalam suatu kuadran yang akan diperoleh empat kategori posisi relatif dari seluruh sektor ekonomi tersebut. Keempat kategori dapat digambarkan pada kuadran berikut ini:

Gambar 6 Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS
Sumber: Data Diolah dari Tabel 27

Berdasarkan gambar 6 bahwa posisi relatif suatu sektor ekonomi berdasarkan nilai *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) pada tahun 2008-2009 dapat diperjelas sebagai berikut ini:

a) Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah sektor dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan dijadikan sebagai sektor unggulan yang mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Sektor yang termasuk dalam kategori ini adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran karena memiliki nilai PS (+) yaitu 11.947,41 yang merupakan sektor yang tumbuh lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dan daya saing sektor (DS) bernilai positif (+) yaitu 45.957,86. Begitu juga dengan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang memiliki nilai PS positif (+) yaitu 2.182,61 dan daya saing sektor (DS) bernilai positif (+) yaitu 754,82.

b) Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang terhambat namun produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan daerah lain atau dengan kata lain dapat dikembangkan. Sektor yang termasuk dalam kategori ini adalah sektor industri pengolahan (PS = -27.240,26 dan DS = 38.482,30) , sektor listrik, gas dan air bersih (PS = -2.142,39 dan DS = 1.835,05) , sektor konstruksi (PS = -926,81 dan DS = 130,49).

c) Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan cepat tetapi tidak kompetitif. Sektor yang termasuk dalam kategori ini merupakan sektor unggulan tetapi produk yang dihasilkan

tidak mampu bersaing dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Adapun sektor yang termasuk kategori ini adalah sektor pertambangan dan penggalian (PS = 2.525,58 dan DS = -2.576,61) , sektor pengangkutan dan komunikasi (PS = 25.826,74 dan DS = -7.112,63) , sektor jasa-jasa (PS = 5.770,77 dan DS = -3.372,38).

d) Kategori IV (PS negatif dan DS negatif) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang lambat dan juga memiliki daya saing lemah atau tidak kompetitif sehingga sektor tersebut relatif tertinggal. Sektor yang termasuk dalam kategori ini adalah sektor pertanian dengan nilai PS negatif (-) yaitu -15.203,09 dan DS negatif (-) yaitu -7.949,99 karena merupakan sektor yang bukan unggulan dan tidak mampu bersaing dengan daerah lain.

3) Analisis *Tipologi Klassen* Tahun 2008-2009

Analisis *Tipologi Klassen* digunakan untuk dapat mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan berdasarkan sektor ekonomi serta mengetahui klasifikasi sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi sektor ekonomi Kabupaten Tulungagung dengan melihat sektor ekonomi daerah tingkat atasnya yaitu Provinsi Jawa Timur. Analisis ini menggunakan *matrix klassen* yang dilakukan dengan cara mengelompokkan sektor menjadi empat bagian dengan menggunakan data rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata nilai kontribusi dari masing-masing sektor tersebut. Oleh karena itu, berikut ini data rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2009, yaitu :

Tabel 27 Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2009

No	Sektor	Provinsi Jawa Timur		Kabupaten Tulungagung	
		Rata-rata Laju Pertumbuhan (S)	Rata-rata Kontribusi PDRB (Sk)	Rata-rata Laju Pertumbuhan (Si)	Rata-rata Kontribusi PDRB (Ski)
1	Pertanian	3,52	15,73	3,42	19,76
2	Pertambangan dan Penggalian	8,12	2,19	4,62	1,90
3	Industri Pengolahan	3,58	26,24	5,65	17,70
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	2,86	1,38	7,46	1,34
5	Konstruksi	3,48	3,23	4,30	1,74
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,83	29,83	7,59	30,75
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10,98	6,85	11,17	4,78
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,68	5,42	5,26	10,84
9	Jasa-jasa	6,04	9,14	5,31	11,20

Sumber : Hasil Perhitungan

Pada tabel 27 diketahui bahwa dua sektor yang memiliki kontribusi rata-rata paling besar di Kabupaten Tulungagung adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 30,75% dan sektor pertanian sebesar 19,76%. Untuk pertumbuhan ekonomi rata-rata paling besar adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 11,17%. Sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Timur, sektor yang memiliki kontribusi rata-rata paling besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 29,83% dan sektor industri pengolahan sebesar 26,24%. Untuk pertumbuhan rata-rata paling besar adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,98%. Selanjutnya melalui tabel 28 dapat diklasifikasikan sektor PDRB Kabupaten Tulunggaung Tahun 2008-2009 menurut *Tipologi Klassen* sebagai berikut:

Tabel 28 Klasifikasi Sektor PDRB menurut *Tipologi Klassen* Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2009

Kuadran I	**Kuadran II**
Sektor maju dan tumbuh dengan pesat *(developed sector)* Si > S dan Ski > Sk a. sektor perdagangan, hotel dan restoran	Sektor maju tapi tertekan *(stagnant sector)* Si < S dan Ski > Sk a. sektor pertanian b. sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan c. sektor jasa-jasa
Kuadran III	**Kuadran IV**
sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat *(developing sector)* Si > S dan Ski < Sk a. sektor industri pengolahan b. sektor listrik, gas, dan air bersih c. sektor konstruksi d. sektor pengangkutan dan komunikasi	sektor relatif tertinggal *(underdeveloped sector)* Si < S dan Ski < Sk a. sektor pertambangan dan penggalian

Sumber : Data diolah dari Tabel 27

Sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan pada tabel 28 terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung, bahwa terdapat beberapa sektor yang tersebar dalam empat kuadran berdasarkan analisis *tipologi klassen.* Sektor yang dapat maju dan tumbuh dengan pesat yang berada pada kuadran I adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini merupakan sektor yang paling baik sehingga dapat dijadikan sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, sektor pertanian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa termasuk dalam kuadran II yaitu sektor maju tapi tertekan. Dimana sektor ini memang memiliki kontribusi PDRB rata-rata yang cukup baik dibandingkan sektor lainnya, namun sektor ini memiliki laju pertumbuhan rata-rata yang terus menurun.

Sehingga sektor tersebut termasuk sektor yang dapat diunggulkan namun akan sulit untuk disaingkan dengan sektor yang sama pada daerah lain. Sementara sektor yang termasuk sektor potensial atau masih dapat berkembang adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor konstruksi serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor-sektor tersebut termasuk dalam sektor yang berpotensi untuk dapat terus dikembangkan di Kabupaten Tulungagung. Adapula sektor yang relatif tertinggal yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Dimana sektor ini memiliki pertumbuhan rata-rata dan kontribusi rata-rata yang sedikit dan mengalami penurunan.

b. Sektor Unggulan dan Daya Saing di Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2010

Sebelum melakukan analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* perlunya untuk mengetahui jumlah kontribusi PDRB sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2010. Untuk itu, berikut ini data PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2010:

Tabel 29 PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2010

No	Sektor	Kabupaten Tulungagung (Tahun)		Provinsi Jawa Timur (Tahun)	
		2009	2010	2009	2010
1	Pertanian	1.434.546,12	1.468.108,17	50.208.896,71	51.329.548,83
2	Pertambangan dan Penggalian	139.291,46	146.019,23	7.104.816,81	7.757.319,82
3	Industri Pengolahan	1.300.669,27	1.384.755,06	83.299.893,42	86.900.779,13
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	97.601,93	103.089,76	4.361.515,81	4.642.081,81
5	Konstruksi	126.893,66	133.289,10	10.307.883,76	10.992.599,76
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2.279.773,02	2.489.285,96	95.983.867,09	106.229.112,97
7	Pengangkutan dan Komunikasi	359.188,32	401.092,28	22.781.527,67	25.076.424,92
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	794.599,66	840.625,52	17.395.393,53	18.659.490,17
9	Jasa-jasa	820.939,00	863.624,45	29.417.374,11	30.693.407,48
Total PDRB		**7.353.502,89**	**7.829.889,53**	**320.861.168,91**	**342.280.764,89**

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur, 2013

1) Analisis *Location Quotient* (LQ) Tahun 2009-2010

Sesuai dengan data pada tabel 29 tentang PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2010, data tersebut digunakan untuk menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Tulungaagung dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ). Maka berikut ini hasil dari analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung tahun 2009-2010:

Tabel 30 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2010

No.	Sektor	Hasil LQ	
		2009	2010
1	Pertanian	1,25	1,25
2	Pertambangan dan Penggalian	0,86	0,82
3	Industri Pengolahan	0,68	0,70
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,98	0,97
5	Konstruksi	0,54	0,53
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,04	1,02
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,69	0,70
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,99	1,97
9	Jasa-jasa	1,22	1,23

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari hasil analisis *Location Quotient* (LQ) pada tabel 30 dapat dilihat bahwa sektor unggulan pada tahun 2009-2010 sama seperti pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2008-2009. Bahwa pada tahun 2009 sektor unggulan yang ada di Kabupaten Tulungagung secara berurutan adalah pertama sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai 1,99. Kedua sektor pertanian dengan nilai LQ 1,25 dan ketiga sektor jasa-jasa dengan nilai LQ 1,22. Keempat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai LQ sebesar 1,04.

Pada tahun 2010 juga mengalami hal yang sama yaitu sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung secara berurutan adalah (1) sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan, (2) sektor pertanian, (3) sektor jasa-jasa serta (4)sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan nilai hasil LQ yaitu (1) 1,97 , (2) 1,25 , (3) 1,23 , (4) 1,02. Selama tahun 2009-2010 sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan karena memiliki nilai LQ paling besar dibandingkan sektor lainnya.

Seperti yang telah diketahui dari hasil analisis pada tabel 30 tahun 2009-2010 bahwa sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung yang memiliki nilai hasil LQ > 1. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai LQ pada tahun 2009 sebesar 1,99 dan mengalami penurunan sedikit di tahun 2010 sebesar 1,97. Kemudian diikuti sektor pertanian yang pada tahun 2009-2010 mengalami nilai yang sama yaitu 1,25. Lalu dikuti sektor jasa-jasa dengan nilai LQ di tahun 2009 sebesar 1,22 menjadi 1,23. Sektor unggulan yang terakhir yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 1,04 dan menjadi 1,02. Sektor-sektor tersebut termasuk sektor unggulan yang menjadi kekuatan bagi daerah Kabupaten Tulungagung untuk dapat mengekpor hasil produknya ke luar daerah.

2) Analisis *Shift Share* Tahun 2009-2010

Analisis *Shift Share* merupakan alat analisis untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi wilayah Kabupaten Tulungagung dengan membandingkan struktur ekonomi wilayah yang lebih tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur. Analisis *shift share* ini memberikan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktur ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung ditentukan oleh tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain yaitu *national share, proportional shift*

component (industrial mix), dan *differential shift component (competitive position)*. Oleh sebab itu, hasil perhitungan *shift share* dan posisi pergeseran dari masing-masing sektor di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2009-2010 sebagai berikut:

Tabel 31 Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2010

No	Sektor	National Share	Proportional Shift	Differential Shift		Pergeseran Struktur Ekonomi (SS)
				Nilai	Urutan	
1	Pertanian	95.765,40	-63.746,63	1.543,28	4	33.562,05
2	Pertambangan dan Penggalian	9.298,62	3.493,84	-6.064,69	7	6.727,77
3	Industri Pengolahan	86.828,24	-30.602,94	27.860,49	1	84.085,79
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	6.515,57	-237,07	-790,67	5	5.487,83
5	Konstruksi	8.470,99	-41,89	-2.033,65	6	6.395,44
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	152.189,86	91.151,40	-33.828,32	9	209.512,94
7	Pengangkutan dan Komunikasi	23.978,19	12.204,65	5.721,12	3	41.903,96
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	53.044,76	4.697,58	-11.716,48	8	46.025,86
9	Jasa-jasa	54.803,08	-19.193,33	7.075,69	2	42.685,45
Total		**490.894,71**	**-2.274,39**			**476.387,09**

Sumber: Hasil Perhitungan

Pada Tabel 31 menunjukan perkembangan pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung, dengan berdasarkan analisis dari masing-masing komponen berikut ini :

a) *National Share (N)*

Komponen *National Share* digunakan untuk mengukur apakah pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional Provinsi Jawa Timur (Tarigan,2012:86). Hasil dari perhitungan *National Share* ini akan terlihat peranan wilayah Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan tabel 31 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi absolut Kabupaten Tulungagung pada tahun 2009-2010 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung memiliki nilai 476.387,09 Juta Rupiah,

sedangkan efek pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur lebih besar yaitu 490.894,71 Juta Rupiah. Hal tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya pengaruh bagi tiap sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Tulungagung, mendapatkan pengaruh yang positif dari efek pergeseran pertumbuhan Provinsi Jawa Timur. Pengaruh tersebut berkaitan dengan pertumbuhan absolut lebih besar di Kabupaten Tulungagung, yang menandakan peranan Kabupaten Tulungagung cukup besar dan peranan Provinsi Jawa Timur cukup kecil. Seperti yang terlihat pada tabel 31 bahwa di tahun 2009-2010 sektor yang memiliki peranan yang besar di Kabupaten Tulungagung adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 209.512,94 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 152.189,86 juta rupiah. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 41.903,96 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 23.978,19 juta rupiah. Selama tahun 2009-2010 hanya ada dua sektor yang menunjukan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, untuk sektor lainnya memiliki nilai pertumbuhan absolut di Kabupaten Tulungagung yang lebih kecil dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sektor tersebut antara lain (1) sektor pertanian yang berkontribusi sebesar 33.562,05 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 95.765,40 juta rupiah. (2) Sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 6.727,77

juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur 9.298,62 juta rupiah. (3) Sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 84.085,79 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 86.828,24. (4) Sektor listrik, gas, dan air bersih berkontribusi sebesar 5.487,83 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 6.515,57 juta rupiah. (5) Sektor kontruksi berkontribusi sebesar 6.395,44 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 8.470,99 juta rupiah. (6) Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang berkontribusi sebesar 46.025,86 juta rupiah, saat di Provinsi Jawa Timur sebesar 53.044,76 juta rupiah. (7) Sektor jasa-jasa yang berkontribusi sebesar 42.685,45 juta rupiah, saat di Provinsi Jawa Timur sebesar 54.803,08 juta rupiah. Sektor-sektor tersebut dapat dikatakan bahwa peranan Provinsi Jawa Timur lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Tulungagung sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan Provinsi Jawa Timur.

b) *Proportional Shift (Industrial Mix)*

Komponen *Proportional Shift* atau yang biasa disebut dengan efek bauran industri *(industrial mix)* merupakan komponen yang mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di wilayah Kabupaten Tulungagung. (Tarigan, 2012:86). Dapat dikatakan bahwa pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian di Kabupaten Tulungagung terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding dengan perekonomian sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Pada komponen *proportional shift* ini jika bernilai positif (+) maka sektor *i* yang tumbuh lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi

Jawa Timur. Sebaliknya jika bernilai negatif (-) maka sektor *i* tumbuh lebih lambat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan di Provinsi Jawa Timur. Jika dilihat secara keseluruhan pada tabel 32 bahwa efek bauran industri *(industrial mix)* Kabupaten Tulungagung terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur memiliki nilai yang negatif yaitu -2.274,39 yang artinya bahwa distribusi sektoral tidak memberikan dampak yang positif atau tidak mengalami kenaikan terhadap nilai PDRB Kabupaten Tulungagung karena mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur.

Jika dilihat menurut sektor pada tahun 2009-2010 di Kabupaten Tulungagung bahwa sektor yang memiliki nilai positif (+) adalah sektor pertambangan dan penggalian (3.493,84), sektor perdagangan, hotel dan restoran (91.151,40), sektor pengangkutan dan komunikasi (12.204,65), sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (4.697,58). Dari keempat sektor tersebut memiliki nilai *proportional shift* positif (+) yang artinya bahwa laju pertumbuhan sektor tersebut tumbuh lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sektor lainnya memiliki nilai negatif (-), sektor-sektor tersebut diantaranya sektor pertanian (-63.746,63), sektor industri pengolahan (-30.602,94), sektor listrik, gas dan air bersih (-237,07), sektor kontruksi (-41,89) serta sektor jasa-jasa (-19.193,33). Kelima sektor tersebut pertumbuhannya lebih lambat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur.

c) ***Differential Shift (Competitive Position)***

Komponen *Differential Shift* atau yang biasa disebut dengan *competitive position* merupakan komponen untuk mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat didaerah Kabupaten Tulungagung daripada tingkat nasional yaitu Provinsi Jawa Timur yang disebabkan oleh faktor-faktor *lokasional intern* (Tarigan,2012:86-87). *Differential Shift* juga digunakan untuk menentukan seberapa jauh daya saing sektor ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung dengan perekonomian yang dijadikan sebagai daerah referensi yaitu Provinsi Jawa Timur (Arsyad,2010:390). Pada komponen ini jika *differential shift* bernilai positif (+) maka sektor *i* lebih kompetitif di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jika bernilai negatif (-), maka sektor *i* lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan tabel 31, pada tahun 2009-2010 terdapat empat sektor yang memiliki nilai *differential shift* positif (+) yaitu sektor pertanian (1.543,28) , sektor industri pengolahan (27.860,49), sektor pengangkutan dan komunikasi (5.721,12) serta sektor jasa-jasa (7.075,69). Keempat sektor tersebut memiliki nilai *differential shift* positif yang artinya sektor tersebut lebih kompetitif atau memiliki daya saing sektor ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sektor-sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sektor lainnya memiliki

nilai *differential shift* negatif (-) antara lain sektor pertambangan dan penggalian (-6.064,69), sektor listrik, gas dan air bersih (-790,67), sektor konstruksi (-2.033,65) , sektor perdagangan, hotel dan restoran (-33.828,32) , serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (-11.716,48). Sektor-sektor tersebut memiliki nilai negatif yang berarti bahwa sektor tersebut pertumbuhannya lambat sehingga lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan di Kabupaten Tulungagung.

Kemudian komponen *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. PS merupakan akibat pengaruh unsur-unsur eksternal yang bekerja secara nasional yaitu Provinsi Jawa Timur, sedangkan DS adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah Kabupaten Tulungagung (Glasson, 1977 dalam Fachrurrazy, 2002:52). Dari kedua komponen tersebut (PS dan DS) dapat dinyatakan dalam suatu kuadran yang akan diperoleh empat kategori posisi relatif dari seluruh sektor ekonomi tersebut. Keempat kategori dapat digambarkan pada kuadran berikut ini :

Gambar 7 Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS
Sumber: Data Diolah dari Tabel 31

Berdasarkan gambar 7 bahwa posisi relatif suatu sektor ekonomi berdasarkan nilai *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) pada tahun 2009-2010 dapat diperjelas sebagai berikut ini:

a) Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah sektor dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan dijadikan sebagai sektor unggulan yang mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Sektor yang termasuk dalam kategori ini adalah sektor pengangkutan dan komunikasi karena memiliki nilai PS (+) yaitu 12.204,65 yang merupakan sektor yang tumbuh lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dan daya saing sektor (DS) bernilai positif (+) yaitu 5.721,12.

b) Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang terhambat namun produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan daerah lain atau dengan kata lain dapat dikembangkan. Sektor yang termasuk dalam kategori ini adalah sektor pertanian (PS = -63.746,63 dan DS = 1.543,28) , sektor industri pengolahan (PS = -30.602,94 dan DS = 27.860,49) serta sektor jasa-jasa (PS = -19.193,33 dan DS = 7.075,69).

c) Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan cepat tetapi tidak kompetitif. Sektor yang termasuk dalam kategori ini merupakan sektor unggulan tetapi produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Adapun sektor yang termasuk kategori ini adalah sektor pertambangan dan penggalian (PS = 3.493,84 dan DS = -6.064,69) , sektor perdagangan, hotel dan restoran (PS = 91.151,40 dan DS = -33.828,32) , sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (PS = 4.697,58 dan DS = -11.716,48).

d) Kategori IV (PS negatif dan DS negatif) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang lambat dan juga memiliki daya saing lemah atau tidak kompetitif sehingga sektor tersebut relatif tertinggal. Terdapat dua sektor yang termasuk dalam kategori ini yaitu sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai (PS = -237,07 dan DS = -790,67) dan sektor konstruksi dengan nilai (PS = -41,89 dan DS = -2.033,65). Sektor tersebut merupakan

sektor yang bukan unggulan dan tidak mampu bersaing dengan daerah lain.

3) Analisis *Tipologi Klassen* Tahun 2009-2010

Sebelum melakukan analisis menggunakan *tipologi klassen* maka dibutuhkan data mengenai laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB baik pada Kabupaten Tulungagung maupun Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2010. Oleh karena itu, berikut ini data laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur :

Tabel 32 Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2010

No	Sektor	Provinsi Jawa Timur		Kabupaten Tulungagung	
		Rata-rata Laju Pertumbuhan (S)	Rata-rata Kontribusi PDRB (Sk)	Rata-rata Laju Pertumbuhan (Si)	Rata-rata Kontribusi PDRB (Ski)
1	Pertanian	3,08	15,33	2,85	19,13
2	Pertambangan dan Penggalian	8,05	2,24	4,91	1,88
3	Industri Pengolahan	3,56	25,68	6,20	17,69
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4,58	1,36	5,16	1,33
5	Konstruksi	5,45	3,21	4,70	1,72
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	8,13	30,48	8,47	31,79
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,53	7,22	11,23	5,00
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,29	5,44	5,60	10,78
9	Jasa-jasa	5,05	9,07	5,26	11,10

Sumber : Hasil Perhitungan

Berdasarkan tabel 32, di Kabupaten Tulungagung sektor yang paling besar memiliki kontribusi rata-rata adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 31,79% , lalu diikuti oleh sektor pertanian sebesar 19,13%. Sedangkan sektor yang menyumbangkan kontribusi rata-rata paling kecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,33%. Untuk pertumbuhan rata-rata di Kabupaten Tulungagung yang paling tinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 11,23%. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor pertanian sebesar 2,85%. Selanjutnya, di Provinsi Jawa Timur sektor yang menyumbangkan

kontribusi rata-rata paling besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 30,48% lalu diikuti dengan sektor industri pengolahan sebesar 25,68%. Pertumbuhan rata-rata di Provinsi Jawa Timur yang paling tinggi sama dengan di Kabupaten Tulungagung yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 11,53%. Sedangkan yang paling rendah adalah sektor pertanian sebesar 3,03%.

Kemudian dari tabel 32 diklasifikasikan sektor PDRB di Kabupaten Tulungagung menurut analisis *Tipologi Klassen* sebagai berikut:

Tabel 33 Klasifikasi Sektor PDRB menurut *Tipologi Klassen* Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2010

Kuadran I	**Kuadran II**
Sektor maju dan tumbuh dengan pesat *(developed sector)* Si > S dan Ski > Sk a. sektor perdagangan, hotel dan retoran b. sektor jasa-jasa	Sektor maju tapi tertekan *(stagnant sector)* Si < S dan Ski > Sk a. sektor pertanian b. sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
Kuadran III	**Kuadran IV**
sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat *(developing sector)* Si > S dan Ski < Sk a. sektor industri pengolahan b. sektor listrik, gas dan air bersih	sektor relatif tertinggal *(underdeveloped sector)* Si < S dan Ski < Sk a. Sektor Pertambangan dan Penggalian b. sektor konstruksi c. sektor pengangkutan dan komunikasi

Sumber : Data diolah dari Tabel 32

Berdasarkan analisis *tipologi klassen* pada tabel 33 bahwa sektor yang termasuk pada kuadran I sektor maju dan tumbuh dengan pesat di Kabupaten Tulungagung adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Kedua sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor unggulan dan dapat

disaingkan karena merupakan sektor yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sektor yang termasuk sektor maju tetapi tertekan adalah sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Dimana sektor tersebut memang memiliki rata-rata kontribusi PDRB yang lebih besar di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur, namun pertumbuhan rata-rata di Kabupaten Tulungagung lebih kecil jika dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk sektor yang potensial atau dapat berkembang adalah sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor tersebut berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Tulungagung sehingga dapat bersaing dengan daerah lain. Sedangkan sektor yang relatif tertinggal yang memiliki rata-rata kontribusi dan rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

c. Sektor Unggulan dan Daya Saing di Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2011

Sebelum melakukan analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* untuk mengetahui sektor unggulan dan daya saing di Kabupaten Tulungagung, maka dibutuhkan data mengenai PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2011. Oleh sebab itu, berikut ini data PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2011:

Tabel 34 PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2011

No	Sektor	Kabupaten Tulungagung (Tahun)		Provinsi Jawa Timur (Tahun)	
		2010	2011	2010	2011
1	Pertanian	1.468.108,17	1.505.754,89	51.329.548,83	52.628.433,15
2	Pertambangan dan Penggalian	146.019,23	152.940,54	7.757.319,82	8.228.632,48
3	Industri Pengolahan	1.384.755,06	1.479.739,47	86.900.779,13	92.171.191,46
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	103.089,76	109.296,65	4.642.081,81	4.932.084,36
5	Konstruksi	133.289,10	142.512,71	10.992.599,76	11.994.825,72
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2.489.285,96	2.724.111,80	106.229.112,97	116.645.214,35
7	Pengangkutan dan Komunikasi	401.092,28	444.697,65	25.076.424,92	27.945.256,13
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	840.625,52	891.041,97	18.659.490,17	20.186.109,19
9	Jasa-jasa	863.624,45	907.019,01	30.693.407,48	32.251.530,62
	Total PDRB	**7.829.889,53**	**8.357.114,68**	**342.280.764,89**	**366.983.277,46**

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur, 2013

1) Analisis *Location Quotient* (LQ) Tahun 2010-2011

Berdasarkan data pada tabel 34 tentang PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2011 bahwa data tersebut digunakan untuk menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung. Dari hasil analisis *Location Quotient* (LQ) dapat diketahui sektor unggulan yang ada di Kabupaten Tulungagun dengan sektor yang memiliki nilai hasil LQ > 1. Oleh sebab itu, berikut ini hasil perhitungan analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung tahun 2010-2011:

Tabel 35 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2011

No.	Sektor	Hasil LQ	
		2010	2011
1	Pertanian	1,25	1,26
2	Pertambangan dan Penggalian	0,82	0,82
3	Industri Pengolahan	0,70	0,70
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,97	0,97
5	Konstruksi	0,53	0,52
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,02	1,03
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,70	0,70
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,97	1,94
9	Jasa-jasa	1,23	1,23

Sumber: Hasil Perhitungan

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 35 bahwa terdapat empat sektor unggulan yang sama seperti pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 sektor

unggulan yang ada di Kabupaten Tulungagung antara lain (1) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai LQ sebesar 1,97 ,(2) sektor pertanian dengan nilai LQ sebesar 1,25 ,(3) sektor jasa-jasa dengan nilai LQ sebesar 1,23 dan (4) sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai LQ sebesar 1,02.

Pada tahun 2011 sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung adalah sektor yang sama yaitu (1) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai hasil LQ 1,94 , (2) sektor pertanian dengan nilai hasil LQ sebesar 1,26 , (3) sektor jasa-jasa dengan nilai hasil LQ sebesar 1,23 , (4) sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai hasil LQ sebesar 1,03.

Jika dilihat secara keseluruhan dari tahun 2010-2011 berdasarkan tabel 35, bahwa sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pertanian, sektor jasa-jasa, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2011 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami penurunan dalam hasil LQ dari 1,97 menjadi 1,94. Sedangkan untuk sektor pertanian mengalami peningkatan dari 1,25 menjadi 1,26. Untuk sektor jasa-jasa mengalami nilai yang stabil yaitu 1,23 dan terakhir pada sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan dari 1,02 menjadi 1,03. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang menjadi kekuatan bagi Kabupaten Tulungagung untuk dapat memenuhi kebutuhan daerah nya sendiri dan dapat mengekspor produknya ke daerah lain.

2) Analisis *Shift Share* Tahun 2010-2011

Analisis *Shift Share* merupakan alat analisis untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi wilayah Kabupaten Tulungagung dengan membandingkan struktur ekonomi wilayah yang lebih tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur. Analisis *shift share* ini memberikan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktur ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung ditentukan oleh tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain yaitu *national share, proportional shift component (industrial mix)*, dan *differential shift component (competitive position)*. Oleh sebab itu, hasil perhitungan *shift share* dan posisi pergeseran dari masing-masing sektor di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2010-2011 sebagai berikut:

Tabel 36 Hasil Analisis *Shift Share* Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2011

No	Sektor	National Share	Proportional Shift	Differential Shift		Pergeseran Struktur Ekonomi (SS)
				Nilai	Urutan	
1	Pertanian	105.953,84	-68.803,64	496,53	2	37.646,72
2	Pertambangan dan Penggalian	10.538,25	-1.666,54	-1.950,40	5	6.921,31
3	Industri Pengolahan	99.938,22	-15.954,73	11.000,93	1	94.984,41
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	7.440,02	-999,74	-233,39	3	6.206,89
5	Konstruksi	9.619,52	2.532,82	-2.928,73	7	9.223,61
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	179.652,57	64.429,82	-9.256,54	8	234.825,84
7	Pengangkutan dan Komunikasi	28.946,96	16.939,41	-2.281,00	6	43.605,37
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	60.668,21	8.107,24	-18.359,00	9	50.416,45
9	Jasa-jasa	62.328,05	-18.486,94	-446,56	4	43.394,56
	Total	**565.085,64**	**-13.902,31**			**527.225,16**

Sumber : Hasil Perhitungan

Pada Tabel 36 menunjukan perkembangan pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung, dengan berdasarkan analisis dari masing-masing komponen berikut ini :

a) *National Share (N)*

Komponen *National Share* digunakan untuk mengukur apakah pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih cepat atau

lebih lambat dari pertumbuhan nasional Provinsi Jawa Timur (Tarigan,2012:86). Hasil dari perhitungan *National Share* ini akan terlihat peranan wilayah Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan tabel 36 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi absolut Kabupaten Tulungagung pada tahun 2010-2011 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung memiliki nilai 527.225,16 Juta Rupiah, sedangkan efek pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur lebih besar yaitu 565.085,64 Juta Rupiah. Hal tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya pengaruh bagi tiap sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Tulungagung, mendapatkan pengaruh yang positif dari efek pergeseran pertumbuhan Provinsi Jawa Timur. Pengaruh tersebut berkaitan dengan pertumbuhan absolut lebih besar di Kabupaten Tulungagung, yang menandakan peranan Kabupaten Tulungagung cukup besar dan peranan Provinsi Jawa Timur cukup kecil. Seperti yang terlihat pada tabel 36 bahwa di tahun 2010-2011 sektor yang memiliki peranan yang besar di Kabupaten Tulungagung adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 234.825,84 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 179.652,57 juta rupiah. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 43.605,37 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 28.946,96 juta rupiah. Selama tahun 2010-2011 hanya ada dua sektor yang menunjukan pertumbuhan

ekonomi yang lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur.

Pada sektor lainnya memiliki nilai pertumbuhan absolut di Kabupaten Tulungagung yang lebih kecil dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sektor tersebut antara lain (1) sektor pertanian yang berkontribusi sebesar 37.646,72 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 105.953,84 juta rupiah. (2) Sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 6.921,31 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur 10.538,25 juta rupiah. (3) Sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 94.984,41 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 99.938,22. (4) Sektor listrik, gas, dan air bersih berkontribusi sebesar 6.206,89 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 7.440,02 juta rupiah. (5) Sektor kontruksi berkontribusi sebesar 9.223,61 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 9.619,52 juta rupiah. (6) Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang berkontribusi sebesar 50.416,45 juta rupiah, saat di Provinsi Jawa Timur sebesar 60.668,21 juta rupiah. (7) Sektor jasa-jasa yang berkontribusi sebesar 43.394,56 juta rupiah, saat di Provinsi Jawa Timur sebesar 62.328,05 juta rupiah. Sektor-sektor tersebut dapat dikatakan bahwa peranan Provinsi Jawa Timur lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Tulungagung sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan Provinsi Jawa Timur.

b) *Proportional Shift (Industrial Mix)*

Komponen *Proportional Shift* atau yang biasa disebut dengan efek bauran industri *(industrial mix)* merupakan komponen yang mengukur besarnya *shift*

regional netto yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di wilayah Kabupaten Tulungagung. (Tarigan, 2012:86). Dapat dikatakan bahwa pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian di Kabupaten Tulungagung terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding dengan perekonomian sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Pada komponen *proportional shift* ini jika bernilai positif (+) maka sektor *i* yang tumbuh lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya jika bernilai negatif (-) maka sektor *i* tumbuh lebih lambat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan di Provinsi Jawa Timur. Jika dilihat secara keseluruhan pada tabel 36 bahwa efek bauran industri *(industrial mix)* Kabupaten Tulungagung terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur memiliki nilai yang negatif yaitu -13.902,31 yang artinya bahwa distribusi sektoral tidak memberikan dampak yang positif atau tidak mengalami kenaikan terhadap nilai PDRB Kabupaten Tulungagung karena mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur.

Jika dilihat menurut sektor pada tahun 2010-2011 di Kabupaten Tulungagung bahwa sektor yang memiliki nilai positif (+) adalah sektor konstruksi (2.532,82), sektor perdagangan, hotel dan restoran (64.429,82), sektor pengangkutan dan komunikasi (16.939,41), sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (8.107,24). Dari keempat sektor tersebut memiliki nilai *proportional shift* positif (+) yang berarti bahwa laju pertumbuhan sektor tersebut tumbuh lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sektor lainnya memiliki nilai negatif (-), sektor-

sektor tersebut diantaranya sektor pertanian (-68.803,64), sektor pertambangan dan pengggalian (-1.666,54), sektor industri pengolahan (-15.954,73), sektor listrik, gas dan air bersih (-999,74) serta sektor jasa-jasa (-18.486,94). Kelima sektor tersebut pertumbuhannya lebih lambat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur.

c) *Differential Shift (Competitive Position)*

Komponen *Differential Shift* atau yang biasa disebut dengan *competitive position* merupakan komponen untuk mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat didaerah Kabupaten Tulungagung daripada tingkat nasional yaitu Provinsi Jawa Timur yang disebabkan oleh faktor-faktor *lokasional intern* (Tarigan,2012:86-87). *Differential Shift* juga digunakan untuk menentukan seberapa jauh daya saing sektor ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung dengan perekonomian yang dijadikan sebagai daerah referensi yaitu Provinsi Jawa Timur (Arsyad,2010:390). Pada komponen ini jika *differential shift* bernilai positif (+) maka sektor *i* lebih kompetitif di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jika bernilai negatif (-), maka sektor *i* lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan tabel 36, pada tahun 2010-2011 hanya terdapat dua sektor yang memiliki nilai *differential shift* positif (+) yaitu sektor pertanian (496,53) , sektor industri pengolahan (11.000,93). Sektor tersebut memiliki nilai *differential shift* positif yang artinya sektor tersebut lebih kompetitif atau memiliki daya saing

sektor ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sektor-sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sektor lainnya memiliki nilai *differential shift* negatif (-) antara lain sektor pertambangan dan penggalian (-1.950,40), sektor listrik, gas dan air bersih (-233,39), sektor konstruksi (-2.928,73) , sektor perdagangan, hotel dan restoran (-9.256,54) , sektor pengangkutan dan komunikasi (-2.281,00), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (-18.359,00) serta sektor jasa-jasa (-446,56). Sektor-sektor tersebut memiliki nilai negatif yang berarti bahwa sektor tersebut pertumbuhannya lambat sehingga lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan di Kabupaten Tulungagung.

Kemudian komponen *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. PS merupakan akibat pengaruh unsur-unsur eksternal yang bekerja secara nasional yaitu Provinsi Jawa Timur, sedangkan DS adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah Kabupaten Tulungagung (Glasson, 1977 dalam Fachrurrazy, 2002:52). Dari kedua komponen tersebut (PS dan DS) dapat dinyatakan dalam suatu kuadran yang akan diperoleh empat kategori posisi relatif dari seluruh sektor ekonomi tersebut. Keempat kategori dapat digambarkan pada kuadran berikut ini :

Gambar 8 Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS
Sumber: Data Diolah dari Tabel 36

Berdasarkan gambar 8 bahwa posisi relatif suatu sektor ekonomi berdasarkan nilai *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) pada tahun 2010-2011 dapat diperjelas sebagai berikut ini:

a) Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah sektor dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan dijadikan sebagai sektor unggulan yang mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Namun pada tahun 2010-2011 tidak ada sektor yang termasuk dalam kategori ini.

b) Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang terhambat namun produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan daerah lain atau dengan kata lain dapat

dikembangkan. Terdapat dua sektor yang termasuk dalam kategori ini yaitu sektor pertanian (PS = -68.803,64 dan DS = 496,53) dan sektor industri pengolahan (PS = -15.954,73 dan DS = 11.000,93).

c) Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan cepat tetapi tidak kompetitif. Sektor yang termasuk dalam kategori ini merupakan sektor unggulan tetapi produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Adapun sektor yang termasuk kategori ini adalah sektor kontruksi (PS = 2.532,82 dan DS = -2.928,73) , sektor perdagangan, hotel dan restoran (PS = 64.429,82 dan DS = -9.256,54) , sektor pengangkutan dan komunikasi (PS= 16.939,41 dan DS = -2.281,00) serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (PS = 8.107,24 dan DS = -18.359,00).

d) Kategori IV (PS negatif dan DS negatif)) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang lambat dan juga memiliki daya saing lemah atau tidak kompetitif sehingga sektor tersebut relatif tertinggal. Sektor yang termasuk dalam kategori ini yaitu sektor pertambangan dan penggalian (PS = -1.666,54 dan DS = 1.950,40) , sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai (PS = -999,74 dan DS = -233,39 dan sektor jasa-jasa dengan nilai (PS = -18.486,94 dan DS = -446,56). Sektor tersebut merupakan sektor yang bukan unggulan dan tidak mampu bersaing dengan daerah lain.

3) Analisis *Tipologi Klassen* Tahun 2010-2011

Untuk mengetahui dan menganalisis klasifikasi sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan analisis *tipologi klassen,* maka

perlu mengetahui dahulu rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata kontribusi sektor PDRB di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur tahun 2010 - 2011.

Tabel 37 Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2011

No	Sektor	Provinsi Jawa Timur		Kabupaten Tulungagung	
		Rata-rata Laju Pertumbuhan (S)	Rata-rata Kontribusi PDRB (Sk)	Rata-rata Laju Pertumbuhan (Si)	Rata-rata Kontribusi PDRB (Ski)
1	Pertanian	2,38	14,67	2,45	18,39
2	Pertambangan dan Penggalian	7,63	2,26	4,79	1,85
3	Industri Pengolahan	5,19	25,26	6,66	17,70
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	6,34	1,35	5,82	1,32
5	Konstruksi	7,88	3,24	5,98	1,71
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	10,24	31,41	9,31	32,20
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10,76	7,47	11,27	5,22
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,73	5,48	5,90	10,70
9	Jasa-jasa	4,71	8,88	5,11	10,94

Sumber : Hasil Perhitungan

Berdasarkan tabel 37 rata-rata kontribusi PDRB Kabupaten Tulungagung tahun 2010-2011 yang paling besar terdapat pada sektor yang sama dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran (32,20%) kemudian diikuti oleh sektor pertanian (18,29%). Sedangkan sektor yang paling kecil menyumbangkan kontribusi rata rata yaitu sektor listrik, gas dan air bersih (1,32%). Untuk rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (11,27%). Sementara rata-rata pertumbuhan yang paling rendah adalah sektor pertanian (2,45%).

Selanjutnya di Provinsi Jawa Timur, rata-rata kontribusi sektor paling besar terdapat pada sektor yang juga sama di Kabupaten Tulungagung yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran (31,41%), namun sektor yang berkontribusi paling besar kedua adalah sektor industri pengolahan (25,26%). Sedangkan, sektor yang berkontribusi paling kecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih (1,35%). Selain itu, rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur

terdapat pada sektor pengangkutan dan komunikasi (10,76%) dan hanya berbeda sedikit dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 10,24%. Sedangkan sektor yang rata-rata pertumbuhannya paling rendah adalah sektor pertanian (2,38%).

Selanjutnya dari tabel 37 dapat dilakukan analisis mengenai klasifikasi sektor PDRB di Kabupaten Tulungagung menurut *tipologi klassen* sebagai berikut ini:

Tabel 38 Klasifikasi Sektor PDRB menurut *Tipologi Klassen* Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2011

Kuadran I	**Kuadran II**
Sektor maju dan tumbuh dengan pesat *(developed sector)* Si > S dan Ski > Sk a. Sektor Pertanian b. Sektor Jasa-jasa	Sektor maju tapi tertekan *(stagnant sector)* Si < S dan Ski > Sk a. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran b. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Kuadran III	**Kuadran IV**
sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat*(developing sector)* Si > S dan Ski < Sk a. Sektor Industri pengolahan b. Sektor pengangkutan dan komunikasi	sektor relatif tertinggal *(underdeveloped sector)* Si < S dan Ski < Sk a. Sektor Pertambangan dan Penggalian b. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih c. Sektor Konstruksi

Sumber : Data diolah dari Tabel 37

Sesuai dengan hasil analisis pada tabel 38 maka diketahui klasifikasi sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung dengan memperhatikan sektor ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Sektor yang tergolong dalam sektor maju dan tumbuh dengan pesat adalah sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Sementara

untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tergolong dalam sektor yang maju tetapi tertekan. Hal ini karena rata-rata pertumbuhan di Kabupaten Tulungagung lebih kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur. Sehingga sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang cukup lambat dibandingkan sektor lainnya. Selanjutnya yang tergolong sektor potensial dan dapat dikembangkan adalah sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor yang relatif tertinggal adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor konstruksi.

d. Sektor Unggulan dan Daya Saing di Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2012

Sebelum melakukan analisis menggunakan *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* maka terlebih dahulu mengetahui PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2012. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui sektor yang dapat diunggulkan dan dapat disaingkan dengan sektor yang sama pada daerah lain. Maka berikut ini data PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2012:

Tabel 39 PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2012

No	Sektor	Kabupaten Tulungagung (Tahun)		Provinsi Jawa Timur (Tahun)	
		2011	2012	2011	2012
1	Pertanian	1.505.754,89	1.557.460,85	52.628.433,15	54.463.942,77
2	Pertambangan dan Penggalian	152.940,54	158.476,99	8.228.632,48	8.401.262,86
3	Industri Pengolahan	1.479.739,47	1.582.300,40	92.171.191,46	98.017.056,47
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	109.296,65	110.008,18	4.932.084,36	5.238.431,69
5	Konstruksi	142.512,71	151.989,80	11.994.825,72	12.840.565,41
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2.724.111,80	2.987.355,92	116.645.214,35	128.375.498,60
7	Pengangkutan dan Komunikasi	444.697,65	481.243,37	27.945.256,13	30.640.913,33
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	891.041,97	951.895,54	20.186.109,19	21.802.468,45
9	Jasa-jasa	907.019,01	954.478,42	32.251.530,62	33.886.297,81
	Total PDRB	**8.357.114,68**	**8.941.209,47**	**366.983.277,46**	**393.666.437,37**

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur, 2013

1) Analisis *Location Quotient* (LQ) Tahun 2011-2012

Sesuai dengan data pada tabel 39 tentang PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2012, data tersebut digunakan untuk menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Tulungaagung dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ). Maka berikut ini hasil dari analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2012:

Tabel 40 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2012

No.	Sektor	Hasil LQ	
		2011	2012
1	Pertanian	1,26	1,26
2	Pertambangan dan Penggalian	0,82	0,83
3	Industri Pengolahan	0,70	0,71
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,97	0,92
5	Konstruksi	0,52	0,52
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,03	1,02
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,70	0,69
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,94	1,92
9	Jasa-jasa	1,23	1,24

Sumber: Hasil Perhitungan

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) pada tabel 40 bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki empat sektor unggulan yaitu yang pertama

sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Kemudian yang kedua sektor pertanian, ketiga sektor jasa-jasa, dan yang keempat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dari keempat sektor tersebut memiliki nilai hasil LQ > 1 sehingga sektor tersebut termasuk sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung.

Dapat dilihat pada tabel 40 bahwa pada tahun 2011 yang termasuk sektor unggulan adalah pertama sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dengan nilai LQ sebesar 1,94. Kemudian yang kedua sektor pertanian dengan nilai LQ sebesar 1,26 , lalu yang ketiga sektor jasa-jasa dengan nilai LQ sebesar 1,23 dan yang keempat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai LQ sebesar 1,03.

Pada tahun 2012 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memiliki nilai LQ sebesar 1,92. Kemudian untuk sektor pertanian memiliki nilai LQ sebesar 1,26 , lalu sektor jasa-jasa memiliki nilai LQ sebesar 1,24 dan yang terakhir sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki nilai LQ sebesar 1,02.

Jika dilihat secara keseluruhan dari tahun 2011-2012 bahwa sektor unggulan tersebut memiliki nilai LQ yang naik turun atau dapat dikatakan tidak stabil. Seperti pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,23 menjadi 1,24. Namun, untuk sektor pertanian mengalami nilai yang stabil yaitu sebesar 1,26. Untuk sektor jasa-jasa juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,23 menjadi 1,24. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan yaitu dari 1,03 menjadi 1,02. Keempat sektor unggulan tersebut

menjadi kekuatan karena sektor tersebut mempu memenuhi kebutuhan di Kabupaten Tulungagung.

2) Analisis *Shift Share* Tahun 2011-2012

Analisis *Shift Share* merupakan alat analisis untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi wilayah Kabupaten Tulungagung dengan membandingkan struktur ekonomi wilayah yang lebih tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur. Analisis *shift share* ini memberikan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktur ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung ditentukan oleh tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain yaitu *national share, proportional shift component (industrial mix)*, dan *differential shift component (competitive position)*. Oleh sebab itu, hasil perhitungan *shift share* dan posisi pergeseran dari masing-masing sektor di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011-2012 sebagai berikut:

Tabel 41 Hasil Analisis *Shift Share* Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2012

No	Sektor	National Share	Proportional Shift	Differential Shift		Pergeseran Struktur Ekonomi (SS)
				Nilai	Urutan	
1	Pertanian	109.482,64	-56.966,78	-809,90	5	51.705,96
2	Pertambangan dan Penggalian	11.120,23	-7.911,65	2.327,88	2	5.536,45
3	Industri Pengolahan	107.591,07	-13.740,09	8.709,94	1	102.560,93
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	7.946,90	-1.158,14	-6.077,23	6	711,53
5	Konstruksi	10.362,02	-313,64	-571,30	4	9.477,09
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	198.068,73	75.878,27	-10.702,87	9	263.244,12
7	Pengangkutan dan Komunikasi	32.333,73	10.562,72	-6.350,74	7	36.545,72
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	64.787,19	6.561,08	-10.494,70	8	60.853,57
9	Jasa-jasa	65.948,87	-19.973,85	1.484,39	3	47.459,41
	Total	**607.641,39**	**-7.062,07**			**578.094,78**

Sumber : Hasil Perhitungan

Pada Tabel 41 menunjukan perkembangan pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung, dengan berdasarkan analisis dari masing-masing komponen berikut ini :

a) *National Share (N)*

Komponen *National Share* digunakan untuk mengukur apakah pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional Provinsi Jawa Timur (Tarigan,2012:86). Hasil dari perhitungan *National Share* ini akan terlihat peranan wilayah Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan tabel 41 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi absolut Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011-2012 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung memiliki nilai 578.094,78 Juta Rupiah, sedangkan efek pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur lebih besar yaitu 607.641,39 Juta Rupiah. Hal tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya pengaruh bagi tiap sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Tulungagung, mendapatkan pengaruh yang positif dari efek pergeseran pertumbuhan Provinsi Jawa Timur. Pengaruh tersebut berkaitan dengan pertumbuhan absolut lebih besar di Kabupaten Tulungagung, yang menandakan peranan Kabupaten Tulungagung cukup besar dan peranan Provinsi Jawa Timur cukup kecil. Seperti yang terlihat pada tabel 41 bahwa di tahun 2011-2012 sektor yang memiliki peranan yang besar di Kabupaten Tulungagung adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 263.244,12 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 198.068,73 juta rupiah. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 36.545,72

juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 32.333,73 juta rupiah. Selama tahun 2011-2012 hanya ada dua sektor yang menunjukan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur.

Pada sektor lainnya memiliki nilai pertumbuhan absolut di Kabupaten Tulungagung yang lebih kecil dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sektor tersebut antara lain (1) sektor pertanian yang berkontribusi sebesar 51.705,96 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 109.482,64 juta rupiah. (2) Sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 5.536,45 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur 11.120,23 juta rupiah. (3) Sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 102.560,93 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 107.591,07 juta rupiah. (4) Sektor listrik, gas, dan air bersih berkontribusi sebesar 711,53 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 7.946,90 juta rupiah. (5) Sektor kontruksi berkontribusi sebesar 9.477,09 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 10.362,02 juta rupiah. (6) Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang berkontribusi sebesar 60.853,57 juta rupiah, saat di Provinsi Jawa Timur sebesar 64.787,19 juta rupiah. (7) Sektor jasa-jasa yang berkontribusi sebesar 47.459,41 juta rupiah, saat di Provinsi Jawa Timur sebesar 65.948,87 juta rupiah. Sektor-sektor tersebut dapat dikatakan bahwa peranan Provinsi Jawa Timur lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Tulungagung sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan Provinsi Jawa Timur.

b) *Proportional Shift (Industrial Mix)*

Komponen *Proportional Shift* atau yang biasa disebut dengan efek bauran industri *(industrial mix)* merupakan komponen yang mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di wilayah Kabupaten Tulungagung. (Tarigan, 2012:86). Dapat dikatakan bahwa pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian di Kabupaten Tulungagung terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding dengan perekonomian sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Pada komponen *proportional shift* ini jika bernilai positif (+) maka sektor *i* yang tumbuh lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya jika bernilai negatif (-) maka sektor *i* tumbuh lebih lambat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan di Provinsi Jawa Timur. Jika dilihat secara keseluruhan pada tabel 41 bahwa efek bauran industri *(industrial mix)* Kabupaten Tulungagung terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur memiliki nilai yang negatif yaitu -7.062,07 yang artinya bahwa distribusi sektoral tidak memberikan dampak yang positif atau tidak mengalami kenaikan terhadap nilai PDRB Kabupaten Tulungagung karena mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur.

Jika dilihat menurut sektor pada tahun 2011-2012 di Kabupaten Tulungagung bahwa sektor yang memiliki nilai positif (+) adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (75.878,27), sektor pengangkutan dan komunikasi (10.562,72), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (6.561,08). Dari ketiga sektor tersebut memiliki nilai *proportional shift* positif (+)

yang berarti bahwa laju pertumbuhan sektor tersebut tumbuh lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sektor lainnya memiliki nilai negatif (-), sektor-sektor tersebut diantaranya sektor pertanian (-56.966,78), sektor pertambangan dan pengggalian (-7.911,65), sektor industri pengolahan (-13.740,09), sektor listrik, gas dan air bersih (-1.158,14), sektor kontruksi (-313,64) serta sektor jasa-jasa (-19.973,85). Sektor-sektor tersebut pertumbuhannya lebih lambat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur.

c) *Differential Shift (Competitive Position)*

Komponen *Differential Shift* atau yang biasa disebut dengan *competitive position* merupakan komponen untuk mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat didaerah Kabupaten Tulungagung daripada tingkat nasional yaitu Provinsi Jawa Timur yang disebabkan oleh faktor-faktor *lokasional intern* (Tarigan,2012:86-87). *Differential Shift* juga digunakan untuk menentukan seberapa jauh daya saing sektor ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung dengan perekonomian yang dijadikan sebagai daerah referensi yaitu Provinsi Jawa Timur (Arsyad,2010:390). Pada komponen ini jika *differential shift* bernilai positif (+) maka sektor *i* lebih kompetitif di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jika bernilai negatif (-), maka sektor *i* lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan tabel 41, pada tahun 2011-2012 sektor yang memiliki nilai *differential shift* positif (+) yaitu sektor pertambangan dan penggalian (2.327,88) , sektor industri pengolahan (8.709,94) serta sektor jasa-jasa (1.484,39). Sektor tersebut memiliki nilai *differential shift* positif yang artinya sektor tersebut lebih kompetitif atau memiliki daya saing sektor ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sektor-sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sektor lainnya memiliki nilai *differential shift* negatif (-) antara lain sektor pertanian (-809,90), sektor listrik, gas dan air bersih (-6.077,23), sektor konstruksi (-571,30) , sektor perdagangan, hotel dan restoran (-10.702,87) , sektor pengangkutan dan komunikasi (-6.350,74), serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (-10.494,70). Sektor-sektor tersebut memiliki nilai negatif yang berarti bahwa sektor tersebut pertumbuhannya lambat sehingga lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan di Kabupaten Tulungagung.

Kemudian komponen *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. PS merupakan akibat pengaruh unsur-unsur eksternal yang bekerja secara nasional yaitu Provinsi Jawa Timur, sedangkan DS adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah Kabupaten Tulungagung (Glasson, 1977 dalam Fachrurrazy, 2002:52). Dari kedua komponen tersebut (PS dan DS) dapat dinyatakan dalam suatu kuadran yang akan diperoleh empat kategori posisi

relatif dari seluruh sektor ekonomi tersebut. Keempat kategori dapat digambarkan pada kuadran berikut ini :

Gambar 9 Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS
Sumber: Data Diolah dari Tabel 41

Berdasarkan gambar 9 bahwa posisi relatif suatu sektor ekonomi berdasarkan nilai *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) pada tahun 2011-2012 dapat diperjelas sebagai berikut ini:

a) Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah sektor dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan dijadikan sebagai sektor unggulan yang mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Namun pada tahun 2011-2012 tidak ada sektor yang termasuk dalam kategori ini.

b) Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang terhambat namun produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan daerah lain atau dengan kata lain dapat dikembangkan. Terdapat tiga sektor yang termasuk dalam kategori ini yaitu sektor pertambangan dan penggalian (PS = -7.911,65 dan DS = 2.327,88) , sektor industri pengolahan (PS = -13.740,09 dan DS = 8.709,94) serta sektor jasa-jasa (PS = -19.973,85 dan DS = 1.484,39).

c) Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan cepat tetapi tidak kompetitif. Sektor yang termasuk dalam kategori ini merupakan sektor unggulan tetapi produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Adapun sektor yang termasuk kategori ini adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (PS = 75.878,27 dan DS = -10.702,87) , sektor pengangkutan dan komunikasi (PS= 10.562,72 dan DS = -6.350,74) serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (PS = 6.561,08 dan DS = -10.494,70).

d) Kategori IV (PS negatif dan DS negatif)) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang lambat dan juga memiliki daya saing lemah atau tidak kompetitif sehingga sektor tersebut relatif tertinggal. Sektor yang termasuk dalam kategori ini yaitu sektor pertanian (PS = -56.966,78 dan DS = -809,90) , sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai (PS = -1.158,14 dan DS = -6.077,23) dan sektor kontruksi dengan nilai (PS = -313,64 dan DS = -571,30). Sektor tersebut merupakan sektor yang bukan unggulan dan tidak mampu bersaing dengan daerah lain.

3) Analisis *Tipologi Klassen* Tahun 2011-2012

Dengan melakukan perbandingan rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata kontribusi sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung dengan Provinsi Jawa Timur maka dapat diketahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan berdasarkan sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Selain itu juga dapat mengetahui klasifikasi sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Maka, berikut ini rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur:

Tabel 42 Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2012

No	Sektor	Provinsi Jawa Timur		Kabupaten Tulungagung	
		Rata-rata Laju Pertumbuhan (S)	Rata-rata Kontribusi PDRB (Sk)	Rata-rata Laju Pertumbuhan (Si)	Rata-rata Kontribusi PDRB (Ski)
1	Pertanian	3,01	14,09	3,00	17,72
2	Pertambangan dan Penggalian	4,09	2,19	4,18	1,80
3	Industri Pengolahan	6,20	25,01	6,90	17,71
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	6,23	1,34	6,08	1,31
5	Konstruksi	8,09	3,27	6,79	1,71
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	9,94	32,20	9,55	33,01
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10,55	7,70	9,55	5,35
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,10	5,52	6,42	10,66
9	Jasa-jasa	5,08	8,70	5,13	10,77

Sumber : Hasil Perhitungan

Berdasarkan tabel bahwa di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011-2012 memiliki rata-rata kontribusi yang paling besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (33,01%), sedangkan yang paling kecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih (1,31%). Adapun dua sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi dengan nilai yang sama adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi (9,55%). Selanjutnya pada Provinsi Jawa Timur sektor yang memiliki rata-rata kontribusi paling besar dan yang paling kecil sama dengan di Kabupaten Tulungagung yaitu sektor

perdagangan, hotel dan restoran (32,20%) dan sektor listrik, gas dan air bersih (1,34%). Sedangkan sektor yang rata-rata pertumbuhan paling tinggi dan yang paling rendah yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi (10,55%) dan sektor pertanian (3,01%).

Dari data pada tabel 42 digunakan untuk menganalisis klasifikasi sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2012 berdasarkan analisis *tipologi klassen* yaitu:

Tabel 43 Klasifikasi Sektor PDRB menurut *Tipologi Klassen* Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2012

Kuadran I	**Kuadran II**
Sektor maju dan tumbuh dengan pesat *(developed sector)* Si > S dan Ski > Sk a. Sektor Jasa-jasa	Sektor maju tapi tertekan *(stagnant sector)* Si < S dan Ski > Sk a. Sektor Pertanian b. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran c. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Kuadran III	**Kuadran IV**
sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat *(developing sector)* Si > S dan Ski < Sk a. Sektor Pertambangan dan penggalian b. Sektor Industri Pengolahan	sektor relatif tertinggal *(underdeveloped sector)* Si < S dan Ski < Sk a. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih b. Sektor Konstruksi c. Sektor Pengangkutan dan komunikasi

Sumber : Data diolah dari Tabel 42

Sesuai dengan hasil analisis tabel , berikut ini sektor yang tergolong dalam sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat adalah sektor jasa-jasa. Sedangkan, untuk sektor yang tergolong dalam sektor maju tetapi tertekan adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan. Selain itu, yang tergolong sektor potensial atau masih dapat berkembang adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan. Pada sektor listrik, gas dan air bersih , sektor konstruksi, serta sektor pengangkutan dan komunikasi termasuk pada sektor yang relatif tertinggal. Dimana sektor yang ada di Kabupaten Tulungagung ini memiliki rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi PDRB yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur.

e. Sektor Unggulan dan Daya Saing di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012

Setelah melakukan analisis *Location Quotien* (LQ), *Shift Share* dan *Tipologi Klassen* tiap tahunnya maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah dengan menghitung dan menganalisis rata-rata selama kurun waktu 5 tahun (2008-2012) analisis. Dari hasil jumlah rata-rata selama 5 tahun tersebut maka dapat memberikan kesimpulan sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan dan daya saing sektor daerah Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, berikut ini hasil rata-rata perhitungan *Location Quotient, Shift Share* dan *Tipologi Klassen* selama tahun 2008-2012 di Kabupaten Tulungagung:

1) Rata-rata Analisis *Location Quotient* (LQ) Tahun 2008-2012

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan alat untuk mengetahui sektor mana yang menjadi sektor unggulan dan bukan sektor unggulan pada daerah Kabupaten Tulungagung, dengan membandingkan nilai PDRB Kabupaten Tulungagung dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2012. Dari hasil perhitungan tersebut maka akan menghasilkan nilai LQ, jika memiliki nilai **LQ>1**

berarti sektor tersebut termasuk sektor unggulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah Kabupaten Tulunggagung dan menjadi kekuatan daerah untuk mengekspor produknya ke luar daerah. Sedangkan jika **LQ<1** maka sektor tersebut bukan sektor unggulan sehingga sektor tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan daerah Kabupaten Tulungagung dan menjadi pengimpor. Sedangkan jika **LQ=1** maka sektor tersebut cenderung tertutup karena tidak melakukan transaksi baik keluar maupun kedalam daerah tersebut. Oleh karena itu, berikut ini hasil perhitungan jumlah rata-rata LQ di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2008-2012:

Tabel 44 Rata-rata Hasil Perhitungan Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012

No.	Sektor	Hasil Perhitungan LQ					Rata-rata	Peringkat
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	Pertanian	1,27	1,25	1,25	1,26	1,26	1,26	2
2	Pertambangan dan Penggalian	0,88	0,86	0,82	0,82	0,83	0,84	6
3	Industri Pengolahan	0,67	0,68	0,70	0,70	0,71	0,69	8
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,97	0,98	0,97	0,97	0,92	0,96	5
5	Konstruksi	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,53	9
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,03	1,04	1,02	1,03	1,02	1,03	4
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,71	0,69	0,70	0,70	0,69	0,70	7
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,01	1,99	1,97	1,94	1,92	1,97	1
9	Jasa-jasa	1,23	1,22	1,23	1,23	1,24	1,23	3

Sumber : Hasil Perhitungan

Berdasarkan pada tabel 44, dapat dilihat bahwa dari tahun 2008-2012 diketahui sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan (basis) atau bukan sektor unggulan (non basis) di Kabupaten Tulungagung. Selama lima tahun analisis, Kabupaten Tulungagung memiliki empat sektor unggulan dan dengan nilai rata-rata LQ selama 5 tahun yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1,97), sektor pertanian (1,26), sektor jasa-jasa (1,23), serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,03). Keempat sektor tersebut dapat mengekspor hasil

produksinya ke daerah lain, serta dapat memenuhi kebutuhan wilayah Kabupaten Tulungagung. Selama kurun waktu 5 tahun, sektor-sektor tersebut mampu memberikan nilai kontribusi yang sangat besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Tulungagung, sehingga sektor-sektor tersebut dapat menjadi sektor andalan untuk meningkatkan nilai PDRB Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, keempat sektor unggulan tersebut harus lebih ditingkatkan agar dapat mendorong sektor lainnya yang belum menjadi sektor unggulan.

Dari hasil perhitungan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), berdasarkan pada tabel 44 rata-rata hasil LQ dari tahun 2008-2012 sektor yang memberikan kontribusi paling besar adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,97. Sektor ini menjadi salah satu dari empat sektor unggulan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung. Dari nilai tersebut menunjukan bahwa sektor ini merupakan sektor yang dapat diandalkan dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena telah mampu memenuhi kebutuhan Kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya sektor unggulan yang kedua di Kabupaten Tulungagung adalah sektor pertanian. Jika dilihat pada tabel 44, sektor pertanian memiliki jumlah rata-rata hasil LQ selama tahun 2008-2012 sebesar 1,26 sehingga sektor tersebut merupakan sektor unggulan. Sektor ini merupakan sektor primer yang menghasilkan bahan baku pangan, bahan baku industri dan sumber energi. Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten

Tulungagung, mengingat bahwa Kabupaten Tulungagung merupakan daerah agraris. Pada sektor pertanian tidak hanya unggul di bidang pertanian saja melainkan juga pada bidang peternakan yang merupakan subsektor yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi. Perlu ketahui bahwa subsektor peternakan merupakan subsektor unggulan yang telah mampu memenuhi permintaan kebutuhan Kabupaten Tulungagung.

Sektor unggulan lainnya adalah sektor jasa-jasa dengan jumlah nilai rata-rata LQ sebesar 1,23. Dapat dilihat bahwa mulai tahun 2008-2012 sektor jasa-jasa ini memberikan peningkatan kontribusi terhadap PDRB. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Tulungagung telah memiliki potensi pariwisata yang secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap sektor jasa-jasa. Beberapa potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung ini seperti obyek wisata pantai popoh dan sekitarnya, waduk wonorejo, serta obyek wisata alam dan wisata budaya lainnya. Potensi pariwisata yang secara tidak langsung memberikan kontribusi pada sektor jasa-jasa, dapat mendatangkan banyak wisatawan di Kabupaten Tulungagung sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi sektor tersebut.

Keberadaan sektor pertanian dan jasa-jasa sebagai sektor unggulan maka secara tidak langsung berdampak pula pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor unggulan terakhir dengan jumlah nilai rata-rata LQ sebesar 1,03. Adapun keterkaitan dengan banyaknya akan kebutuhan masyarakat pada komoditi pertanian, peternakan, perkebunan dan sebagainya berpengaruh pula pada jumlah komoditi

yang diperdagangkan di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, banyaknya wisatawan yang datang di Kabupaten Tulungagung sehingga membutuhkan penginapan serta jasa penunjang lainnya berupa hotel dan restoran untuk dapat menikmati keindahan serta memenuhi konsumsi wisatawan yang datang di Kabupaten Tulunggagung. Antara sektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Tulungagung ini memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan lainnya.

Selain itu, untuk sektor bukan unggulan (non basis) selama tahun 2008-2012 adalah sektor yang memiliki nilai LQ<1. Sektor yang merupakan bukan sektor unggulan (non basis) dan dengan jumlah nilai rata-rata LQ selama 5 tahuan yaitu sektor pertambangan dan penggalian (0,84) , sektor industri pengolahan (0,69) , sektor listrik, gas dan air bersih (0,97) , sektor konstruksi (0,53) , sektor pengangkutan dan komunikasi (0,70). Dari kelima sektor tersebut merupakan bukan sektor unggulan dimana sektor ini belum mampu untuk mencukupi kebutuhan yang ada di Kabupaten Tulungagung, sehingga sektor-sektor tersebut cenderung melakukan impor dari daerah lain untuk dapat memenuhi kebutuhan di Kabupaten Tulungagung. Hal ini diakibatkan banyaknya akan permintaan dan keterbatasan produksi dari sektor-sektor tersebut sehingga membuat pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung melakukan impor dari daerah lain untuk dapat memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat. Perlunya perhatian khusus bagi sektor-sektor non basis tersebut dari pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung agar sektor-sektor tersebut mampu menjadi sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung.

Hasil dari analisis *Location Quotient* (LQ) ini dapat digunakan bagi pemerintah daerah untuk dapat merencanakan wilayah Kabupaten Tulungagung dimasa depan. Pentingnya suatu proses perencanaan bagi suatu daerah untuk dapat mengarahkan Kabupaten Tulungagung agar menjadi daerah yang lebih baik. Pada proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung untuk mencapai suatu yang diinginkan dimasa depan, maka diperlukannya pertimbangan kejadian di masa lampau dan melihat kejadian saat ini yaitu dengan melihat sektor ekonomi serta kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu 5 tahun analisis yaitu dari tahun 2008-2012. Dengan demikian dapat diperkirakan sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan dan bukan sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung.

Hasil dari analisis LQ juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sebagai bahan informasi pada tahapan dalam pengumpulan dan analisis data guna membentuk suatu perencanaan yang ideal seperti yang dikemukakan oleh Bendavid-Val dalam Kuncoro (2004:50). Walaupun pada tahapan pengumpulan data dan analisis data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan secara keseluruhan, akan tetapi secara terus menerus pengumpulan dan analisis data ini berfungsi untuk mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan.

2) Rata-rata Analisis *Shift Share* Tahun 2008-2012

Setelah melakukan analisis *shift share* secara partial (pertahun) maka selanjutnya menghitung hasil rata-rata dari 5 tahun analisis (2008-2012). Berikut

ini hasil perhitungan *shift share* dan posisi pergeseran dari masing-masing sektor di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008-2012 sebagai berikut:

Tabel 45 Rata-rata Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share* Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012

No	Sektor	National Share	Proportional Shift	Differential Shift	Urutan	Shift Share
1	Pertanian	95.203,30	-51.180,03	-1.680,02	5	42.343,25
2	Pertambangan dan Penggalian	9.402,82	-889,69	-2.065,96	7	6.447,17
3	Industri Pengolahan	88.983,29	-21.884,51	21.513,42	1	88.612,20
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	6.644,52	-1.134,34	-1.316,56	3	4.193,62
5	Konstruksi	8.637,57	312,62	-1.350,80	4	7.599,39
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	159.003,69	60.851,72	-1.957,47	6	217.897,95
7	Pengangkutan dan Komunikasi	25.379,49	16.383,38	-2.505,81	8	39.257,06
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	54.076,35	5.387,13	-9.953,84	9	49.509,64
9	Jasa-jasa	55.542,20	-12.970,84	1.185,29	2	43.756,65
	Total	**502.873,23**	**-5.124,55**			**499.616,92**

Sumber : Hasil Perhitungan

Pada Tabel 45 menunjukan perkembangan pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung, dengan berdasarkan analisis dari masing-masing komponen berikut ini :

a) *National Share (N)*

Komponen *National Share* digunakan untuk mengukur apakah pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional Provinsi Jawa Timur (Tarigan,2012:86). Hasil dari perhitungan rata-rata *National Share* ini akan terlihat peranan wilayah Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tulungagung. Pada tabel 45 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi absolut Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008-2012 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung memiliki nilai 499.616,92 Juta Rupiah, sedangkan efek pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur lebih besar yaitu 502.873,23

Juta Rupiah. Hal tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya pengaruh bagi tiap sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Tulungagung, mendapatkan pengaruh yang positif dari efek pergeseran pertumbuhan Provinsi Jawa Timur. Pengaruh tersebut berkaitan dengan pertumbuhan absolut lebih besar di Kabupaten Tulungagung, yang menandakan peranan Kabupaten Tulungagung cukup besar dan peranan Provinsi Jawa Timur cukup kecil. Seperti yang terlihat pada tabel 46 bahwa di tahun 2008-2012 sektor yang memiliki peranan yang besar di Kabupaten Tulungagung adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 217.897,95 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 159.003,69 juta rupiah. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 39.257,06 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 25.379,49 juta rupiah. Selama tahun 2008-2012 hanya ada dua sektor yang menunjukan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur.

Pada sektor lain yang memiliki nilai pertumbuhan absolut di Kabupaten Tulungagung yang lebih kecil dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sektor tersebut antara lain (1) sektor pertanian yang berkontribusi sebesar 42.343,25 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 95.203,30 juta rupiah. (2) Sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 6.447,17 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur 9.402,82 juta rupiah. (3) Sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 88.612,20 juta rupiah, saat nilai di

Provinsi Jawa Timur sebesar 88.983,29 juta rupiah. (4) Sektor listrik, gas, dan air bersih berkontribusi sebesar 4.193,62 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 6.644,52 juta rupiah. (5) Sektor kontruksi berkontribusi sebesar 7.599,39 juta rupiah, saat nilai di Provinsi Jawa Timur sebesar 8.637,57 juta rupiah. (6) Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang berkontribusi sebesar 49.509,64 juta rupiah, saat di Provinsi Jawa Timur sebesar 54.076,35 juta rupiah. (7) Sektor jasa-jasa yang berkontribusi sebesar 43.756,65 juta rupiah, saat di Provinsi Jawa Timur sebesar 55.542,20 juta rupiah. Sektor-sektor tersebut dapat dikatakan bahwa peranan Provinsi Jawa Timur lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Tulungagung sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan Provinsi Jawa Timur.

b) *Proportional Shift (Industrial Mix)*

Komponen *Proportional Shift* atau yang biasa disebut dengan efek bauran industri *(industrial mix)* merupakan komponen yang mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di wilayah Kabupaten Tulungagung. (Tarigan, 2012:86). Dapat dikatakan bahwa pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian di Kabupaten Tulungagung terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding dengan perekonomian sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Pada komponen *proportional shift* ini jika bernilai positif (+) maka sektor *i* yang tumbuh lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya jika bernilai negatif (-) maka sektor *i* tumbuh lebih lambat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan di Provinsi Jawa Timur. Jika

dilihat secara keseluruhan pada tabel 45 bahwa efek bauran industri *(industrial mix)* Kabupaten Tulungagung terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur memiliki nilai yang negatif yaitu -5.124,55 yang artinya bahwa distribusi sektoral tidak memberikan dampak yang positif atau tidak mengalami kenaikan terhadap nilai PDRB Kabupaten Tulungagung karena mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur.

Jika dilihat menurut sektor dari tahun 2008-2012 di Kabupaten Tulungagung bahwa sektor yang memiliki nilai positif (+) adalah sektor kontruksi (312,62), sektor perdagangan, hotel dan restoran (60.851,72), sektor pengangkutan dan komunikasi (16.383,38), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (5.387,13). Dari keempat sektor tersebut memiliki nilai *proportional shift* positif (+) yang berarti bahwa laju pertumbuhan sektor tersebut tumbuh lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sektor lainnya memiliki nilai negatif (-), sektor-sektor tersebut diantaranya sektor pertanian (-51.180,03), sektor pertambangan dan pengggalian (-889,69), sektor industri pengolahan (-21.884,51), sektor listrik, gas dan air bersih (-1.134,34), serta sektor jasa-jasa (-12.970,84). Sektor-sektor tersebut pertumbuhannya lebih lambat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur.

c) *Differential Shift (Competitive Position)*

Komponen *Differential Shift* atau yang biasa disebut dengan *competitive position* merupakan komponen untuk mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau

lebih lambat didaerah Kabupaten Tulungagung daripada tingkat nasional yaitu Provinsi Jawa Timur yang disebabkan oleh faktor-faktor *lokasional intern* (Tarigan,2012:86-87). *Differential Shift* juga digunakan untuk menentukan seberapa jauh daya saing sektor ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung dengan perekonomian yang dijadikan sebagai daerah referensi yaitu Provinsi Jawa Timur (Arsyad,2010:390). Pada komponen ini jika *differential shift* bernilai positif (+) maka sektor *i* lebih kompetitif di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jika bernilai negatif (-), maka sektor *i* lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan tabel 45, hasil rata-rata analisis *shift share* dari tahun 2008-2012 bahwa sektor yang memiliki nilai *differential shift* positif (+) yaitu sektor industri pengolahan (21.513,42) serta sektor jasa-jasa (1.185,29). Sektor tersebut memiliki nilai *differential shift* positif yang artinya sektor tersebut lebih kompetitif atau memiliki daya saing sektor ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Sektor-sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sektor lainnya memiliki nilai *differential shift* negatif (-) antara lain sektor pertanian (-1.680,02), sektor pertambangan dan penggalian (-2.065,96), sektor listrik, gas dan air bersih (-1.316,56), sektor konstruksi (-1.350,80) , sektor perdagangan, hotel dan restoran (-1.957,47) ,sektor pengangkutan dan komunikasi (-2.505,81), serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (-9.953,84).

Sektor-sektor tersebut memiliki nilai negatif yang berarti bahwa sektor tersebut pertumbuhannya lambat sehingga lebih kompetitif di Provinsi Jawa Timur dibandingkan di Kabupaten Tulungagung.

Kemudian komponen *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. PS merupakan akibat pengaruh unsur-unsur eksternal yang bekerja secara nasional yaitu Provinsi Jawa Timur, sedangkan DS adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah Kabupaten Tulungagung (Glasson, 1977 dalam Fachrurrazy, 2002:52). Dari kedua komponen tersebut (PS dan DS) dapat dinyatakan dalam suatu kuadran yang akan diperoleh empat kategori posisi relatif dari seluruh sektor ekonomi tersebut. Keempat kategori dapat digambarkan pada kuadran berikut ini :

Gambar 10 Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS
Sumber: Data Diolah dari Tabel 45

Berdasarkan pada gambar 10 bahwa posisi relatif suatu sektor ekonomi berdasarkan nilai *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) dari tahun 2008-2012 dapat diperjelas sebagai berikut ini:

a) Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah sektor dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan dijadikan sebagai sektor unggulan yang mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Namun pada tahun 2008-2012 tidak ada sektor yang termasuk dalam kategori ini.

b) Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang terhambat namun produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan daerah lain atau dengan kata lain dapat dikembangkan. Terdapat dua sektor yang termasuk dalam kategori ini yaitu sektor industri pengolahan (PS = -21.884,51 dan DS = 21.513,42) dan sektor jasa-jasa (PS = -12.970,84 dan DS = 1.185,29).

c) Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan cepat tetapi tidak kompetitif. Sektor yang termasuk dalam kategori ini merupakan sektor unggulan tetapi produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Adapun sektor yang termasuk kategori ini adalah sektor kontruksi (PS = 312,62 dan DS = -1.350,80) , sektor perdagangan, hotel dan restoran (PS = 60.851,72 dan DS = -1.957,47) , sektor pengangkutan dan komunikasi (PS= 16.383,38 dan DS = -2.505,81) serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (PS = 5.387,13 dan DS = -9.953,84).

d) Kategori IV (PS negatif dan DS negatif) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang lambat dan juga memiliki daya saing lemah atau tidak kompetitif sehingga sektor tersebut relatif tertinggal. Sektor yang termasuk dalam kategori ini yaitu sektor pertanian dengan nilai (PS = -51.180,03 dan DS = -1.680,02) , sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai (PS = -889,69 dan DS = -2.065,96) serta sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai (PS = -1.134,34 dan DS = -1.316,56). Sektor tersebut merupakan sektor yang bukan unggulan dan tidak mampu bersaing dengan daerah lain.

Berdasarkan pada gambar 10 yang merupakan hasil analisis komponen dari *shift share* di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2008-2012 bahwa sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa merupakan sektor kompetitif yang dapat bersaing dengan daerah lain, namun sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dapat menjadikan sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa menjadi sektor yang dapat disaingkan dengan daerah lain. Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung bahwa potensi pengembangan wilayah lebih mengarah pada kawasan industri, kawasan pariwisata serta kawasan pemukiman. Hal tersebut sudah sesuai dengan rencana pengembangan wilayah yang berdasarkan pada sektor yang berdaya saing.

3) Rata-rata Analisis *Tipologi Klassen* Tahun 2008-2012

Sebelum melakukan analisis *tipologi klassen* di Kabupaten Tulungagung, maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan melihat rata-rata pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung dengan membandingkan terhadap rata-rata pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu yang sama dari tahun 2008-2012. Analisis *tipologi klassen* ini dapat mengetahui pengelompokkan sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung berdasarkan struktur pertumbuhannya. Dengan menggunakan *matrix klassen* maka dapat diketahui empat pengelompokkan sektor dengan memanfaatkan laju pertumbuhan dan nilai kontribusi dari masing-masing sektor. Oleh karena itu, berikut ini disajikan data rata-rata pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi baik tingkat Kabupaten Tulungagung maupun Provinsi Jawa Timur:

Tabel 46 Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Konstribusi Sektor PDRB Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012

No	Sektor	Provinsi Jawa Timur		Kabupaten Tulungagung	
		Rata-rata Laju Pertumbuhan (S)	Rata-rata Kontribusi PDRB (Sk)	Rata-rata Laju Pertumbuhan (Si)	Rata-rata Kontribusi PDRB (Ski)
1	Pertanian	3,06	14,93	3,03	18,74
2	Pertambangan dan Penggalian	6,72	2,20	4,49	1,85
3	Industri Pengolahan	4,78	25,58	6,31	17,70
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4,92	1,36	6,54	1,32
5	Konstruksi	5,95	3,24	5,44	1,72
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	8,84	31,02	8,69	32,08
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10,62	7,28	10,62	5,07
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,36	5,46	5,83	10,75
9	Jasa-jasa	5,31	8,93	5,21	10,99

Sumber : Hasil Perhitungan

Pada tabel 46 terlihat bahwa sektor yang memiliki rata-rata kontribusi paling besar di Kabupaten Tulungagung yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran (32,08%) lalu diikuti sektor pertanian (18,74%). Sedangkan sektor yang

memiliki rata-rata kontribusi paling kecil diantara sektor ekonomi lainnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih (1,32%). Disisi lain, sektor yang rata-rata pertumbuhannya paling tinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (10,62%) dan yang palin rendah adalah sektor pertanian (3,03%).

Selanjutnya di Provinsi Jawa Timur rata-rata kontribusi sektor yang paling besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (31,02%) lalu diikuti sektor industri pengolahan (25,58%). Sementara sektor yang memiliki rata-rata kontribusi paling rendah sama seperti di Kabupaten Tulungagung yaitu sektor listrik, gas dan air bersih (1,36%). Untuk rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi (10,62%) dan yang paling rendah adalah sektor pertanian (3,06%).

Berdasarkan data pada tabel 46 mengenai rata-rata perbandingan antara kontribusi sektor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, maka data tersebut akan digunakan untuk menganalisis klasifikasi sektor perekonomian wilayah dengan menggunakan analisis *tipologi klassen* sebagai berikut:

Tabel 47 Klasifikasi Sektor PDRB menurut *Tipologi Klassen* Tahun 2008-2012

Kuadran I	**Kuadran II**
Sektor maju dan tumbuh dengan pesat *(developed sector)* Si > S dan Ski > Sk	Sektor maju tapi tertekan *(stagnant sector)* Si < S dan Ski > Sk a. Sektor Pertanian b. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran c. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan d. Sektor Jasa-jasa

Kuadran III	Kuadran IV
sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat *(developing sector)* Si > S dan Ski < Sk a. Sektor Industri Pengolahan b. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	sektor relatif tertinggal *(underdeveloped sector)* Si < S dan Ski < Sk a. Sektor Pertambangan dan Penggalian b. Sektor Konstruksi c. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sumber : Data diolah dari Tabel 46

Berdasarkan klasifikasi sektor ekonomi PDRB menurut hasil analisis *Tipologi Klassen* sesuai pada tabel 47 bahwa selama kurun waktu 5 tahun (2008-2012) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Sektor maju tapi tertekan

Sektor yang termasuk sektor maju tapi tertekan yaitu (1) sektor pertanian, (2) sektor perdagangan, hotel dan restoran (3) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (4) sektor jasa-jasa. Sektor tersebut memiliki nilai rata-rata kontribusi yang lebih besar jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, tetapi untuk rata-rata pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur. Sebagai sektor maju keempat sektor tersebut perlu untuk dikembangkan dengan meningkatkan laju pertumbuhan dari masing-masing sektor tersebut sehingga laju pertumbuhan keempat sektor tersebut lebih capat dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur. Potensi sektor pertanian yang merupakan sektor yang diunggulkan di tulungagung memiliki subsektor yang dapat dijadikan sebgaai subsektor unggulan yaitu subsektor peternakan. Dimana subsektor tersebut

memberikan kontribusi dan pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya.

Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi PDRB lebih besar dibandingkan di Provinsi Jawa Timur. Banyaknya kontribusi tersebut ditandai dengan semakin banyaknya pasar baik pasar tradisional maupun modern dan fasilitas perdagangannya lainnya. Untuk hotel dan restoran ditandai dengan bertambahnya wisatawan yang datang sehingga membutuhkan penginapan dan restoran selama berada di Kabupaten Tulungagung. Semakin bertambahnya jumlah rumah makan di Kabupaten Tulungagung ini membuat sektor tersebut memberikan kontribusi yang lebih besar. Untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ini didukung dengan adanya perkembangan jumlah bank, pegadaian serta koperasi. Selain itu, sektor jasa-jasa yang termasuk sektor maju tapi tertekan memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan di Provinsi Jawa Timur. Namun sangat disayangkan dari keempat sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang lebih lambat daripada di Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan dari masing-masing sektor tersebut sehingga dapat menjadi sektor maju dan tumbuh pesat.

b) Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat

Sektor potensial dan dapat dikembangkan adalah sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Dimana sektor tersebut memiliki rata-rata laju pertumbuhan yang lebih tinggi dan rata-rata kontribusi

sektor PDRB yang lebih sedikit dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Pada sektor industri pengolahan ini ditandai dengan semakin banyaknya industri di Kabupaten Tulungagung, baik industri kecil maupun industri menengah. Banyak hasil industri dari sektor primer yang kemudian dijadikan sebagai produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Tulungagung. Di Kabupaten Tulungagung sendiri memiliki potensi yang cukup banyak yang tersebar pada masing-masing kecamatan, diantaranya industri tekstil, industri kerajinan marmer, industri agro, industri hasil hutan, serta industri makanan dan minuman. Banyaknya industri yang tersebar di wilayah Kabupaten Tulungagung ini membuat pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan di Provinsi Jawa Timur. Sementara sektor listrik, gas dan air bersih didukung dengan semakin banyaknya jumlah bangunan yang sudah tersedia fasilitas dari sektor sekunder tersebut yang semakin ke depan menjadi sektor primer. Kedua sektor tersebut menjadi sektor yang berpotensi untuk kedepannya jika pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dapat mengembangkannya.

c) Sektor relatif tertinggal

Sektor yang termasuk relatif tertinggal sehingga sulit untuk dijadikan sektor unggulan dan disaingkan adalah (1) sektor pertambangan dan penggalian, (2) sektor konstruksi (3) sektor pengangkutan dan komunikasi. Pembangunan sektor tambang yang diarahkan untuk dapat menghasilkan bahan tambang sebagai bahan baku industri ini diupayakan untuk menghasilkan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja. Dari pembangunan sektor tersebut maka harus membawa manfaat bagi pengembangan wilayah,

pembangunan daerah dan peningkatan taraf hidup rakyat. Namun sayangnya, sumber-sumber tambang dan galian masih sedikit dan komoditinya masih terbatas jumlahnya di Kabupaten Tulungagung sehingga akan sulit untuk dapat mengembangkan sektor tersebut. Dari ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi PDRB dan laju perumbuhan yang lebih kecil dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil analisis *tipologi klassen* tersebut bahwa Kabupaten Tulungagung dapat mengembangkan wilayahnya sehingga menjadi daerah yang maju dengan cara meningkatkan pendapatan per kapitanya. Selain itu, kegiatan utama masyarakat seharusnya lebih mengarah pada sektor industri dan jasa. Kedua sektor tersebut dapat dijadikan sebagai sektor unggulan dan berdaya saing jika Kabupaten Tulungagung ingin menjadi daerah maju. Sedangkan untuk sektor primer yaitu sektor pertanian dan pertambangan diarahkan dengan cara dikembangkan melalui teknologi yang canggih dengan memanfaatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki di Kabupaten Tulungagung, sehingga akan menghasilkan produk yang berkualitas dan tentunya hal ini akan lebih produktif. Suatu daerah dikatakan maju ditentukan oleh sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki di Kabupaten tersebut. Sumberdaya manusia yang dimiliki dapat memanfaatkan teknologi modern yang telah ada dalam upaya pengolahan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga memenuhi kebutuhan yang akan datang.

Namun sayangnya, dari hasil analisis klasifikasi *Tipologi Klassen* selama 5 tahun (2008-2012) di Kabupaten Tulungagung untuk sektor industri pengolahan

berada pada posisi sektor potensial dan sektor jasa-jasa pada posisi klasifikasi sektor maju tapi tertekan. Dengan demikian, sektor yang dianggap maju dan berpotensi tersebut dapat ditingkatkan baik jumlah kontribusi PDRB nya dan juga laju pertumbuhannya sehingga sektor tersebut dapat dijadikan sektor maju dan tumbuh dengan pesat.

2. Pengembangan Sektor Unggulan dan Daya Saing Daerah Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung

Suatu keberhasilan pembangunan ekonomi daerah ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan suatu daerah serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dengan melalui pembangunan yang seimbang antara pembangunan sektoral dengan pengembangan wilayah yang efektif dan efisien guna tercapainya pembangunan yang merata. Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah harus mengarah pada kebijakan yang mengupayakan prioritas pembangunan pada potensi ekonomi daerah yang dimiliki, guna memanfaatkan sumberdaya yang ada pada daerah tersebut.

Dalam pengembangannya, potensi ekonomi daerah tidak bisa terlepas dari peran pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Oleh sebab itu, pentingnya peran pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan. Seperti yang diungkapkan oleh Tarigan (2012:5) hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar pembangunan menjadi lebih baik

diantaranya dengan menetapkan sektor unggulan daerah serta membuat keterkaitan antar sektor yang lebih baik dalam suatu wilayah sehingga akan berkesinambungan satu sama lain. Pembangunan ekonomi daerah dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri dan membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah guna mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung perlu untuk mengetahui sektor mana yang mendapatkan anggaran yang lebih maupun sektor yang tidak atau belum terlalu *urgent* untuk mendapatkan prioritas anggaran.

Dari hasil analisis pada rumusan masalah pertama diketahui sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan dan daya saing daerah Kabupaten Tulungagung kedepannya. Analisis tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sebagai informasi dalam pengumpulan dan analisis data untuk merencanakan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung. Walaupun pada tahapan pengumpulan dan analisis data ini bukan merupakan tahapan dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi analisis ini memberikan fungsi secara terus menerus dalam mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan.

Selama 5 (lima) tahun analisis yaitu berdasarkan data hasil rata-rata dari tahun 2008-2012 bahwa terdapat 4 (empat) sektor unggulan dari hasil analisis *Location Quotient* (LQ) yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Keempat sektor tersebut memiliki nilai LQ>1 yang berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor ungggulan dibandingkan dengan sektor lainnya. Sementara itu, hasil analisis *Shift-Share* yang merupakan daya saing sektor ekonomi Kabupaten Tulungagung adalah sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Sedangkan hasil analisis *Tipologi Klassen* yang dapat mengelompokkan sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung berdasarkan struktur pertumbuhannya adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Disisi lain, dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara bahwa selama ini Kabupaten Tulungagung memiliki tiga sektor unggulan dan daya saing sektor ekonomi yang berdasarkan pada sektor ekonomi PDRB, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan. Sementara berdasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung sektor yang diunggulkan yang mengarah pada pengembangan UMKM, sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan. Selain itu, sektor pariwisata juga termasuk dalam sektor yang diunggulkan berdasarkan potensi wilayahnya. Sektor pariwisata yang berkontribusi cukup banyak terhadap PDRB pada sektor jasa-jasa.

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan dapat dikatakan bahwa sektor unggulan dan daya saing di Kabupaten Tulungagung dalam rencana pengembangannya sudah hampir sesuai. Hanya saja ada salah satu sektor yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang belum mendapatkan prioritas dalam pengembangannya. Jika pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung menetapkan sektor tersebut sebagai sektor unggulan dan mengembangkan untuk kedepannya, maka dapat diperkirakan pendapatan sektor tersebut juga akan meningkat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa antara sektor yang satu dengan yang lainnya berdasarkan PDRB memiliki keterkaitan.

Dari hasil perhitungan dari tiga metode analisis pada rumusan masalah pertama, sektor yang menunjukan sektor unggulan dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi adalah sektor jasa-jasa. Jika pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dapat menginvestasikan anggaran yang lebih pada sektor ini, dan mengembangkan potensinya secara maksimal maka akan meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut serta dapat bersaing dengan daerah lainnya. Selain itu, jika pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung juga mengembangkan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan maka secara tidak langsung sektor tersebut akan memberikan pengaruh pula pada sektor ekonomi PDRB lainnya.

Pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran juga termasuk sektor yang diunggulkan dan didaya saingkan. Banyaknya hasil industri yang dihasilkan di Kabupaten Tulungagung sudah dikembangkan dan bersaing dengan sektor yang sama di luar daerah Kabupaten Tulungagung. Dari hasil perhitungan dan analisis yang peneliti lakukan, bahwa sudah sesuainya

misi dan arah pembangunan baik pada RPJPD maupun RPJMD untuk memberikan prioritas program dan mengembangkannya sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dapat mengembangkan sektor-sektor yang dijadikan sektor unggulan dan daya saing sebagai upaya untuk mengembangkan wilayah Kabupaten Tulungagung. Menurut Susantono (2009:1) mengungkapkan bahwa dalam pembangunan ekonomi daerah antara pengembangan wilayah dengan pengembangan sektoral harus saling melengkapi. Pengembangan wilayah tidak mungkin akan terwujud jika tidak ada dukungan alokasi pembangunan sektoral. Sedangkan, pembangunan sektoral yang tidak berorientasi pada pengembangan wilayah maka akan mengalami tumpang tindih antarsektor dan tidak optimal dalam pengembangan sektor itu sendiri. Lebih lanjut, Sjafrizal (2008:234-248) menyatakan bahwa dalam melakukan strategi pembangunan ekonomi daerah terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

a) Berbasis pada Keuntungan Kompetitif Daerah.

Salah satu upaya dalam melakukan pembangunan ekonomi daerah yaitu lebih mengarah pada prinsip keuntungan kompetitif yang menerapkan pada unsur kreatifitas, teknologi dan kualitas masyarakat yang dikombinasikan menjadi suatu kegiatan usaha yang memiliki daya saing tinggi. Untuk dapat menerapkan konsep tersebut maka prioritas pembangunan harus diletakkan pada sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

bahwa Kabupaten Tulungagung sendiri belum menerapkan strategi yang berbasis pada keuntungan kompetitif daerah. Hal ini dikarenakan permasalahan pada kualitas dan pola fikir masyarakat yang kurang terbuka. Diketahui bahwa peran aktif masyarakat sangatlah mendukung dalam kesuksesan pembangunan daerah yang berbasis pada keuntungan kompetitif.

Kemudian dari hasil analisis dengan metode yang peneliti gunakan pada rumusan masalah pertama bahwa untuk beberapa tahun kedepan Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa sektor yang memiliki daya saing cukup tinggi yaitu sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Jika pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat menerapkan strategi ini dengan mengajak masyarakat setempat berkomunikasi melalui musyawarah serta memberikan pelatihan sehingga secara perlahan dapat mengubah sikap dan pola pikir masyarakat untuk terbuka. Strategi ini dapat menjadikan sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa di Kabupaten Tulungagung memiliki daya saing tinggi yang didukung oleh teknologi dan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sehingga produk yang dihasilkan dari sektor tersebut akan memiliki keuntungan kompetitif daerah. Hal tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung karena produk yang dihasilkan akan dapat menguasai pasar sehingga kegiatan produksi dapat berkembang dengan baik.

b) Pengembangan Komoditi Unggulan.

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif adalah pengembangan komoditi unggulan. Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung mendorong masing-masing daerah untuk

mengembangkan satu atau dua komoditi utama yang mempunyai potensi besar dan mempunyai daya saing tinggi sesuai dengan keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa di Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan komoditi unggulan yang mengarah pada keuntungan kompetitif masih dalam tahap rencana. Selama ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan di setiap daerah yang dianggap berpotensi. Namun dalam pengembangannya terdapat hambatan yaitu masalah infrastruktur yang kurang memadai. Maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan setiap desa atau kecamatan memiliki kawasan yang dapat mengembangkan sektor unggulan pada wilayah tersebut.

Beberapa sektor yang dapat diunggulkan dari hasil analisis dengan metode yang peneliti gunakan selama kurun waktu 5 tahun (2008-2012) bahwa sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa menjadi sektor yang dapat diunggulkan untuk bebrapa tahun kedepan. Melihat sektor-sektor tersebut memiliki potensi yang cukup tinggi, selain dari kontribusinya terhadap PDRB peranan sektor tersebut juga sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Selain itu, sektor tersebut dapat dijadikan sebagai sektor prioritas oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung agar dalam membuat kebijakan mengenai pengeluaran anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Selanjutnya pengembangan komoditi unggulan ini dapat tercipta jika wilayah Kabupaten Tulungagung memiliki kompetisi inti yang dapat dibedakan

dari wilayahnya. Seperti yang dikemukakan oleh Daryanto dan Hafizrianda (2010:18) kompetisi inti dapat dilakukan melalui upaya menciptakan berbagai faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan pesaingnya. Dalam konteks pengembangan wilayah, kompetisi inti ini merupakan upaya dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor yang berkembang di Kabupaten Tulungagung. Jika pemerintah daerah semakin baik dalam pengkoordinasian dan pengintegrasiannya maka wilayah lain akan sulit bersaing dengan Kabupaten Tulungagung.

c) Peningkatan Kemampuan Teknologi Daerah

Peningkatan kemampuan teknologi merupakan unsur penting untuk pengembangan ekonomi daerah yang berdasarkan pada konsep keuntungan kompetitif. Karena kemampuan teknologi merupakan unsur penting untuk dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi yang telah ada serta merangsang munculnya penemuan produk baru. Kedua hal tersebut merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing komoditi daerah. Kemajuan teknologi merupakan faktor penting bagi pengembangan ekonomi daerah. Dalam menghasilkan suatu produk, tentunya memerlukan suatu teknologi daerah yang dapat meningkatkan daya saing dari produk yang dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut, di Kabupaten Tulungagung sendiri juga sudah memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya. Hanya saja berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa belum meratanya pemanfaatan teknologi antara masyarakat kota dan desa. Kebanyakan masyarakat desa di Kabupaten Tulungagung beranggapan bahwa masih belum terlalu mendesak untuk menggunakan teknologi yang lebih modern,

karena mereka menganggap dengan fasilitas seadanya mereka tetap bisa menghasilkan produk dari sektor-sektor ekonomi.

Sedangkan sebagian masyarakat yang tinggal di kota bahwa peningkatan teknologi sangatlah diperlukan terutama dalam mengembangkan sektor unggulan yang dimiliki. Peningkatan kemampuan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sudah menerapkan pada masyarakat dengan cara memperkenalkan dan memberikan pelatihan. Dengan melakukan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat perajin dapat memanfaatkan dan menambah pengetahuan guna meningkatkan kemampuan mereka. Peningkatan pengembangan teknologi dapat mendorong masyarakat untuk melakukan inovasi baik dalam bentuk perbaikan produk yang sudah ada ataupun penciptaan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.

d) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Pengembangan kemampuan teknologi daerah hanya akan dimungkinkan jika kualitas sumberdaya manusia daerah sudah cukup tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia daerah merupakan hal yang penting dalam era otonomi daerah. Dalam hal ini, pengembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan dua program strategis yang sangat menentukan dan perlu terus dilanjutkan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan yang dilakukan akan lebih baik jika pendidikan yang didapatkan lebih bersifat ilmu terapan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian penyajian data bahwa sikap dan pola berfikir masyarakat Kabupaten Tulungagung yang masih sangat sulit untuk diubah. Sebenarnya kualitas yang dimiliki sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung cukup baik, namun mereka lebih memilih untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri (TKI dan TKW) dibandingkan mereka bekerja pada sektor pertanian atau industri. Sehingga diperlukannya peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk agar masyarakat Kabupaten Tulungagung dapat mengembangkan sektor unggulan yang dimiliki. Perlu diketahui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat penting untuk dilakukan, mengingat sumberdaya manusia merupakan pelaku pembangunan yang dapat mengembangkan sektor unggulan yang dimiliki untuk mendukung konsep keuntungan kompetitif daerah. Peran masyarakat sangat dominan sebagai pelaku yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan sektor unggulan dan mengupayakan untuk mendaya saingkan komoditi/sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini, peningkatan kualitas masyarakat sangat diperlukan maka pendidikan dan pelatihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat serta kualitas dan kuantitas komoditi yang dihasilkan. Hal tersebut tentunya betujuan untuk mendukung pembangunan pada bidang ekonomi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kompetensi usaha masyarakat. Selain itu juga, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja di daerah, maka tidak hanya peran masyarakat yang dominan melainkan peran pemerintah daerah dalam membentuk pola kerjasama secara nyata.

Peran pemerintah daerah yang lebih mengetahui sektor unggulan dan daya saing daerah Kabupaten Tulungagung serta kemampuan masyarakatnya lebih banyak berperan dalam memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai permintaan pasar. Selain itu, membantu memanfaatkan teknologi agar produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan lebih baik. Peran pemerintah daerah juga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan produk dari sektor unggulan agar lebih menarik serta yang terpenting memberikan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat untuk pengembangan produk yang dihasilkan. Adanya pemberian insentif serta penghargaan untuk masyarakat, sehingga membuat masyarakat untuk menciptakan dan pengembangkan produk lainnya menjadi inovatif dan kreatif. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung agar sikap dan pola pikir masyarakat dapat terbuka secara perlahan-lahan.

e) Pengembangan Kewirausahaan Daerah

Suatu daerah jika memiliki potensi pengembangan ekonomi yang cukup besar dan juga didukung dengan kualitas sumberdaya manusia serta teknologi produksi yang cukup baik, akan tetapi bila para pengusaha dan masyarakatnya tidak mempunyai kemampuan kewirausahaan yang cukup tinggi maka pengembangan kewirausahaan akan sulit untuk diwujudkan. Namun, pengembangan kewirausahaan daerah di Kabupaten Tulungagung ini sudah diterapkan oleh pemerintah daerah sejak lama. Mengingat kewirausahaan merupakan suatu kegiatan yang penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memanfaatkan komoditi/sektor unggulan guna mendayasaingkan

dengan daerah lain. Kabupaten Tulungagung pun sudah menerapkan pengembangan kewirausahaan sejak lama. Pengembangan kewirausahaan yang berbasis pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga sudah sesuai dengan misi pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.

Pengembangan kewirausahaan akan lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki semaksimal mungkin yang dapat menunjang kebijakan percepatan pengembangan sektor ekonomi dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain itu, pengembangan kewirausahaan daerah tentunya sangat berkaitan dengan potensi sumberdaya manusia yang tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berkaitan dengan bakat seseorang. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Tulungagung diupayakan untuk tidak hanya mengikuti pendidikan formal, tetapi juga dimulai dengan berwirausaha secara kecil-kecilan. Degan demikian, pembangunan ekonomi berbasis pada pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus terus dilakukan sebagai cara dalam pembinaan dan pengembangan kewirausahaan.

f) Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu

Pada era otonomi daerah, pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral berubah menjadi pendekatan wilayah. Menurut Susantono (2009:1) kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri

harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Salah satu bentuk pendekatan pengembangan wilayah adalah melalui pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Pengembangan kawasan ini didasarkan pada komoditi atau sektor unggulan yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Tulungagung. Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa pengembangan kawasan ekonomi terpadu ini sejauh ini sudah dilakukan namun masih belum maksimal dalam penerapannya. Sementara dalam dokumen RPJMD sudah merencanakan pada arah pembangunan untuk mengembangkan kawasan ekonomi terpadu yang dimulai melalui pengembangan sektor unggulan dan berorientasi pada sektor primer.

Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan jika dalam pembentukan kawasan pengembangan ekonomi terpadu belum maksimal, maka pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat terlebih dahulu melakukan pengembangan kawasan sentra produksi. Karena pembangunan kawasan sentra produksi ini memiliki skala yang lebih kecil dan biasanya didasarkan pada kegiatan pertanian. Mengingat Kabupaten Tulungagung yang sebagian masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, maka akan lebih baik jika konsep kawasan sentra produksi ini lebih diterapkan terlebih dahulu yang selanjutnya dapat membentuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

Pengembangan kawasan ini harus mendapat dukungan penuh dari semua stakeholder terutama pemerintah Kabupaten Tulungagung yang memiliki peranan yang sangat penting. Dengan perencanaan dan tata kelola yang baik, keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi terpadu akan memberikan manfaat bagi semuat

pihat terutama masyarakat. Dengan melakukan pengembangan kawasan tersebut maka akan memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan lapangan kerja serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung. Selain itu, pengembangan kawasan tersebut juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga adanya manfaat yang dapat dirasakan bagi semua pihak.

g) Peningkatan Kerjasama Ekonomi Antar Daerah

Dalam era otonomi daerah, kerjasama ekonomi antar daerah menjadi sangat penting. Melalui kerjasama ini, kelebihan suatu daerah akan dapat dimanfaatkan oleh daerah lain, sedangkan kekurangannya dapat dibantu oleh daerah lainnya. Dengan demikian, pemanfaatan sumberdaya yang tersedia akan menjadi lebih baik dan efisien sehingga pembangunan masing-masing daerah dapat ditingkatkan. Kerjasama antar daerah perlu untuk dikembangkan dalam suatu wilayah pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa struktur perwilayahan pembangunan Kabupaten Tulungagung terhadap Provinsi Jawa Timur disebut sebagai Sub Satuan Wilayah Pembangunan (Sub SWP) dengan pusat pembangunan di Kabupaten Kediri yang meliputi wilayah Kabupaten Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Jombang. Peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah sangat perlu untuk dilakukan. Terutama dalam mengembangkan sektor unggulan yang dimiliki, serta dapat meningkatkan daya saing antar sektor dengan daerah lainnya. Selama ini, kerjasama ekonomi antar daerah di Kabupaten Tulungagung dikoordinir oleh pemerintah provinsi Jawa

Timur. Untuk kerjasama yang berdasarkan atas perjanjian dnegan daerah sekitar Kabupaten Tulungagung selama ini belum dilakukan.

Kerjasama antar daerah akan lebih baik jika pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat mengarahkan pada bidang perencanaan. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan yang dapat mengembangkan pada bidang sosial ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejaheraan masyarakat daerah Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan untuk bertindak sebagai fasilitator, pemberi arah dan sekaligus mengawasi agar masing-masing daerah dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama. Peningkatan kerjasama antar daerah ini menjadi semakin penting. Oleh sebab itu, pemerintah daerah baik Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah Kabupaten Tulungagung akan lebih baik jika membentuk organisasi yang mengatur dan mengkoordinasikan kerjasama ekonomi antar daerah guna melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai sektor unggulan dan daya saing daerah sebagai upaya pengembangan wilayah Kabupaten Tulungagung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil perhitungan dan analisis yang peneliti gunakan dengan tiga metode analisis selama kurun waktu 5 tahun (2008-2012) maka diketahui sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan dan daya saing di Kabupaten Tulungagung. Selama 5 tahun analisis terdapat 4 (empat) sektor unggulan dan 2 (dua) sektor yang dianggap memiliki keuntungan kompetitif. Dari hasil analisis *Location Quotient* (LQ) terdapat empat sektor yang diungggulkan yaitu (1) sektor pertanian; (2) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (3) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta (4) sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut memiliki nilai LQ lebih dari 1 yang artinya sektor tersebut merupakan sektor unggulan.

Hasil analisis *Shift Share* pada komponen *national share* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tumbuh lebih lambat dibandingkan di Provinsi Jawa Timur. Sementara pada komponen *industrial mix* terdapat empat sektor yang memiliki nilai

postif yang artinya pertumbuhan sektor tersebut lebih cepat di Kabupaten Tulungagung dibandingkan di Provinsi Jawa Timur. Adapun sektor tersebut antara lain : sektor kontruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan, sektor yang memiliki nilai positif pada komponen *competitive position* hanya sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Sektor tersebut memiliki nilai positif selama 5 tahun analisis yang menandakan bahwa sektor tersebut lebih kompetitif di Kabupaten Tulungagung. Sehingga kedua sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang relatif lambat namun produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan daerah lain.

Selanjutnya, berdasarkan analisis *tipologi klassen* bahwa pengelompokkan sektor ekonomi berdasarkan struktur pertumbuhan Kabupaten Tulungagung tidak ada sektor yang termasuk dalam kelompok sektor potensial dan tumbuh pesat. Namun terdapat sektor yang temasuk dalam kelompok sektor maju tapi tertekan yaitu (1) sektor pertanian, (2) sektor perdagangan, hotel dan restoran (3) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (4) sektor jasa-jasa. Sektor tersebut perlu untuk dikembangkan karena memiliki nilai rata-rata kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan di provinsi jawa timur.

2. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa untuk pengembangan sektor unggulan dan daya saing daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan analisis

yang peneliti lakukan. Namun, ada salah satu sektor yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam pengembangannya yaitu sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan ekonomi daerah antara pengembangan wilayah dengan pengembangan sektor harus saling melengkapi. Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dapat menjadikan sektor-sektor yang diunggulkan dan yang memiliki daya saing dari hasil analisis untuk mendapatkan prioritas dalam pengembangan kedepannya.

Maka, beberapa strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung guna mendukung dalam melakukan pengembangan wilayah antara lain : strategi berbasis keuntungan kompetitif daerah, pengembangan komoditi unggulan, peningkatan kemampuan teknologi daerah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kewirausahaan daerah, pengembangan kawasan ekonomi terpadu, serta peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka beberapa saran yang peneliti berikan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis yang peneliti lakukan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk dapat memajukan daerahnya. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat memberikan prioritas pengembangan pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan karena sektor tersebut termasuk dalam sektor unggulan sehingga dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang.
2. Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus memaksimalkan dalam melakukan kerjasama ekonomi antar daerah untuk mengembangkan sektor unggulan dan daya saing yang dimiliki. Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan, karena antar daerah dapat memanfaatkan kelebihan dari sektor unggulan yang dimiliki dan kekurangannya dapat dibantu dengan daerah lain. Sehingga dapat memanfaatkan secara maksimal sektor-sektor yang memiliki keuntungan kompetitif.
3. Peningkatan dalam penyediaan infrastruktur guna mendukung kerjasama ekonomi antar kabupaten/kota yang memiliki hubungan kerjasama dengan Kabupaten Tulungagung. Peningkatan tersebut melalui peningkatan kapasitas jalan agar dapat meningkatkan daya tarik kerjasama antar kabupaten/kota. Hal ini dapat dilakukan pada daerah yang aksesnya masih terbatas dengan Kabupaten Tulungagung.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan sektor-sektor yang diunggulkan dan disaingkan harus tetap memperhatikan aspek lingkungan yang tetap mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut diupayakan untuk menjaga kelestarian lingkunga dan meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan dalam pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Melalui sektor-sektor yang diunggulkan dan memiliki daya saing tinggi maka pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat mengembangkan sektor-sektor tersebut melalui pengembangan UMKM yang berbasis teknologi yang ramah lingkungan. Peningkatan teknologi yang diciptakan untuk memudahkan dalam mengembangkan sektor unggulan. Peningkatan teknologi ini harus mampu menjaga lingkungan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan memberikan penanganan yang tepat terhadap limbah yang dihasilkan dari teknologi dalam mengembangkan sektor-sektor tersebut.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Piter dkk. 2002. *Daya Saing Daerah : Konsep dan Pengukuran di Indonesia.* Yogyakarta : BPFE.

Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan.* Yogyakarta : STIM YKPN Yogyakarta.

BPS Kabupaten Tulungagung. 2013. *Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung Tahun 2013.* Katalog BPS

_____. 2013. *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2013.* Tulungagung : Katalog BPS

BPS Provinsi Jawa Timur. 2013. *Jawa Timur Dalam Angka 2013*. Jawa Timur : Katalog BPS.

Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Daryanto, Arief dan Hafizrianda, Yundy. 2010. *Model-model Kuantitatif Untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah : Konsep dan Aplikasi.* Bogor : IPB Press.

BAPPEDA Kabupaten Tulungagung. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025.

_____. 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032.

_____. 2014. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018.

Fachrurrazy. 2009. *Analisis Penentu Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB.* Medan : Universitas Sumatra Utara.

Guntara, Ilham. 2013. *Location Quotient (LQ), Multiplier Effect, dan Analisis Shift Share.* Diakses melalui http://www.guntara.com/2013/10/location-quotient-lc-multiplier-effect.html pada tanggal 11 Februari 2014.

Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan.* Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Harry, Sonny. 2009. *Peran Ekonomi Regional dalam Pengembangan Wilayah*. Diakses melalui http://bulletin.penataanruang.net/index. pada tanggal 07 Februari 2014.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta : Erlangga

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Strategi, dan peluang.* Yogyakarta : Penerbit Erlangga.

Muktiali, Mohammad. 2007. *Analisis LQ dan Shift Share : Konsepsi dan Teknik Analisis.* JPWK Undip Semarang.

Nazir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nilga, Mareta Setia. 2012. *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Penentuan Sektor Unggulan Kota Surabaya Tahun 2007-2011.* Universitas Negeri Surabaya.

Riadi, Mukti. 2008. *Analisis Sektor Ekonomi Potensial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.* Institut Pertanian Bogor.

Riyadi dan Supriady, Deddy. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Rustiadi, Ernan dan Saefulhakim, Sunsun,dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.* Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Siagian, Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, Strateginya.* Jakarta : Bumi Aksara.

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi.* Padang : Baduose Media

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung : Alfabeta.

Suryono. Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan.* Malang : UB Press.

Susantono, Bambang. 2009. *Strategi dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah.* Jakarta : Kata hasta Pustaka.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keungan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tarigan, Robinson. 2009. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi.* Jakarta : PT Bumi Aksara.

_____2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah.* Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Undang-undang No.25. 2013. "UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) No.25 Tahun 2004", diakses pada Tanggal 06 November 2013 dari *www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU252004.pdf*

Undang-Undang No.32. 2013. "UU Pemerintahan Daerah No.32 Tahun 2004", diakses pada Tanggal 06 November 2013 dari *www.kpu.go.id/.../UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf*

Wibowo, Edi. 2008. *Perencanaan dan Strategi Pembangunan Di Indonesia.* Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 8 No. 1

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

CURRICULUM VITAE

Nama : Intan Nastiti Permatasari

Nomor Induk Mahasiswa : 105030600111016

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 21 November 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl . Shinta no 40 Larangan Utara Tangerang 15154

Alamat di Malang : Jl. Watumujur I No. 16 Malang

Pendidikan :

1. SD Negeri Gunung 01 Pagi Jakarta Tahun 1998-2004
2. SMP Negeri 29 Jakarta Tahun 2004-2007
3. SMA Negeri 32 Jakarta Tahun 2007-2010
4. Universitas Brawijaya, Jurusan Administrasi Publik, Minat Perencanaan Pembangunan Tahun 2010-2014

Pengalaman Organisasi :

1. Staff Eksternal Research Study Club (RSC) Tahun 2011-2012
2. Staff Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012-2013

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN

1. PDRB Kabupaten Tulungagung ADHK 2000 Tahun 2008-2012

PDRB Kabupaten Tulungagung Atas Dasar Harga Konstan 2000

GRDP in Tulungagung Regency at Constant Market Price 2000

2008 - 2012

(Juta Rupiah)

NO.	Sektor/Sub Sektor *Sectors/Sub Sectors*	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
1	**PERTANIAN/*AGRICULTURE***	**1,388,887.87**	**1,434,546.12**	**1,468,108.17**	**1,505,754.89**	**1,557,460.85**
	a.Tanaman Bahan Makanan/*Farm Food Crops*	847,393.29	868,205.27	882,704.30	897,622.00	925,818.10
	b.Tanaman Perkebunan/*Farm Non Food and Estate Crops*	149,309.51	151,862.70	152,743.51	153,675.24	154,551.19
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya/*Livestock and Products*	253,727.21	272,680.63	287,787.14	305,428.49	323,693.11
	d. Kehutanan/*Forestry*	7,681.08	7,739.46	7,892.70	7,980.31	8,061.71
	e. Perikanan/*Fishery*	129,976.79	134,058.07	136,980.53	141,048.85	145,336.74
2	**PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN**	**132,688.30**	**139,291.46**	**146,019.23**	**152,940.54**	**158,476.99**
	a. Minyak dan Gas Bumi/*Crude Petroleum and Natural Gas Mini*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Pertambangan Non Migas/*Non Metroleum and Natural Gas Mi*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c. Penggalian/*Quarrying*	132,688.30	139,291.46	146,019.23	152,940.54	158,476.99
3	**INDUSTRI PENGOLAHAN/*MANUFACTURING INDUSTRI***	**1,327,851.61**	**1,300,669.27**	**1,384,755.06**	**1,479,739.47**	**1,582,300.40**
	1. Makanan, Minuman dan Tembakau/*Food, Beverages, and Tob*	441,460.01	481,632.87	522,667.99	569,028.64	619,729.09
	2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki/*Textile, Garment and Leat*	416,593.64	427,550.06	447,131.85	469,877.33	495,626.61
	3. Kayu dan Sejenisnya/*Wood and Alike*	114,554.68	121,130.12	127,574.24	134,476.01	141,105.67
	4. Kertas, Percetakan dan Penerbitan/*Paper, Printing and Publishi*	103,670.21	111,352.17	120,137.86	129,977.15	139,777.42
	5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	18,914.56	20,109.96	21,310.52	22,433.59	23,761.65
	6. Semen dan Barang Galian Non Logam	117,636.59	122,789.08	128,842.58	135,838.73	143,663.04
	7. Logam Dasar, Besi dan Baja/*Basic Metal,*	3,595.11	3,801.47	4,003.71	4,220.31	4,461.71
	8. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan	10,666.01	11,488.36	12,215.52	12,961.89	13,239.27
	9. Barang lainnya/*Others*	760.80	815.20	870.79	925.83	935.92
4	**LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH/*ELECTRICITY, GAS AN***	**93,233.69**	**97,601.93**	**103,089.76**	**109,296.65**	**116,008.18**
	a. Listrik/*Electricity*	91,101.03	95,364.56	100,733.58	106,807.82	113,376.50
	b. Gas Kota/*City Gas*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c. Air Bersih/*Water Supply*	2,132.66	2,237.37	2,356.18	2,488.83	2,631.69
5	**KONSTRUKSI/*CONSTRUCTION***	**121,592.24**	**126,893.66**	**133,289.10**	**142,512.71**	**151,989.80**
6	**PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN** *TRADE, HOTEL AND RESTAURANT*	**2,115,764.14**	**2,279,773.02**	**2,489,285.96**	**2,724,111.80**	**2,987,355.92**
	a. Perdagangan/*Trade*	1,922,028.01	2,066,399.65	2,256,095.13	2,469,070.51	2,708,817.26
	b. Hotel/*Hotels*	8,233.71	8,578.70	9,120.88	9,796.73	10,535.41
	c. Restauran/*Restaurant*	185,502.42	204,794.67	224,069.95	245,244.56	268,003.25
7	**PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI/*TRANSPORTATIO***	**324,215.12**	**359,188.32**	**401,092.28**	**444,697.65**	**481,243.37**
	a. Pengangkutan/*Transportation*	**207,036.30**	**219,159.63**	**235,060.26**	**252,582.00**	**269,685.62**
	7.1. Angkutan Rel/*Railway Transportation*	2,954.71	3,306.61	3,705.39	4,030.72	4,340.28
	7.2. Angkutan Jalan Raya/*Road Transportation*	140,220.61	146,474.45	154,398.72	163,122.25	172,876.96
	3. Angkutan Laut/*Seaborne Transportation*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Angkutan Penyeberangan/*Inland Shipping*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Angkutan Udara/*Aviation*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Jasa Penunjang Angkutan/*Service Allied to Transportation*	63,860.98	69,378.57	76,956.16	85,429.03	92,468.38
	b. Komunikasi/*Communication*	**117,178.82**	**140,028.69**	**166,032.02**	**192,115.65**	211,557.75
8	**KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JS PERUSAHAAN** *BANGKING AND OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES*	**753,857.00**	**794,599.66**	**840,625.52**	**891,041.97**	**951,895.54**
	a. Bank/Bank	40,312.01	43,936.05	47,688.19	51,796.05	56,426.62
	b. Lembaga Keuangan Bukan Bank/*Non Bank Financial Institutio*	96,653.01	107,178.52	117,392.63	128,908.85	141,657.93
	c. Jasa Penunjang Keuangan/*Service Allied to Financial*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Sewa Bangunan/*Ownership of Dwelling*	478,941.07	495,560.33	518,019.62	544,179.61	579,279.19
	e. Jasa Perusahaan/*Business Service*	137,950.92	147,924.77	157,525.09	166,157.46	174,531.80
9	**JASA-JASA/*SERVICE***	**779,451.82**	**820,939.44**	**863,624.45**	**907,019.01**	**954,478.42**
	a. Pemerintahan Umum/*Government Service*	**341,360.90**	**355,049.48**	**368,718.88**	**383,209.53**	**398,959.45**
	1. Pemerintah Umum/*Government Service*	341,360.90	355,049.48	368,718.88	383,209.53	398,959.45
	b. Swasta/*Private Service*	**438,090.92**	**465,889.96**	**494,905.56**	**523,809.48**	**555,518.97**
	1. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan/*Social Service*	103,268.06	110,001.14	116,733.21	123,585.44	130,914.06
	2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan/*Entertainment and Cultur S*	44,319.18	48,826.44	53,269.65	56,119.57	59,991.83
	3. Jasa Perorangan dan Rumahtangga/*Individual and Househ*	290,503.67	307,062.38	324,902.71	344,104.46	364,613.08
	PDRB DENGAN MIGAS	**6,936,741.79**	**7,353,502.89**	**7,829,889.53**	**8,357,114.68**	**8,941,209.47**
	PDRB TANPA MIGAS	**6,936,741.79**	**7,353,502.89**	**7,829,889.53**	**8,357,114.68**	**8,941,209.47**

Keterangan : *) Angka Perbaikan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung
The Growth of GRDP in Tulungagung Regency
2008 - 2012

NO.	Sektor/Sub Sektor *Sectors/Sub Sectors*	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
1	**PERTANIAN/*AGRICULTURE***	**3.49**	**3.35**	**2.34**	**2.56**	**3.43**
	a. Tanaman Bahan Makanan/*Farm Food Crops*	2.56	2.46	1.67	1.69	3.14
	b. Tanaman Perkebunan/*Farm Non Food and Estate Crops*	1.68	1.71	0.58	0.61	0.57
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya/*Livestock and Products*	6.53	7.47	5.54	6.13	5.98
	d. Kehutanan/*Forestry*	0.21	0.76	1.98	1.11	1.02
	e. Perikanan/*Fishery*	6.26	3.14	2.18	2.97	3.04
2	**PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN**	**4.26**	**4.98**	**4.83**	**4.74**	**3.62**
	a. Minyak dan Gas Bumi/*Crude Petroleum and Natural Gas Mini*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Pertambangan Non Migas/*Non Metroleum and Natural Gas Mi*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c. Penggalian/*Quarrying*	4.26	4.98	4.83	4.74	3.62
3	**INDUSTRI PENGOLAHAN/*MANUFACTURING INDUSTRY***	**5.37**	**5.93**	**6.46**	**6.86**	**6.93**
	1. Makanan, Minuman dan Tembakau/*Food, Beverages, and Tobo*	7.92	9.10	8.52	8.87	8.91
	2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki/*Textile, Garment and Leat*	2.56	2.63	4.58	5.09	5.48
	3. Kayu dan Sejenisnya/*Wood and Alike*	5.70	5.74	5.32	5.41	4.93
	4. Kertas, Percetakan dan Penerbitan/*Paper, Printing and Publishi*	7.21	7.41	7.89	8.19	7.54
	5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	5.08	6.32	5.97	5.27	5.92
	6. Semen dan Barang Galian Non Logam	4.17	4.38	4.93	5.43	5.76
	7. Logam Dasar, Besi dan Baja/*Basic Metal,*	5.14	5.74	5.32	5.41	5.72
	8. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan	7.57	7.71	6.33	6.11	2.14
	9. Barang lainnya/*Others*	7.03	7.15	6.82	6.32	1.09
4	**LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH/*ELECTRICITY, GAS AND***	**10.23**	**4.69**	**5.62**	**6.02**	**6.14**
	a. Listrik/*Electricity*	10.39	4.68	5.63	6.03	6.15
	b. Gas Kota/*City Gas*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c. Air Bersih/*Water Supply*	3.74	4.91	5.31	5.63	5.74
5	**KONSTRUKSI/*CONSTRUCTION***	**4.23**	**4.36**	**5.04**	**6.92**	**6.65**
6	**PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN *TRADE, HOTEL AND RESTAURANT***	**7.42**	**7.75**	**9.19**	**9.43**	**9.66**
	a. Perdagangan/*Trade*	7.15	7.51	9.18	9.44	9.71
	b. Hotel/*Hotels*	4.16	4.19	6.32	7.41	7.54
	c. Restaurant/*Restaurant*	10.40	10.40	9.41	9.45	9.28
7	**PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI/*TRANSPORTATIO***	**11.55**	**10.79**	**11.67**	**10.87**	**8.22**
	a. Pengangkutan/*Transportation*	**6.86**	**5.86**	**7.26**	**7.45**	**6.77**
	7.1. Angkutan Rel/*Railway Transportation*	9.37	11.91	12.06	8.78	7.68
	7.2. Angkutan Jalan Raya/*Road Transportation*	5.83	4.46	5.41	5.65	5.98
	3. Angkutan Laut/*Seaborne Transportation*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Angkutan Penyeberangan/*Inland Shipping*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Angkutan Udara/*Aviation*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Jasa Penunjang Angkutan/*Service Allied to Transportation*	9.08	8.64	10.92	11.01	8.24
	b. Komunikasi/*Communication*	**20.93**	**19.50**	**18.57**	**15.71**	**10.12**
8	**KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JS PERUSAHAAN *BANGKING AND OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES***	**5.11**	**5.40**	**5.79**	**6.00**	**6.83**
	a. Bank/Bank	10.85	8.99	8.54	8.61	8.94
	b. Lembaga Keuangan Bukan Bank/*Non Bank Financial Institutio*	8.66	10.89	9.53	9.81	9.89
	c. Jasa Penunjang Keuangan/*Service Allied to Financial*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Sewa Bangunan/*Ownership of Dwelling*	3.42	3.47	4.53	5.05	6.45
	e. Jasa Perusahaan/*Business Service*	7.10	7.23	6.49	5.48	5.04
9	**JASA-JASA/*SERVICE***	**5.29**	**5.32**	**5.20**	**5.02**	**5.23**
	a. Pemerintahan Umum/*Government Service*	**3.64**	**4.01**	**3.85**	**3.93**	**4.11**
	1. Pemerintah Umum/*Government Service*	3.64	4.01	3.85	3.93	4.11
	b. Swasta/*Private Service*	**6.62**	**6.35**	**6.23**	**5.84**	**6.05**
	1. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan/*Social Service*	7.50	6.52	6.12	5.87	5.93
	2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan/*Entertainment and Cultur S*	9.41	10.17	9.10	5.35	6.90
	3. Jasa Perorangan dan Rumahtangga/*Individual and Househ*	5.90	5.70	5.81	5.91	5.96
	PDRB DENGAN MIGAS	**5.68**	**6.01**	**6.48**	**6.73**	**6.99**
	PDRB TANPA MIGAS	**5.68**	**6.01**	**6.48**	**6.73**	**6.99**

Keterangan : *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tulungagung ADHK 2000 Tahun 2008-2012

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN TULUNGAGUNG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TAHUN 2008 - 2012

NO.	LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
1	**PERTANIAN**	**20,01**	**19,51**	**18,75**	**18,02**	**17,42**
	a.Tanaman Bahan Makanan	12,22	11,81	11,27	10,74	10,35
	b.Tanaman Perkebunan	2,15	2,07	1,95	1,84	1,73
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	3,66	3,71	3,68	3,65	3,62
	d. Kehutanan	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
	e. Perikanan	1,87	1,82	1,75	1,69	1,63
2	**PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN**	**1,91**	**1,89**	**1,86**	**1,83**	**1,77**
	a. Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Pertambangan tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Penggalian	1,91	1,89	1,86	1,83	1,77
3	**INDUSTRI PENGOLAHAN**	**17,70**	**17,69**	**17,69**	**17,71**	**17,70**
	a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Industri Tanpa Migas	**17,70**	**17,69**	**17,69**	**17,71**	**17,70**
	1. Makanan, Minuman dan Tembakau	6,36	6,55	6,68	6,81	6,93
	2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	6,01	5,81	5,71	5,62	5,54
	3. Barang Kayu dan Hasil Hutan lainnya	1,65	1,65	1,63	1,61	1,59
	4. Kertas dan Barang Cetakan	1,49	1,51	1,53	1,56	1,56
	5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	6. Semen dan Barang Galian Non Logam	1,70	1,67	1,65	1,63	1,61
	7. Logam Dasar, Besi dan Baja	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	8. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15
	9. Barang lainnya	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH**	**1,34**	**1,33**	**1,32**	**1,31**	**1,30**
	a. Listrik	1,31	1,30	1,29	1,28	1,27
	b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Air Bersih	0,03	0,03	z	0,03	0,03
5	**BANGUNAN**	**1,75**	**1,73**	**1,70**	**1,71**	**1,70**
6	**PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN**	**30,50**	**31,00**	**31,79**	**32,60**	**33,41**
	a. Perdagangan Besar dan Eceran	27,71	28,10	28,81	29,54	30,30
	b. Hotel	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	c. Restoran	2,67	2,78	2,86	2,93	3,00
7	**PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI**	**4,67**	**4,88**	**5,12**	**5,32**	**5,38**
	a. Pengangkutan	**2,98**	**2,98**	**3,00**	**3,02**	**3,02**
	1. Angkutan Rel	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
	2. Angkutan Jalan Raya	2,02	1,99	1,97	1,95	1,93
	3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Angkutan Sungai, Danau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Jasa Penunjang Angkutan	0,92	0,94	0,98	1,02	1,03
	b. Komunikasi	**1,69**	**1,90**	**2,12**	**2,30**	**2,37**
8	**KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JS PERUSAHAAN**	**10,87**	**10,81**	**10,74**	**10,66**	**10,65**
	a. Bank	0,58	0,60	0,61	0,62	0,63
	b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,39	1,46	1,50	1,54	1,58
	c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Sewa Bangunan	6,90	6,74	6,62	6,51	6,48
	e. Jasa Perusahaan	1,99	2,01	2,01	1,99	1,95
9	**JASA-JASA**	**11,24**	**11,16**	**11,03**	**10,85**	**10,68**
	a. Pemerintahan Umum	**4,92**	**4,83**	**4,71**	**4,59**	**4,46**
	1. Adm Pemerintah dan Pertahanan	4,92	4,83	4,71	4,59	4,46
	b. Swasta	**6,32**	**6,34**	**6,32**	**6,27**	**6,21**
	1. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan	1,49	1,50	1,49	1,48	1,46
	2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	0,64	0,66	0,68	0,67	0,67
	3. Jasa Perorangan dan Rumahtangga	4,19	4,18	4,15	4,12	4,08
	PDRB DENGAN MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PDRB TANPA MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

4. PDRB Provinsi Jawa Timur ADHK 2000 Tahun 2008-2012

Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur
Atas Dasar Harga Konstan'00 Tahun 2008-2012
(Juta Rupiah)

No	Sektor/Subsektor	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	**Pertanian**	**48,315,111.68**	**50,208,896.71**	**51,329,548.83**	**52,628,433.15**	**54,463,942.77**
	1.1. Tanaman Buhan Makanan	26,778,734.92	27,776,011.76	28,231,662.67	28,774,273.14	29,602,961.48
	1.2. Tanaman Perkebunan	6,860,314.18	7,171,086.42	7,237,133.25	7,456,131.01	7,632,728.73
	1.3. Peternakan	8,038,041.84	8,365,702.81	8,647,808.86	9,009,563.08	9,341,723.33
	1.4. Kehutanan	647,780.70	639,151.53	728,382.30	772,918.65	975,927.50
	1.5. Perikanan	5,990,240.04	6,256,944.13	6,484,561.75	6,615,547.26	6,910,601.73
II.	**Pertambangan Dan Penggalian**	**6,645,089.71**	**7,104,816.81**	**7,757,319.82**	**8,228,632.48**	**8,401,262.86**
	2.1. Pertambangan Migas	1,067,860.48	1,329,806.66	1,667,050.50	1,831,926.85	1,777,596.11
	2.2. Pertambangan Non Migas	574,036.18	608,409.32	673,233.66	724,182.21	757,320.78
	2.3. Penggalian	5,003,193.04	5,166,600.83	5,417,035.66	5,672,523.42	5,866,345.97
III.	**Industri Pengolahan**	**81,033,880.59**	**83,299,893.42**	**86,900,779.13**	**92,171,191.46**	**98,017,056.47**
	3.1. Makanan Minuman dan Tembakau	43,935,696.99	45,170,406.97	47,175,579.65	50,128,722.79	53,809,756.53
	3.2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	2,669,569.64	2,564,655.55	2,685,264.58	2,776,688.62	2,823,991.38
	3.3. Barang dari Kayu & Hasil Hutan lainnya	1,911,590.06	1,845,640.20	1,799,319.90	1,965,794.68	2,015,165.51
	3.4. Kertas dan Barang Cetakan	13,901,417.86	14,666,540.74	15,420,432.38	16,083,768.72	16,749,735.74
	3.5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	7,852,082.55	8,110,967.24	8,344,844.63	9,020,876.59	9,918,950.24
	3.6. Semen dan Barang Galian bukan Logam	2,713,685.41	2,721,494.91	2,741,959.47	3,137,569.11	3,208,264.78
	3.7. Logam dasar besi dan baja	3,201,603.53	3,227,875.82	3,441,989.12	3,636,459.99	3,962,094.37
	3.8. Alat Angkutan Mesin & Peralatanya	2,870,690.35	2,912,599.55	3,025,131.23	3,106,283.51	3,190,012.34
	3.9. Barang lainnya	2,017,544.19	2,079,712.41	2,266,258.17	2,315,027.45	2,339,085.58
IV.	**Listrik, Gas dan Air Bersih**	**4,246,146.61**	**4,361,515.81**	**4,642,081.81**	**4,932,084.36**	**5,238,431.69**
	4.1. Listrik	2,978,969.33	3,016,504.77	3,239,899.26	3,569,246.08	3,869,377.14
	4.2. Gas Kota	1,012,125.23	1,079,881.98	1,119,912.20	1,048,365.99	1,037,149.12
	4.3. Air Bersih	255,052.06	265,129.05	282,270.36	314,472.29	331,905.43
V.	**Konstruksi**	**9,887,403.83**	**10,307,883.76**	**10,992,599.76**	**11,994,825.72**	**12,840,565.41**
VI.	**Perdagangan, Hotel Dan Restoran**	**90,911,382.23**	**95,983,867.09**	**106,229,112.97**	**116,645,214.35**	**128,375,498.50**
	6.1. Perdagangan	74,426,340.67	78,452,805.70	86,937,627.10	95,198,460.50	105,151,262.62
	6.2. H o t e l	2,548,246.54	2,712,067.25	3,066,903.32	3,345,093.50	3,589,853.75
	6.3. Restoran	13,936,795.02	14,818,994.15	16,224,582.56	18,101,660.35	19,634,382.24
VII.	**Pengangkutan Dan Komunikasi**	**20,164,063.96**	**22,781,527.67**	**25,076,424.92**	**27,945,256.13**	**30,640,913.33**
	a. Angkutan	11,123,271.22	11,911,782.55	12,788,434.52	13,856,861.63	14,959,763.82
	1. Angkutan Rel	137,567.55	145,838.88	166,740.15	183,182.51	175,240.83
	2. Angkutan Jalan Raya	3,821,159.02	3,935,179.01	4,098,356.76	4,281,086.08	4,595,499.74
	3. Angkutan Laut	850,227.89	882,984.19	890,729.74	965,379.13	1,033,556.67
	4. Angkutan Penyebrangan	139,361.41	87,233.68	54,926.11	57,265.57	55,844.61
	5. Angkutan Udara	1,970,149.81	2,394,426.54	2,707,994.91	3,102,366.08	3,459,203.39
	6. Jasa Penunjang Angkutan	4,204,805.53	4,466,120.24	4,869,686.86	5,267,582.26	5,640,418.57
	b. Komunikasi	9,040,792.74	10,869,745.12	12,287,990.40	14,088,394.50	15,681,149.51
VIII	**Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perush**	**16,519,146.41**	**17,395,393.53**	**18,659,490.17**	**20,186,109.19**	**21,802,468.45**
	8.1. B a n k	4,095,009.15	4,348,490.22	4,699,990.97	5,153,252.96	5,689,640.29
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,984,496.18	2,124,998.52	2,405,942.47	2,751,977.74	3,049,074.95
	8.4. Sewa Bangunan	6,176,965.75	6,500,638.75	6,930,927.88	7,523,531.42	8,173,806.71
	8.5. Jasa Perusahaan	4,262,675.33	4,421,266.05	4,622,628.84	4,757,347.08	4,889,947.40
IX.	**Jasa - Jasa**	**27,816,461.60**	**29,417,374.11**	**30,693,407.48**	**32,251,530.62**	**33,886,297.81**
	a. Pemerintahan Umum	8,912,859.88	9,492,398.21	9,680,399.48	10,041,907.15	10,474,699.67
	b. Swasta	18,903,601.72	19,924,975.90	21,013,008.00	22,209,623.47	23,411,598.13
	1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	2,337,191.76	2,503,599.79	2,668,442.05	2,781,581.99	2,958,201.21
	2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan	906,718.22	969,303.96	1,093,919.02	1,284,814.80	1,379,648.59
	3. Jasa Perorangan Dan RT	15,659,691.75	16,452,072.15	17,250,646.92	18,143,226.68	19,073,748.33
	Produk Domestik Regional Bruto	**305,538,686.62**	**320,861,168.91**	**342,280,764.89**	**366,983,277.46**	**393,666,437.37**

Keterangan :
***) Angka Diperbaiki**
****) Angka Sementara**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
Tahun 2008 - 2012
(%)

No	Sektor/Subsektor	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	**Pertanian**	**3.12**	**3.92**	**2.23**	**2.53**	**3.49**
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	2.69	3.72	1.64	1.92	2.88
	1.2. Tanaman Perkebunan	0.57	4.53	0.92	3.03	2.37
	1.3. Peternakan	3.78	4.08	3.37	4.18	3.69
	1.4. Kehutanan	18.80	-1.33	13.96	6.11	26.27
	1.5. Perikanan	5.77	4.45	3.64	2.02	4.46
II.	**Pertambangan Dan Penggalian**	**9.31**	**6.92**	**9.18**	**6.08**	**2.10**
	2.1. Pertambangan Migas	20.22	24.53	25.36	9.89	-2.97
	2.2. Pertambangan Non Migas	6.83	5.99	10.65	7.57	4.58
	2.3. Penggalian	7.52	3.27	4.85	4.72	3.42
III.	**Industri Pengolahan**	**4.36**	**2.80**	**4.32**	**6.06**	**6.34**
	3.1. Makanan Minuman dan Tembakau	3.90	2.81	4.44	6.26	7.34
	3.2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	-5.51	-3.93	4.70	3.40	1.70
	3.3. Barang dari Kayu & Hasil Hutan lainnya	-0.88	-3.45	-2.51	9.25	2.51
	3.4. Kertas dan Barang Cetakan	7.44	5.50	5.14	4.30	4.14
	3.5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	4.07	3.30	2.88	8.10	9.96
	3.6. Semen dan Barang Galian bukan Logam	6.12	0.29	0.75	14.43	2.25
	3.7. Logam dasar besi dan baja	3.12	0.82	6.63	5.65	8.95
	3.8. Alat Angkutan Mesin & Peralatanya	12.35	2.89	3.86	2.68	2.70
	3.9. Barang lainnya	3.70	3.08	8.97	2.15	1.04
IV.	**Listrik, Gas dan Air Bersih**	**3.00**	**2.72**	**6.43**	**6.25**	**6.21**
	4.1. Listrik	3.33	1.26	7.41	10.17	8.41
	4.2. Gas Kota	1.50	6.69	3.71	-6.39	-1.07
	4.3. Air Bersih	5.35	3.95	6.47	11.41	5.54
V.	**Konstruksi**	**2.71**	**4.25**	**6.64**	**9.12**	**7.05**
VI.	**Perdagangan, Hotel Dan Restoran**	**8.07**	**5.58**	**10.67**	**9.81**	**10.06**
	6.1. Perdagangan	8.29	5.41	10.82	9.50	10.45
	6.2. Hotel	4.94	6.43	13.08	9.07	7.32
	6.3. Restoran	7.52	6.33	9.49	11.57	8.47
VII.	**Pengangkutan Dan Komunikasi**	**8.98**	**12.98**	**10.07**	**11.44**	**9.65**
	a. Angkutan	1.87	7.09	7.36	8.35	7.96
	1. Angkutan Rel	11.98	6.01	14.33	9.86	-4.34
	2. Angkutan Jalan Raya	0.89	2.98	4.15	4.46	7.34
	3. Angkutan Laut	3.71	3.85	0.88	8.38	7.06
	4. Angkutan Penyebrangan	1.96	-37.40	-37.04	4.26	-2.48
	5. Angkutan Udara	-4.04	21.54	13.10	14.56	11.50
	6. Jasa Penunjang Angkutan	5.14	6.21	9.04	8.17	7.08
	b. Komunikasi	19.21	29.23	13.03	14.65	11.31
VIII.	**Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perush**	**8.05**	**5.30**	**7.27**	**8.18**	**8.01**
	8.1. Bank	7.41	6.19	8.08	9.64	10.41
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	9.34	7.08	13.22	14.38	10.80
	8.4. Sewa Bangunan	9.42	5.24	6.62	8.55	8.64
	8.5. Jasa Perusahaan	6.15	3.72	4.55	2.91	2.79
IX.	**Jasa - Jasa**	**6.32**	**5.76**	**4.34**	**5.06**	**5.07**
	a. Pemerintahan Umum	5.38	6.50	1.98	3.73	4.31
	b. Swasta	6.77	5.40	5.46	5.69	5.41
	1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	7.24	7.12	6.58	4.24	6.35
	2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan	11.40	6.90	12.86	17.45	7.38
	3. Jasa Perorangan Dan RT	6.45	5.06	4.85	5.17	5.13
	Produk Domestik Regional Bruto	**5.94**	**5.01**	**6.68**	**7.22**	**7.27**

Keterangan :

*) Angka Diperbaiki

*) Angka Sementara

6. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Jawa Timur ADHK 2000 Tahun 2008-2012

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur
Atas Dasar Harga Konstan'00 Tahun 2008-2012

No	Sektor/Subsektor	2008	2009	2010	2011(*)	2012(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	**Pertanian**	**15.81**	**15.65**	**15.00**	**14.34**	**13.84**
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	8.76	8.66	8.25	7.84	7.52
	1.2. Tanaman Perkebunan	2.25	2.23	2.11	2.03	1.94
	1.3. Peternakan	2.63	2.61	2.53	2.46	2.37
	1.4. Kehutanan	0.21	0.20	0.21	0.21	0.25
	1.5. Perikanan	1.96	1.95	1.89	1.80	1.76
II.	**Pertambangan Dan Penggalian**	**2.17**	**2.21**	**2.27**	**2.24**	2.13
	2.1. Pertambangan Migas	0.35	0.41	0.49	0.50	0.45
	2.2. Pertambangan Non Migas	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19
	2.3. Penggalian	1.64	1.61	1.58	1.55	1.49
III.	**Industri Pengolahan**	**26.52**	**25.96**	**25.39**	**25.12**	**24.90**
	3.1. Makanan Minuman dan Tembakau	14.38	14.08	13.78	13.66	13.67
	3.2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	0.87	0.80	0.78	0.76	0.72
	3.3. Barang dari Kayu & Hasil Hutan lainnya	0.63	0.58	0.53	0.54	0.51
	3.4. Kertas dan Barang Cetakan	4.55	4.57	4.51	4.38	4.25
	3.5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	2.57	2.53	2.44	2.46	2.52
	3.6. Semen dan Barang Galian bukan Logam	0.89	0.85	0.80	0.85	0.81
	3.7. Logam dasar besi dan baja	1.05	1.01	1.01	0.99	1.01
	3.8. Alat Angkutan Mesin & Peralatanya	0.93	0.91	0.88	0.85	0.81
	3.9. Barang lainnya	0.66	0.65	0.66	0.63	0.59
IV.	**Listrik, Gas dan Air Bersih**	**1.39**	**1.36**	**1.36**	**1.34**	**1.33**
	4.1. Listrik	0.97	0.94	0.95	0.97	0.98
	4.2. Gas Kota	0.33	0.34	0.33	0.29	0.26
	4.3. Air Bersih	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08
V.	**Konstruksi**	**3.24**	**3.21**	**3.21**	**3.27**	**3.26**
VI.	**Perdagangan, Hotel Dan Restoran**	**29.75**	**29.91**	**31.04**	**31.78**	**32.61**
	6.1. Perdagangan	24.36	24.45	25.40	25.94	26.71
	6.2. Hotel	0.83	0.85	0.90	0.91	0.91
	6.3. Restoran	4.56	4.62	4.74	4.93	4.99
VII.	**Pengangkutan Dan Komunikasi**	**6.60**	**7.10**	**7.33**	**7.61**	**7.78**
	a. Angkutan	3.64	3.71	3.74	3.78	3.80
	1. Angkutan Rel	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
	2. Angkutan Jalan Raya	1.25	1.23	1.20	1.17	1.17
	3. Angkutan Laut	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26
	4. Angkutan Penyebrangan	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01
	5. Angkutan Udara	0.64	0.75	0.79	0.85	0.88
	6. Jasa Penunjang Angkutan	1.38	1.39	1.42	1.44	1.43
	b. Komunikasi	2.96	3.39	3.59	3.84	3.98
VIII.	**Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perush**	**5.41**	**5.42**	**5.45**	**5.50**	**5.54**
	8.1. Bank	1.34	1.36	1.37	1.40	1.45
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.65	0.66	0.70	0.75	0.77
	8.4. Sewa Bangunan	2.02	2.03	2.02	2.05	2.08
	8.5. Jasa Perusahaan	1.40	1.38	1.35	1.30	1.24
IX.	**Jasa - Jasa**	**9.10**	**9.17**	**8.97**	**8.79**	**8.61**
	a. Pemerintahan Umum	2.92	2.96	2.83	2.74	2.66
	b. Swasta	6.19	6.21	6.14	6.05	5.95
	1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	0.76	0.78	0.78	0.76	0.75
	2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan	0.30	0.30	0.32	0.35	0.35
	3. Jasa Perorangan Dan RT	5.13	5.13	5.04	4.94	4.85
	Produk Domestik Regional Bruto	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Keterangan :
*) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

7. Hasil Perhitungan Analisis *Location Quotient* (LQ) Tahun 2008-2012

PDRB Kabupaten Tulungagungdan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Harga Konstan

No	Sektor	Kabupaten Tulungagung					Provinsi Jawa Timur				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	1.388.087,87	1.434.546,12	1.468.108,17	1.505.754,89	1.557.460,85	48.315.111,68	50.208.896,71	51.329.548,83	52.628.433,15	54.463.942,77
2	Pertambangan dan Penggalian	132.688,30	139.291,46	146.019,23	152.940,54	158.476,99	6.645.089,71	7.104.816,81	7.757.319,82	8.228.632,48	8.401.262,86
3	Industri Pengolahan	1.227.851,61	1.300.669,27	1.384.755,06	1.479.739,47	1.582.300,40	81.033.880,59	83.299.893,42	86.900.779,13	92.171.191,46	98.017.056,47
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	93.233,69	97.601,93	103.089,76	109.296,65	110.008,18	4.246.146,61	4.361.515,81	4.642.081,81	4.932.084,36	5.238.431,69
5	Konstruksi	121.592,24	126.893,66	133.289,10	142.512,71	151.989,80	9.887.403,83	10.307.883,76	10.992.599,76	11.994.825,72	12.840.565,41
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2.115.764,14	2.279.773,02	2.489.285,96	2.724.111,80	2.987.355,92	90.911.382,23	95.983.867,09	106.229.112,97	116.645.214,35	128.375.498,60
7	Pengangkutan dan Komunikasi	324.215,12	359.188,32	401.092,28	444.697,65	481.243,37	20.164.063,96	22.781.527,67	25.076.424,92	27.945.256,13	30.640.913,33
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	753.857,00	794.599,66	840.625,52	891.041,97	951.895,54	16.519.146,41	17.395.393,53	18.659.490,17	20.186.109,19	21.802.468,45
9	Jasa-jasa	779.451,82	820.939,00	863.624,45	907.019,01	954.478,42	27.816.461,60	29.417.374,11	30.693.407,48	32.251.530,62	33.886.297,81
	Total PDRB	**6.936.741,79**	**7.353.502,89**	**7.829.889,53**	**8.357.114,68**	**8.941.209,47**	**305.538.686,62**	**320.861.168,91**	**342.280.764,89**	**366.983.277,46**	**393.666.437,37**

Hasil Perhitungan LQ

No.	Sektor	Hasil Perhitungan LQ					Rata-rata	Peringkat
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	Pertanian	**1,27**	**1,25**	**1,25**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	2
2	Pertambangan dan Penggalian	0,88	0,86	0,82	0,82	0,83	0,84	6
3	Industri Pengolahan	0,67	0,68	0,70	0,70	0,71	0,69	8
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,97	0,98	0,97	0,97	0,92	0,96	5
5	Konstruksi	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,53	9
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	**1,03**	**1,04**	**1,02**	**1,03**	**1,02**	**1,03**	4
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,71	0,69	0,70	0,70	0,69	0,70	7
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	**2,01**	**1,99**	**1,97**	**1,94**	**1,92**	**1,97**	1
9	Jasa-jasa	**1,23**	**1,22**	**1,23**	**1,23**	**1,24**	**1,23**	3

Keterangan:

Hasil Location Quotient = (PDRB sektor *i* di Kabupaten Tulungagung : Total PDRB KabupatenTulungagung) / (PDRB sektor *i* di Provinsi Jawa Timur : Total PDRB Provinsi Jawa Timur)

8. Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share* (SS) Tahun 2008-2012

a) Analisis *Shift Share* Tahun 2008-2009

Data PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2009

No	Sektor	Kabupaten Tulungagung (Tahun)		Provinsi Jawa Timur (Tahun)	
		2008	2009	2008	2009
1	Pertanian	1.388.087,87	1.434.546,12	48.315.111,68	50.208.896,71
2	Pertambangan dan Penggalian	132.688,30	139.291,46	6.645.089,71	7.104.816,81
3	Industri Pengolahan	1.227.851,61	1.300.669,27	81.033.880,59	83.299.893,42
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	93.233,69	97.601,93	4.246.146,61	4.361.515,81
5	Konstruksi	121.592,24	126.893,66	9.887.403,83	10.307.883,76
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2.115.764,14	2.279.773,02	90.911.382,23	95.983.867,09
7	Pengangkutan dan Komunikasi	324.215,12	359.188,32	20.164.063,96	22.781.527,67
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	753.857,00	794.599,66	16.519.146,41	17.395.393,53
9	Jasa-jasa	779.451,82	820.939,00	27.816.461,60	29.417.374,11
	Total PDRB	6.936.741,79	7.353.502,89	305.538.686,62	320.861.168,91

b) Perhitungan Perubahan dari Data PDRB

No	Sektor	Pergeseran Kab. Tulungagung	Laju Pertumbuhan Kab. Tulungagung	Laju Pertumbuhan Provinsi Jatim
1	Pertanian	46.458,25	1,03	1,04
2	Pertambangan dan Penggalian	6.603,16	1,05	1,07
3	Industri Pengolahan	72.817,66	1,06	1,03
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.368,24	1,05	1,03
5	Konstruksi	5.301,42	1,04	1,04
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	164.008,88	1,08	1,06
7	Pengangkutan dan Komunikasi	34.973,20	1,11	1,13
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	40.742,66	1,05	1,05
9	Jasa-jasa	41.487,18	1,05	1,06
	Total	416.761,10	1,06	1,05

Keterangan :

a. Pergeseran Kabupaten Tulungagung = PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2009 - PDRB sektor *i* Kabupaten Tulungagung Tahun 2008

b. Laju Pertumbuhan Kab. Tulungagung = PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2009 : PDRB sektor *i* Kabupaten Tulungagung Tahun 2008

c. Laju Pertumbuhan Provinsi Jatim = PDRB sektor *i* Provinsi Jatim Tahun 2009 : PDRB sektor *i* Provinsi Jatim Tahun 2008

c) Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share* Tahun 2008-2009

No	Sektor	National Share	Proportional Shift	Differential Shift		Pergeseran Struktur Ekonomi (SS)
				Nilai	Urutan	
1	Pertanian	69.611,32	-15.203,09	-7.949,99	9	46.458,25
2	Pertambangan dan Penggalian	6.654,20	2.525,58	-2.576,61	6	6.603,16
3	Industri Pengolahan	61.575,62	-27.240,26	38.482,30	2	72.817,66
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.675,58	-2.142,39	1.835,05	3	4.368,24
5	Konstruksi	6.097,74	-926,81	130,49	5	5.301,42
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	106.103,61	11.947,41	45.957,86	1	164.008,88
7	Pengangkutan dan Komunikasi	16.259,09	25.826,74	-7.112,63	8	34.973,20
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	37.805,23	2.182,61	754,82	4	40.742,66
9	Jasa-jasa	39.088,79	5.770,77	-3.372,38	7	41.487,18
	Total	347.871,18	2.740,56			416.760,65

Keterangan :

a. National Share = PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 x (Jumlah Laju Pertumbuhan Jawa timur - 1)

b. Industrial Mix = PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 x (Laju Pertumbuhan Sektor *i* Jawa Timur - Jumlah laju Pertumbuhan Jawa timur)

c. Competitive Position = PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 x (laju Pertumbuhan Sektor *i* Kabupaten Tulungagung - laju Pertumbuhan Sektor *i* Jawa Timur)

d. Pergeseran Struktur Ekonomi (SS) = National Share + Industrial Mix + Competitive Position

a) Analisis *Shift Share* Tahun 2009-2010

Data PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2010

No	Sektor	Kabupaten Tulungagung (Tahun)		Provinsi Jawa Timur (Tahun)	
		2009	2010	2009	2010
1	Pertanian	1.434.546,12	1.468.108,17	50.208.896,71	51.329.548,83
2	Pertambangan dan Penggalian	139.291,46	146.019,23	7.104.816,81	7.757.319,82
3	Industri Pengolahan	1.300.669,27	1.384.755,06	83.299.893,42	86.900.779,13
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	97.601,93	103.089,76	4.361.515,81	4.642.081,81
5	Konstruksi	126.893,66	133.289,10	10.307.883,76	10.992.599,76
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2.279.773,02	2.489.285,96	95.983.867,09	106.229.112,97
7	Pengangkutan dan Komunikasi	359.188,32	401.092,28	22.781.527,67	25.076.424,92
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	794.599,66	840.625,52	17.395.393,53	18.659.490,17
9	Jasa-jasa	820.939,00	863.624,45	29.417.374,11	30.693.407,48
	Total PDRB	7.353.502,89	7.829.889,53	320.861.168,91	342.280.764,89

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b) Perhitungan Perubahan dari Data PDRB

No	Sektor	Pergeseran Kab. Tulungagung	Laju Pertumbuhan Kab. Tulungagung	Laju Pertumbuhan Provinsi Jatim
1	Pertanian	33.562,05	1,02	1,02
2	Pertambangan dan Penggalian	6.727,77	1,05	1,09
3	Industri Pengolahan	84.085,79	1,06	1,04
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	5.487,83	1,06	1,06
5	Konstruksi	6.395,44	1,05	1,07
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	209.512,94	1,09	1,11
7	Pengangkutan dan Komunikasi	41.903,96	1,12	1,10
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	46.025,86	1,06	1,07
9	Jasa-jasa	42.685,45	1,05	1,04
Total		476.386,64	1,06	1,07

Keterangan :

a. Pergeseran Kabupaten Tulungagung = PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2010 - PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2009

b. Laju Pertumbuhan Kab. Tulungagung = PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2010 : PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2009

c. Laju Pertumbuhan Provinsi Jatim = PDRB sektor *i* Provinsi Jatim Tahun 2010 : PDRB sektor *i* Provinsi Jatim Tahun 2009

c) Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share* Tahun 2009-2010

No	Sektor	National Share	Proportional Shift	Differential Shift		Pergeseran Struktur Ekonomi (SS)
				Nilai	Urutan	
1	Pertanian	95.765,40	-63.746,63	1.543,28	4	33.562,05
2	Pertambangan dan Penggalian	9.298,62	3.493,84	-6.064,69	7	6.727,77
3	Industri Pengolahan	86.828,24	-30.602,94	27.860,49	1	84.085,79
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	6.515,57	-237,07	-790,67	5	5.487,83
5	Konstruksi	8.470,99	-41,89	-2.033,65	6	6.395,44
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	152.189,86	91.151,40	-33.828,32	9	209.512,94
7	Pengangkutan dan Komunikasi	23.978,19	12.204,65	5.721,12	3	41.903,96
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	53.044,76	4.697,58	-11.716,48	8	46.025,86
9	Jasa-jasa	54.803,08	-19.193,33	7.075,69	2	42.685,45
Total		**490.894,71**	**-2.274,39**			**476.387,09**

Keterangan :

a. National Share = PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 x (Jumlah Laju Pertumbuhan Jawa timur - 1)

b. Industrial Mix = PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 x (Laju Pertumbuhan Sektor *i* Jawa Timur - Jumlah laju Pertumbuhan Jawa timur)

c. Competitive Position = PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 x (laju Pertumbuhan Sektor *i* Kabupaten Tulungagung - laju Pertumbuhan Sektor *i* Jawa Timur)

d. Pergeseran Struktur Ekonomi (SS) = National Share + Industrial Mix + Competitive Position

a) Analisis *Shift Share* Tahun 2010-2011

Data PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2011

No	Sektor	Kabupaten Tulungagung (Tahun)		Provinsi Jawa Timur (Tahun)	
		2010	2011	2010	2011
1	Pertanian	1.468.108,17	1.505.754,89	51.329.548,83	52.628.433,15
2	Pertambangan dan Penggalian	146.019,23	152.940,54	7.757.319,82	8.228.632,48
3	Industri Pengolahan	1.384.755,06	1.479.739,47	86.900.779,13	92.171.191,46
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	103.089,76	109.296,65	4.642.081,81	4.932.084,36
5	Konstruksi	133.289,10	142.512,71	10.992.599,76	11.994.825,72
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2.489.285,96	2.724.111,80	106.229.112,97	116.645.214,35
7	Pengangkutan dan Komunikasi	401.092,28	444.697,65	25.076.424,92	27.945.256,13
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	840.625,52	891.041,97	18.659.490,17	20.186.109,19
9	Jasa-jasa	863.624,45	907.019,01	30.693.407,48	32.251.530,62
Total PDRB		7.829.889,53	8.357.114,68	342.280.764,89	366.983.277,46

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b) Perhitungan Perubahan dari Data PDRB

No	Sektor	Pergeseran Kab. Tulungagung	Laju Pertumbuhan Kab. Tulungagung	Laju Pertumbuhan Provinsi Jatim
1	Pertanian	37.646,72	1,03	1,03
2	Pertambangan dan Penggalian	6.921,31	1,05	1,06
3	Industri Pengolahan	94.984,41	1,07	1,06
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	6.206,89	1,06	1,06
5	Konstruksi	9.223,61	1,07	1,09
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	234.825,84	1,09	1,10
7	Pengangkutan dan Komunikasi	43.605,37	1,11	1,11
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	50.416,45	1,06	1,08
9	Jasa-jasa	43.394,56	1,05	1,05
	Total	527.225,15	1,07	1,07

Keterangan :

a. Pergeseran Kabupaten Tulungagung = PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2011 - PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2010

b. Laju Pertumbuhan Kab. Tulungagung = PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2011 : PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2010

c. Laju Pertumbuhan Provinsi Jatim = PDRB sektor *i* Provinsi Jatim Tahun 2011 : PDRB sektor *i* Provinsi Jatim Tahun 2010

c) Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share* Tahun 2010-2011

No	Sektor	National Share	Proportional Shift	Differential Shift		Pergeseran Struktur Ekonomi (SS)
				Nilai	Urutan	
1	Pertanian	105.953,84	-68.803,64	496,53	2	37.646,72
2	Pertambangan dan Penggalian	10.538,25	-1.666,54	-1.950,40	5	6.921,31
3	Industri Pengolahan	99.938,22	-15.954,73	11.000,93	1	94.984,41
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	7.440,02	-999,74	-233,39	3	6.206,89
5	Konstruksi	9.619,52	2.532,82	-2.928,73	7	9.223,61
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	179.652,57	64.429,82	-9.256,54	8	234.825,84
7	Pengangkutan dan Komunikasi	28.946,96	16.939,41	-2.281,00	6	43.605,37
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	60.668,21	8.107,24	-18.359,00	9	50.416,45
9	Jasa-jasa	62.328,05	-18.486,94	-446,56	4	43.394,56
	Total	**565.085,64**	**-13.902,31**			**527.225,16**

Keterangan :

a. National Share = PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 x (Jumlah Laju Pertumbuhan Jawa timur - 1)

b. Industrial Mix = PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 x (Laju Pertumbuhan Sektor *i* Jawa Timur - Jumlah laju Pertumbuhan Jawa timur)

c. Competitive Position = PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 x (laju Pertumbuhan Sektor *i* Kabupaten Tulungagung - laju Pertumbuhan Sektor *i* Jawa Timur)

d. Pergeseran Struktur Ekonomi (SS) = National Share + Industrial Mix + Competitive Position

a) Analisis *Shift Share* Tahun 2011-2012

Data PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2012

No	Sektor	Kabupaten Tulungagung (Tahun)		Provinsi Jawa Timur (Tahun)	
		2011	2012	2011	2012
1	Pertanian	1.505.754,89	1.557.460,85	52.628.433,15	54.463.942,77
2	Pertambangan dan Penggalian	152.940,54	158.476,99	8.228.632,48	8.401.262,86
3	Industri Pengolahan	1.479.739,47	1.582.300,40	92.171.191,46	98.017.056,47
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	109.296,65	110.008,18	4.932.084,36	5.238.431,69
5	Konstruksi	142.512,71	151.989,80	11.994.825,72	12.840.565,41
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2.724.111,80	2.987.355,92	116.645.214,35	128.375.498,60
7	Pengangkutan dan Komunikasi	444.697,65	481.243,37	27.945.256,13	30.640.913,33
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	891.041,97	951.895,54	20.186.109,19	21.802.468,45
9	Jasa-jasa	907.019,01	954.478,42	32.251.530,62	33.886.297,81
	Total PDRB	8.357.114,68	8.941.209,47	366.983.277,46	393.666.437,37

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b) Perhitungan Perubahan dari Data PDRB

No	Sektor	Pergeseran Kab. Tulungagung	Laju Pertumbuhan Kab. Tulungagung	Laju Pertumbuhan Provinsi Jatim
1	Pertanian	51.705,96	1,03	1,03
2	Pertambangan dan Penggalian	5.536,45	1,04	1,02
3	Industri Pengolahan	102.560,93	1,07	1,06
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	711,53	1,01	1,06
5	Konstruksi	9.477,09	1,07	1,07
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	263.244,12	1,10	1,10
7	Pengangkutan dan Komunikasi	36.545,72	1,08	1,10
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	60.853,57	1,07	1,08
9	Jasa-jasa	47.459,41	1,05	1,05
	Total	584.094,79	1,07	1,07

Keterangan :

a. Pergeseran Kabupaten Tulungagung = PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2012 - PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2011

b. Laju Pertumbuhan Kab. Tulungagung = PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2012 : PDRB sektor *i* Kab. Tulungagung Tahun 2011

c. Laju Pertumbuhan Provinsi Jatim = PDRB sektor *i* Provinsi Jatim Tahun 2012 : PDRB sektor *i* Provinsi Jatim Tahun 2011

c) Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share* Tahun 2011-2012

No	Sektor	National Share	Proportional Shift	Differential Shift		Pergeseran Struktur Ekonomi (SS)
				Nilai	Urutan	
1	Pertanian	109.482,64	-56.966,78	-809,90	5	51.705,96
2	Pertambangan dan Penggalian	11.120,23	-7.911,65	2.327,88	2	5.536,45
3	Industri Pengolahan	107.591,07	-13.740,09	8.709,94	1	102.560,93
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	7.946,90	-1.158,14	-6.077,23	6	711,53
5	Konstruksi	10.362,02	-313,64	-571,30	4	9.477,09
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	198.068,73	75.878,27	-10.702,87	9	263.244,12
7	Pengangkutan dan Komunikasi	32.333,73	10.562,72	-6.350,74	7	36.545,72
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	64.787,19	6.561,08	-10.494,70	8	60.853,57
9	Jasa-jasa	65.948,87	-19.973,85	1.484,39	3	47.459,41
Total		**607.641,39**	**-7.062,07**			**578.094,78**

Keterangan :

a. National Share = PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 x (Jumlah Laju Pertumbuhan Jawa timur - 1)

b. Industrial Mix = PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 x (Laju Pertumbuhan Sektor *i* Jawa Timur - Jumlah laju Pertumbuhan Jawa timur)

c. Competitive Position = PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 x (laju Pertumbuhan Sektor *i* Kabupaten Tulungagung - laju Pertumbuhan Sektor *i* Jawa Timur)

d. Pergeseran Struktur Ekonomi (SS) = National Share + Industrial Mix + Competitive Position

a) Rata-rata Analisis *Shift Share* Tahun 2008-2012

PDRB ADHK 2000 Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012

No	Sektor	Kabupaten Tulungagung					Provinsi Jawa Timur				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	1.388.087,87	1.434.546,12	1.468.108,17	1.505.754,89	1.557.460,85	48.315.111,68	50.208.896,71	51.329.548,83	52.628.433,15	54.463.942,77
2	Pertambangan dan Penggalian	132.688,30	139.291,46	146.019,23	152.940,54	158.476,99	6.645.089,71	7.104.816,81	7.757.319,82	8.228.632,48	8.401.262,86
3	Industri Pengolahan	1.227.851,61	1.300.669,27	1.384.755,06	1.479.739,47	1.582.300,40	81.033.880,59	83.299.893,42	86.900.779,13	92.171.191,46	98.017.056,47
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	93.233,69	97.601,93	103.089,76	109.296,65	110.008,18	4.246.146,61	4.361.515,81	4.642.081,81	4.932.084,36	5.238.431,69
5	Konstruksi	121.592,24	126.893,66	133.289,10	142.512,71	151.989,80	9.887.403,83	10.307.883,76	10.992.599,76	11.994.825,72	12.840.565,41
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2.115.764,14	2.279.773,02	2.489.285,96	2.724.111,80	2.987.355,92	90.911.382,23	95.983.867,09	106.229.112,97	116.645.214,35	128.375.498,60
7	Pengangkutan dan Komunikasi	324.215,12	359.188,32	401.092,28	444.697,65	481.243,37	20.164.063,96	22.781.527,67	25.076.424,92	27.945.256,13	30.640.913,33
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	753.857,00	794.599,66	840.625,52	891.041,97	951.895,54	16.519.146,41	17.395.393,53	18.659.490,17	20.186.109,19	21.802.468,45
9	Jasa-jasa	779.451,82	820.939,00	863.624,45	907.019,01	954.478,42	27.816.461,60	29.417.374,11	30.693.407,48	32.251.530,62	33.886.297,81
Total PDRB		**6.936.741,79**	**7.353.502,89**	**7.829.889,53**	**8.357.114,68**	**8.941.209,47**	**305.538.686,62**	**320.861.168,91**	**342.280.764,89**	**366.983.277,46**	**393.666.437,37**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b) Perhitungan Perubahan dari Data PDRB

Perubahan

No	Sektor	Pergeseran Kabupaten Tulungagung				Laju Pertumbuhan Kabupaten Tulungagung				Laju Pertumbuhan Provinsi Jawa Timur			
		2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
1	Pertanian	46.458,25	33.562,05	37.646,72	51.705,96	1,03	1,02	1,03	1,03	1,04	1,02	1,03	1,03
2	Pertambangan dan Penggalian	6.603,16	6.727,77	6.921,31	5.536,45	1,05	1,05	1,05	1,04	1,07	1,09	1,06	1,02
3	Industri Pengolahan	72.817,66	84.085,79	94.984,41	102.560,93	1,06	1,06	1,07	1,07	1,03	1,04	1,06	1,06
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.368,24	5.487,83	6.206,89	711,53	1,05	1,06	1,06	1,01	1,03	1,06	1,06	1,06
5	Konstruksi	5.301,42	6.395,44	9.223,61	9.477,09	1,04	1,05	1,07	1,07	1,04	1,07	1,09	1,07
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	164.008,88	209.512,94	234.825,84	263.244,12	1,08	1,09	1,09	1,10	1,06	1,11	1,10	1,10
7	Pengangkutan dan Komunikasi	34.973,20	41.903,96	43.605,37	36.545,72	1,11	1,12	1,11	1,08	1,13	1,10	1,11	1,10
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	40.742,66	46.025,86	50.416,45	60.853,57	1,05	1,06	1,06	1,07	1,05	1,07	1,08	1,08
9	Jasa-jasa	41.487,18	42.685,45	43.394,56	47.459,41	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,04	1,05	1,05
	Total	416.761,10	476.386,64	527.225,15	584.094,79	1,06	1,06	1,07	1,07	1,05	1,07	1,07	1,07

c) Perhitungan Rata-rata Analisis *Shift Share* Tahun 2008-2012

No	Sektor	National Share	Proportional Shift	Differential Shift	Urutan	Shift Share
1	Pertanian	95.203,30	-51.180,03	-1.680,02	5	42.343,25
2	Pertambangan dan Penggalian	9.402,82	-889,69	-2.065,96	7	6.447,17
3	Industri Pengolahan	88.983,29	-21.884,51	21.513,42	1	88.612,20
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	6.644,52	-1.134,34	-1.316,56	3	4.193,62
5	Konstruksi	8.637,57	312,62	-1.350,80	4	7.599,39
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	159.003,69	60.851,72	-1.957,47	6	217.897,95
7	Pengangkutan dan Komunikasi	25.379,49	16.383,38	-2.505,81	8	39.257,06
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	54.076,35	5.387,13	-9.953,84	9	49.509,64
9	Jasa-jasa	55.542,20	-12.970,84	1.185,29	2	43.756,65
	Total	**502.873,23**	**-5.124,55**			**499.616,92**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

9. Hasil Perhitungan Analisis *Location Quotient* (LQ) Sektor dan Subsektor Tahun 2008-2012

No.	Sektor	Hasil Perhitungan LQ					Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	**Pertanian**	**1,27**	**1,25**	**1,25**	**1,26**	**1,26**	**1,26**
a	Tanaman Bahan Makanan	**1,39**	**1,36**	**1,37**	**1,37**	**1,38**	**1,37**
b	Tanaman Perkebunan	0,96	0,92	0,92	0,91	0,89	0,92
c	Peternakan	**1,39**	**1,42**	**1,45**	**1,49**	**1,53**	**1,46**
d	Kehutanan	0,52	0,53	0,47	0,45	0,36	0,47
e	Perikanan	0,96	0,93	0,92	0,94	0,93	0,94
2	**Pertambangan dan Penggalian**	0,88	0,86	0,82	0,82	0,83	0,84
a	Pertambangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Pertambangan Non Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Penggalian	**1,17**	**1,18**	**1,18**	**1,18**	**1,19**	**1,18**
3	**Industri Pengolahan**	0,67	0,68	0,70	0,70	0,71	0,69
a	Makanan, Minuman dan Tembakau	0,44	0,47	0,48	0,50	0,51	0,48
b	Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	**6,87**	**7,27**	**7,28**	**7,43**	**7,73**	**7,32**
c	Barang Kayu & Hasil Hutan lainnya	**2,64**	**2,86**	**3,10**	**3,00**	**3,08**	**2,94**
d	Kertas dan Barang Cetakan	0,33	0,33	0,34	0,35	0,37	0,34
e	Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
f	Semen dan Barang Galian Non Logam	**1,91**	**1,97**	**2,05**	**1,90**	**1,97**	**1,96**
g	Logam Dasar, Besi dan Baja	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
h	Alat Angkutan, Mesin & Peralatan	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
i	Barang Lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4	**Listrik, Gas dan Air Bersih**	0,97	0,98	0,97	0,97	0,98	0,97
a	Listrik	**1,35**	**1,38**	**1,36**	**1,31**	**1,29**	**1,34**
b	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Air Bersih	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,36
5	**Konstruksi**	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,53
6	**Perdagangan, Hotel dan Restoran**	**1,03**	**1,04**	**1,02**	**1,03**	**1,02**	**1,03**
a	Perdagangan	**1,14**	**1,15**	**1,13**	**1,14**	**1,13**	**1,14**
b	Hotel	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
c	Restoran	0,59	0,60	0,60	0,59	0,60	0,60
7	**Pengangkutan dan Komunikasi**	0,71	0,69	0,70	0,70	0,69	0,70
a	**Pengangkutan**	0,82	0,80	0,80	0,80	0,79	0,80
	1. Angkutan Rel	0,95	0,99	0,97	0,97	1,09	0,99
	2. Angkutan Jalan Raya	**1,62**	**1,62**	**1,65**	**1,67**	**1,66**	**1,64**
	3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Angkutan Sungai, Danau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Jasa Penunjang Angkutan	0,67	0,68	0,69	0,71	0,72	0,69
b	**Komunikasi**	0,57	0,56	0,59	0,60	0,59	0,58
8	**Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**	**2,01**	**1,99**	**1,97**	**1,94**	**1,92**	**1,97**
a	Bank	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
b	Lembaga Keuangan Bukan Bank	**2,15**	**2,20**	**2,13**	**2,06**	**2,05**	**2,12**
c	Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Sewa Bangunan	3,42	3,33	3,27	3,18	3,12	3,26
e	Jasa Perusahaan	**1,43**	**1,46**	**1,49**	**1,53**	**1,57**	**1,50**
9	**Jasa-jasa**	**1,23**	**1,22**	**1,23**	**1,23**	**1,24**	**1,23**
a	**Pemerintahan Umum**	**1,69**	**1,63**	**1,67**	**1,68**	**1,68**	**1,67**
b	**Swasta**	**1,02**	**1,02**	**1,03**	**1,04**	**1,04**	**1,03**
	1. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan	**1,95**	**1,92**	**1,91**	**1,95**	**1,95**	**1,94**
	2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	**2,15**	**2,20**	**2,13**	**1,92**	**1,91**	**2,06**
	3. Jasa Perorangan dan Rumahtangga	0,82	0,81	0,82	0,83	0,84	0,83

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

10. Hasil Analisis *Tipologi Klassen* Sektor dan Subsektor Tahun 2008-2012

No	Sektor	Provinsi Jawa Timur		Kabupaten Tulungagung		Keterangan
		Rata-rata Laju Pertumbuhan (S)	Rata-rata Kontribusi PDRB (Sk)	Rata-rata Laju Pertumbuhan (Si)	Rata-rata Kontribusi PDRB (Ski)	
1	**Pertanian**	**3,06**	**14,93**	**3,03**	**18,74**	2 sektor maju tapi tertekan
a	Tanaman Bahan Makanan	2,57	8,21	2,30	11,28	2 sektor maju tapi tertekan
b	Tanaman Perkebunan	2,28	2,11	1,03	1,95	4 sektor relatif tertinggal
c	Peternakan	3,82	2,52	6,33	3,66	1 sektor yang maju dan tumbuh pesat
d	Kehutanan	12,76	0,22	1,02	0,10	4 sektor relatif tertinggal
e	Perikanan	4,07	1,87	3,52	1,75	4 sektor relatif tertinggal
2	**Pertambangan dan Penggalian**	**6,72**	**2,20**	**4,49**	**1,85**	4 sektor relatif tertinggal
a	Pertambangan Migas	15,41	0,44	0,00	0,00	4 sektor relatif tertinggal
b	Pertambangan Non Migas	7,12	0,19	0,00	0,00	4 sektor relatif tertinggal
c	Penggalian	4,76	1,57	4,49	1,85	2 sektor maju tapi tertekan
3	**Industri Pengolahan**	**4,78**	**25,58**	**6,31**	**17,70**	3 sektor potensial atau berkembang
a	Makanan, Minuman dan Tembakau	4,95	13,91	8,66	6,67	3 sektor potensial atau berkembang
b	Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	0,07	0,79	4,07	5,74	1 sektor yang maju dan tumbuh pesat
c	Barang Kayu & Hasil Hutan lainnya	0,98	0,56	5,42	1,62	1 sektor yang maju dan tumbuh pesat
d	Kertas dan Barang Cetakan	5,30	4,45	7,65	1,53	3 sektor potensial atau berkembang
e	Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	5,66	2,50	5,71	0,27	3 sektor potensial atau berkembang
f	Semen dan Barang Galian Non Logam	4,77	0,84	4,93	1,65	1 sektor yang maju dan tumbuh pesat
g	Logam Dasar, Besi dan Baja	5,03	1,01	5,47	0,05	3 sektor potensial atau berkembang
h	Alat Angkutan, Mesin & Peralatan	4,90	0,88	5,97	0,16	3 sektor potensial atau berkembang
i	Barang Lainnya	3,79	0,64	5,68	0,01	3 sektor potensial atau berkembang
4	**Listrik, Gas dan Air Bersih**	**4,92**	**1,36**	**6,54**	**1,32**	3 sektor potensial atau berkembang
a	Listrik	6,12	0,96	6,58	1,29	1 sektor yang maju dan tumbuh pesat
b	Gas	0,89	0,31	0,00	0,00	4 sektor relatif tertinggal
c	Air Bersih	6,54	0,08	5,07	0,03	4 sektor relatif tertinggal
5	**Konstruksi**	**5,95**	**3,24**	**5,44**	**1,72**	4 sektor relatif tertinggal
6	**Perdagangan, Hotel dan Restoran**	**8,84**	**31,02**	**8,69**	**31,86**	2 sektor maju tapi tertekan
a	Perdagangan	8,89	25,37	8,60	28,89	2 sektor maju tapi tertekan
b	Hotel	8,17	0,88	5,92	0,12	4 sektor relatif tertinggal
c	Restoran	8,68	4,77	9,79	2,85	3 sektor potensial atau berkembang
7	**Pengangkutan dan Komunikasi**	**10,62**	**7,28**	**10,62**	**5,07**	4 sektor relatif tertinggal
a	**Pengangkutan**	**6,53**	**3,73**	**6,84**	**3,00**	3 sektor potensial atau berkembang
	1. Angkutan Rel	7,57	0,05	9,96	0,05	3 sektor potensial atau berkembang
	2. Angkutan Jalan Raya	3,96	1,20	5,47	1,97	1 sektor yang maju dan tumbuh pesat
	3. Angkutan Laut	4,78	0,27	0,00	0,00	4 sektor relatif tertinggal
	4. Angkutan Sungai, Danau	-14,14	0,03	0,00	0,00	3 sektor potensial atau berkembang
	5. Angkutan Udara	11,33	0,78	0,00	0,00	4 sektor relatif tertinggal
	6. Jasa Penunjang Angkutan	7,13	1,41	9,58	0,98	3 sektor potensial atau berkembang
b	**Komunikasi**	**15,69**	**3,55**	**16,97**	**2,08**	3 sektor potensial atau berkembang
8	**Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**	**7,36**	**5,46**	**5,83**	**10,75**	2 sektor maju tapi tertekan
a	Bank	8,35	1,38	9,19	0,61	3 sektor potensial atau berkembang
b	Lembaga Keuangan Bukan Bank	10,96	0,71	9,76	1,49	2 sektor maju tapi tertekan
c	Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	4 sektor relatif tertinggal
d	Sewa Bangunan	7,69	2,04	4,58	6,65	2 sektor maju tapi tertekan
e	Jasa Perusahaan	4,02	1,33	6,27	1,99	1 sektor yang maju dan tumbuh pesat
9	**Jasa-jasa**	**5,31**	**8,93**	**5,21**	**10,99**	2 sektor maju tapi tertekan
a	**Pemerintahan Umum**	**4,38**	**2,82**	**3,91**	**4,70**	2 sektor maju tapi tertekan
b	**Swasta**	**5,75**	**6,11**	**6,22**	**6,29**	1 sektor yang maju dan tumbuh pesat
	1. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan	6,31	0,77	6,39	1,48	1 sektor yang maju dan tumbuh pesat
	2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	11,20	0,32	8,19	0,66	2 sektor maju tapi tertekan
	3. Jasa Perorangan dan Rumahtangga	5,33	5,02	5,86	4,14	3 sektor potensial atau berkembang

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Yos Sudarso III/7 Telp. (0355) 320726-327556
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 10 April 2014

Nomor : 072/949 /407.204 /2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : ***Ijin Survey/Riset***

Kepada
Yth. Sdr.
1. Kepala BAPPEDA Kab. Tulungagung
2. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab.Tulungagung

di
TULUNGAGUNG

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Tanggal : 7 Maret 2014
Nomor : 3188/UN10.3/PG/2014

Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama : INTAN NASTITI P
Alamat : Jl. Watumujur I No. 16 Malang
Kebangsaan : Indonesia

Yang bersangkutan diberikan ijin untuk mengadakan Survey :
Judul : " Analisis sektor unggulan dan daya saing daerah sebagai upaya pengembangan wilayah Kabupaten Tulungagung ".
Pengikut : -
Waktu : 2 Bulan terhitung mulai tanggal surat dikeluarkan
Lokasi : Kab. Tulungagung
Keterangan :
1. Peserta survey wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat survey.
2. Pelaksanaan survey agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat.
3. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai dilakukannya survey harap melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung.
4. Apabila tidak melaporkan hasil survey maka Bakesbang dan Politik akan mengirim surat kepada yang bertanggungjawab menugaskan survey bahwa hasil survey tersebut cacat hukum.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Sekretaris
Ub
Kabid Kewaspadaan dan Budaya Politik

Drs. TOTOK JOKO PURWANTORO
Pembina
NIP. 19700728 199101 1 001